

**PERAN I.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT DI INDONESIA 1921-1973**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Abraham Bondan Aji Wahyono

NIM : 011314044

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

SKRIPSI

**PERAN L.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT DI INDONESIA 1921-1973**

Oleh:

Abraham Bondan Aji Wahyono

NIM : 011314044

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



Drs. Sutarjo Adisusilo, JR, S.Th.

Tanggal 22 Agustus 2006

SKRIPSI

**PERAN IJ. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT DI INDONESIA 1921-1973**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Abraham Bondan Aji Wahyono
NIM : 011314044

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 1 September 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R. S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R. S.Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta, 1 September 2006
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



(Drs. Tarsisius Sarkim, M.Pd., Ph.D.)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * *Tuhan Yesus Kristus pelindung dan kekuatanku*
- * *Bunda Maria yang penuh Kasih membimbing dan menghaturkan segala permohonananku*
- * *Ayah dan ibuku yang telah mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya kepadaku.*
- * *Adik-adikku, David Ontosari Medi S. dan Maria Wening S.H. yang selalu mendukungku*
- * *Nenek yang senantiasa memberi restu dan doa kepadaku.*
- * *Bapak ibu dosen Prodi Pendidikan Sejarah yang telah memberi pengajaran dan dukungannya selama ini.*
- * *Sahabat-sahabatku, Dibyo, Lipo, dan teman-teman dekatku, Benz, Budi, Epi, Siska, Jovita yang telah mendorong dan mendukungku*
- * *Teman special yang pernah dekat di hatiku (Linda Butet Farmasi 2001), yang telah memberi pengalaman positif dalam merefleksikan suatu kehidupan yang lebih baik. Semoga mendapat kebahagiaan dan raih cita en cintanya serta sukses s'lalu.*
- * *Teman-teman kelompok PPL+, (Lipo, Suster Roberta, Indah, dan Puji) yang telah mendorong dan mendukungku*
- * *Teman-teman tim basket P.Sej. (Erwin, Widya, Budi, Iwan Habibi, dsb), yang telah bersama- sama berjuang mempertahankan juara I basket Dekan Cup selama 2 tahun.*
- * *Teman-teman angkatan 2001 Pendidikan Sejarah lainnya yang telah menyertai semasa studi dan memberi pengalaman yang begitu banyak kepadaku.*

MOTTO

- *Percaya dan bergantunglah kepada Allah untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang akan mengakhiri kecemasanku. (Ron Hiser)*
- *Yang hatinya Teguh kujagai dengan Damai Sajahtera, Sebab kepadamulah IA percaya. (Yesaya 26 : 3)*
- *Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng keselamatan hidupku, (Mazmur 27:1,14)*
- *Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah mu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu (Ulgm 20 :3 - 4)*
- * Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan..? (Abharam dlm Kej. 18)*
- *In Te Domine sepandanya hanya pada Mu Tuhan kuletakkan harapanku (Xavier)*
- * Perjalanan sejauh seribu mil terasailah dari sebuah langkah kecil." (Lao Tse)*
- * Bukan tingginya tingkat kecerdasan atau daya cipta atau keduanya yang menciptakan seseorang jenius... Tetapi Cinta, cinta dan cintalah yang melahirkan orang berjiwa jenius (Wolfgang Amandeus Mozart)*
- *Jangan Katakan apa yang akan Kau berikan kepada negaramu, tetapi katakan Apa yang dapat kuberikan kepadanya. (John Franklin Kennedy)*
- * Kita harus berpikir secara baru – dan bertindak secara baru (Abraham Lincoln)*

PERNYATAAN KEASILAN KARYA

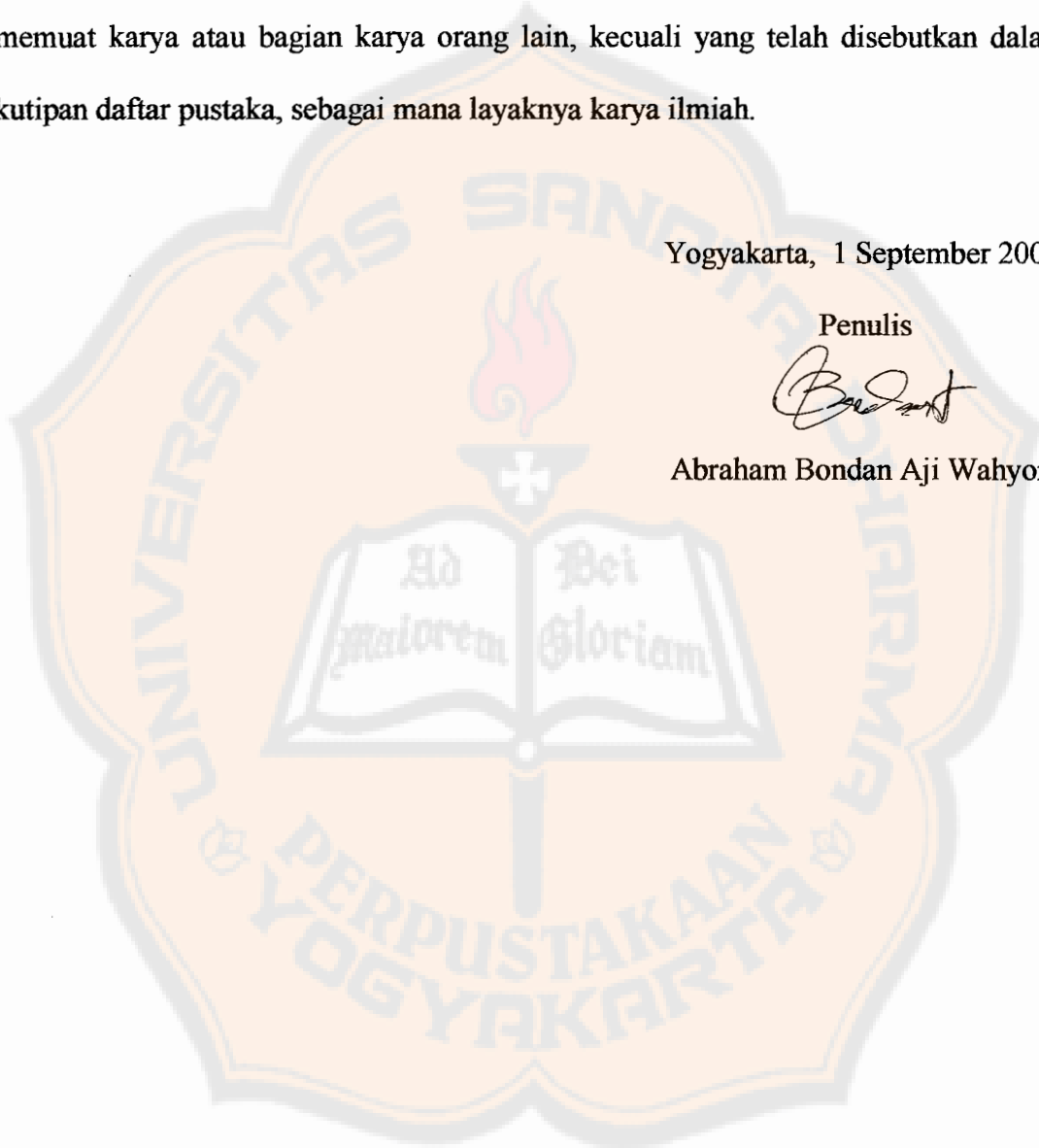
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan daftar pustaka, sebagai mana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 1 September 2006

Penulis



Abraham Bondan Aji Wahyono



ABSTRAK

**PERAN I.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DAN
BERMASYARAKAT DI INDONESIA 1921-1973**

Oleh: Abraham Bondan Aji Wahyono
NIM : 011314044

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang “Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973”. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu: (1) Siapa I.J. Kasimo dan bagaimana latar belakang kehidupannya?; (2) Bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973?; (3) Bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam penulisan metode sejarah meliputi pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi data, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sejarah, politik, sosial, budaya, dan agama. Model penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang kehidupan I.J. Kasimo sangat kompleks, yaitu meliputi latar belakang sosial politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Latar belakang kehidupan itu memberikan motivasi dan cita-cita pada diri I.J. Kasimo untuk berperan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973 meliputi upaya pendirian partai Katolik, yaitu PPKD, PPKI, dan PKRI; keikutsertaan dalam *Volksraad*; pergerakan politik dalam GAPI dan Petisi Sutarjo, memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan RI; berkiprah dalam lembaga DPA, Kabinet, dan MPRS; membuat program “Kasimo Plan”; penolakan Konsepsi Presiden, Pendirian Liga Demokrasi; perlindungan terhadap komunisme; dan usaha pembangunan ekonomi.

Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973 meliputi upaya perlindungan hak buruh perkebunan; penyelenggaraan pendidikan dengan berprofesi menjadi guru; mengembangkan iman umat Katolik ketika mengalami kehancuran pada masa pendudukan Jepang; pengkaderan generasi Katolik dalam AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia dan Wanita Katolik; intensifikasi perkebunan kopra dan tebu; perlindungan kaum buruh dari pengaruh komunisme; pembangunan ekonomi swasta (pendirian Bank Perkembangan Ekonomi dan PT Asuransi Ramayana), kebudayaan dan ilmu pengetahuan (pendirian majalah *Intisari*, surat kabar *Kompas*, dan percetakan PT Gramedia) serta pendirian Yayasan Kasimo.

ABSTRACT

**THE ROLE OF I.J. KASIMO IN INDONESIAN NATIONALITY
AND SOCIETY LIFE 1921-1973**

By : Abraham Bondan Aji Wahyono
NIM: 011314044

This thesis was written to describe and analyze "The Role of I.J. Kasimo in Indonesian Nationality and Society Life, 1921-1973". In this thesis there are three issues to be discussed, which are: (1) Who was I.J. Kasimo and how was his life background?; (2) how was I.J. Kasimo's roles in Indonesian nationality life, 1921-1973?; (3) How was I.J. Kasimo's roles in Indonesian society life, 1921-1973?

The method being used in this research was historical method. The steps in writing historical method included as topic selection, heuristic, resource critique, data interpretation, and historiography. This research used historical, political, social, cultural and religious approaches. The writing model of this thesis was descriptive analytic.

The results of this research indicated that background of I.J. Kasimo's life was highly complex. It involved socio-political, economical, cultural and education background. His life background provided him give motivated and goal passion to roled and participate in nationality and society life.

The roles of I.J. Kasimo in Indonesian nationality life 1921-1973 included are roles efforts to establish Catholic-based political parties, namely PPKD, PPKI, and PKRI; involvement as *Volksraad* membership; political movement in GAPI and *Petisi Sutarjo*, struggling efforts for RI independence and sovereignty; roled in institution DPA, Cabinet, and MPRS; maked recovery program with "*Kasimo Plan*"; refusing on *Konsepsi Presiden* (President's Concepts), establishing *Liga Demokrasi*; protecting against communism; and economic development efforts.

The roles of I.J. Kasimo in Indonesian society life 1921-1973 included are roles to protection on plantation workers/employees; developing education for teacher profession; supporting the faith of Catholic followers due to destruction during Japanese occupation era; creating Catholic generation cadres through education in *AMKRI* (*Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia*) and *Wanita Katolik*; intensified program for copra and sugar cane plantations; protecting workers against communism influences; public development in private economy field (establishing *Bank Perkembangan Ekonomi* and *PT Asuransi Ramayana*), cultural and scientific (establishing *Intisari* magazine, *Kompas* daily, and *PT Gramedia* publisher) and establishing Kasimo Foundation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R. S.Th., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan perhatian dalam membimbing penulis, serta memberikan banyak saran, masukan, pikiran dan referensi yang mendukung penulis dalam penyelesaian penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberi dukungan pelayanan kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
5. Staf perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis atau mendapatkan referensi, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini..
6. Staf perpustakaan Kolese Ignatius, Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan referensi dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang-tuaku, Yoanto Sardi dan Surastri Adi, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan bantuan baik moril maupun materiil bagi penulis.
8. Kedua adikku, David Ontosari Medi Setiawan dan Maria Wening Sulistyawati Handayani, yang telah memberikan dukungan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut membantu penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Yogyakarta, 1 Agustus 2006

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	12
E. Landasan Teori	13
F. Kajian Pustaka	31
G. Hipotesis	36
H. Metode dan Pendekatan Penelitian	37
1. Metode Penelitian	37
2. Pendekatan Penelitian	48
I. Sistematika Penulisan	48

BAB II. LATAR BELAKANG KEHIDUPAN I.J. KASIMO	50
A. Latar Belakang Sosial Budaya	50
1. Latar Belakang Keluarga	50
2. Latar Belakang Pendidikan	54
B. Latar Belakang Sosial Politik	64
1. Kondisi Sosial Politik	64
2. Kondisi Sosial Ekonomi	68
3. Kondisi Pendidikan	70
C. Motivasi dan Cita-Cita I.J. Kasimo	72
BAB III. PERAN I.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA	
DI INDONESIA 1921-1973	80
A. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara	
Pada Masa Kolonial 1921-1945	80
B. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara	
Pada Masa Demokrasi Liberal 1945-1955	89
C. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara	
Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1955-1965	118
D. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara	
Pada Masa Orde Baru 1966-1973	133
BAB IV. PERAN I.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN	
BERMASYARAKAT DI INDONESIA 1921-1973	154
A. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat	
Pada Masa Kolonial 1921-1945	154

B. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat	
Pada Masa Demokrasi Liberal 1945-1955	169
C. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat	
Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1955-1965	178
D. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat	
Pada Masa Orde Baru 1966-1973	184
BAB V. KESIMPULAN	196
DAFTAR PUSTAKA	199
LAMPIRAN	208
SUPLEMEN : SILABUS	243

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

I. LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran 1: Foto Diri I.J. Kasimo	208
Lampiran 2: I.J. Kasimo Pada Masa Pendidikan	209
Lampiran 3: I.J. Kasimo Ketika Menjadi Anggota Volksraad	210
Lampiran 4: I.J. Kasimo Sebagai Menteri Kemakmuran	211
Lampiran 5 : I.J. Kasimo Dalam KUKSI	212
Lampiran 6 : Lambang Partai Katolik	213

II. LAMPIRAN DOKUMEN

Lampiran 7 : Rencana Kemakmuran (Kasimo Plan)	214
Lampiran 8 : AD/ART PKRI	217
Lampiran 9: Minimum Program	218
Lampiran 10: Maklumat Pemerintah	226
Lampiran 11: Angenda KUKSI	227
Lampiran 12: Pernyataan Partai-Partai membentuk Partai Katolik.....	229
Lampiran 13: Pernyataan Bersama pada Tap MPRS No.XXII/MPRS/66.....	230
Lampiran 14: Deklarasi Pembantukan PDI	232
Lampiran 15: Daftar Nama Orang Katolik Dalam Lembaga Negara	233
Lampiran 16: Komposisi Keanggotaan DPR-RI	242

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menulis biografi seorang tokoh dilatarbelakangi oleh motivasi seseorang karena tokoh itu menarik dan mempunyai sesuatu atau berbagai perbuatan yang patut diketengahkan. Peranan tokoh yang ingin ditulis dapat dikatakan menarik, baik dirinya sebagai seorang politikus maupun cendekiawan/pemikir, sehingga ada ketertarikan untuk menulis biografinya. Peran seorang tokoh dapat diwujudkan dalam suatu jaman (sejamannya) atau dalam proses perkembangan sejarah, bahkan tidak jarang perannya sangat menentukan perkembangan perkembangan yang terjadi di masa berikutnya. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi para sejarawan atau penulis peristiwa sejarah untuk menyatakan bahwa “sejarah dunia tidak lebih dari serangkaian cerita tentang riwayat hidup orang-orang besar”¹, seperti yang dinyatakan oleh Thomas Carlyle sebagai seorang sejarawan.

Penokohan tentang I.J Kasimo ini dianggap menarik karena beberapa perjuangan dan peranannya di dalam kehidupannya tidak hanya memberikan kontribusi bagi bangsa dan negaranya tetapi juga masyarakatnya. Maka *scope* atau ruang lingkup yang akan diulas nantinya tidak hanya peranannya dalam

¹ H. Ruslan Abdulgani, *Penggunaan Ilmu Sejarah*, Prapantja. hal. 2.; Anhar Gonggong, *Mgr. Soegijapranata. S.Y. Antara Gereja dan Negara*, Jakarta: PT. Grasindo, 1993, hlm.1.

kehidupan bernegara (berkiprah dalam bidang politik dan pemerintahan), tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat (berkiprah dalam kehidupan sosial-budaya, dan pendidikan dalam masyarakat). Untuk mengetahui mengapa tokoh ini patut diketengahkan dan seberapa besar peranannya, ada baiknya dituliskan terlebih dahulu beberapa hal latar belakang kehidupan yang menghantar dirinya sebagai seorang anak bangsa untuk berjuang bagi negara dan masyarakatnya.

Kasimo terlahir sebagai seorang generasi intelektual muda Indonesia atas pengaruh dari Politik Etis pada awal abad ke-20. Politik Etis ini memberikan pengaruh pada I.J. Kasimo yang menyebabkan sehingga dirinya menjadi seorang pemikir sekaligus nasionalis yang nantinya berjuang bagi kepentingan rakyat kecil dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Politik Etis sendiri dikeluarkan pada tahun 1901, dalam pidato yang dikemukakan oleh Ratu Wilhelmina (1890-1948) dengan berjudul *Ehtische Richting* (Haluan Etika) atau *Nieuw Keurs* (Haluan Baru) karena terdapat banyaknya respon dan kritik dari parlemen yang bersifat/berhaluan liberalis (dari Partai Liberal yang memenangkan pemilu pada tahun 1901) di negeri Belanda, termasuk di antaranya kritik yang terpenting dari C. Th. Van Deventer yang termuat dalam majalah *de Gids* pada tahun 1899, yakni kritik yang berjudul *Een Eereschuld* (*Debt of Honour* atau Utang Budi).² Dalam karangannya itu antara lain dikemukakan bahwa kemakmuran negeri Belanda

² G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 1 Dari Kebangkitan Nasional sampai Lingkarati*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 21.

berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang Budi yang dimaksudkan tersebut ialah bahwa Belanda haruslah membalas budi mengenai pemenuhan atas kekosongan kepada Indonesia karena kas negaranya sebagai akibat Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia itu diisi oleh keringat orang Indonesia dalam pengerahan tenaga kerjanya secara eksploitasi oleh institusi dagangnya yaitu VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada abad XVII-XVIII. Oleh karena itu, menurut van Deventer, "Hutang Budi" itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui trias politika-nya, yaitu: irigasi, emigrasi/transmigrasi, dan edukasi.³

Dengan pencanangan dan dimulainya Politik Etis pada tahun 1904, yang ditandai dengan pengangkatan J.B. van Heutz sebagai gubernur jendral Hindia Belanda (1904-1909), maka sejak itu pula program bidang edukasi tersebut dilaksanakan dengan penyebarluasan pendidikan dasar⁴. Dengan pendidikan yang ditujukan bagi rakyat pribumi ini nantinya akan menimbulkan dampak yang besar bagi rakyat pribumi Indonesia dengan lahirnya kaum cendekiawan/intelektual dan elit modern, yang nantinya menuntut status, hak dan kewajiban yang sama dengan orang Belanda, yang pada pelaksanaannya, baik bidang politik, ekonomi maupun pendidikan yang dilaksanakan juga masih berupa politik kolonial dan masyarakat masih dalam kondisi masyarakat kolonial.

³ *Ibid.*

⁴ G. Moedjanto. *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 11.

Masyarakat pribumi yang dikondisikan masih dalam alam kolonial ini berdasarkan anjuran Prof. C. Snouck Hurgronje (seorang penasihat), kepada Gubernur Jendral J.B. van Heutz, berdasar “Haluan Ethica”, dengan politik dan semboyan “unifikasi” Indonesia-Belanda dengan “asosiasi dan asimilasi”, yang artinya bangsa Indonesia di-Belanda-kan, sehingga ikatan Indonesia-Belanda dapat terjalin abadi.⁵ Hal ini mengisyaratkan bahwa bentuk-bentuk penyelenggaraan Politik Etis di dalamnya masih terdapat diskriminasi rasial atau *colour-line*, meskipun di bawah selubung politik kesejahteraan atau etik. Hal ini menyebabkan kaum elit modern dan cendekiawan lainnya melawan pihak pemerintahan Hindia Belanda demi mengakhiri penjajahan tersebut. Di kalangan elit modern dan cendekiawan itulah muncul dan berkembang paham baru; masyarakat merdeka. Dengan demikian lahir dan berkembanglah kesadaran nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kesadaran nasional itu dilakukan dengan memperjuangkan masyarakat yang merdeka dan sejahtera ini tentunya memperjuangkan masyarakat keluar dari kondisi tertindas tersebut.

Dari kondisi jaman seperti di atas, hidup seorang intelektual sejamannya, yaitu Kasimo. Kasimo lahir pada tanggal 10 April 1900 di kampung Mantrijeron, Yogyakarta, dari seorang ibu yang bernama Dalikem dan ayah yang bernama Ronosentiko sebagai prajurit Mantrijeron.⁶ Suatu hal yang

⁵ G. Moedjanto, *op.cit.* hlm. 23.

⁶ Tashadi, dkk., *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: Depdikbud. 1993. hlm. 156.

membuat Kasimo menjadi seorang terpelajar atau sebagai intelektual ialah karena diperolehnya kesempatan belajar di Sekolah Ongko Loro/Sekolah Rakyat Kelas Dua (*Tweede Inlandsche-school*) di Kampung Gading (di usia 8 tahun), Sekolah Guru (*Kweekschool*) Di Muntilan (di usia 12 tahun), dan Sekolah Pertanian Menengah (*Middelbare Landbouwschool / MLS*) di Bogor (di usia 18 tahun).

Sistem persekolahan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu secara politis mengelompokkan masyarakat ke dalam golongan-golongan dengan garis pemisah yang tajam. Tidak hanya antara masyarakat Eropa dan masyarakat pribumi saja melainkan pemerintah juga mendorong penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat pribumi sendiri. Bentuk-bentuk pengelompokkan itu, selain Kelas Ongko Loro yang diperuntukkan bagi pribumi sebagai sekolah rakyat, juga ada sekolah bumiputra Kelas Satu (*Eerste Inlandsche-school*) yang didirikan tahun 1907 dan kemudian di tahun 1914 diganti dengan nama *Hollands Inlandsche School* (HIS), yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari golongan masyarakat kelas atas seperti para bangsawan dan priyayi tinggi.⁷ Kriteria seorang anak memasuki HIS itu berdasarkan ketentuan pemerintah Hindia Belanda (Stbld. 1914 Nomor 359).⁸

Pada masa diskriminasi dan eksploitasi itulah Kasimo dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai anak kecil yang baru berusia 11-12 tahun, Kasimo belum

⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

⁸ Marwati Djoned Poesponegoro Nugroho Notosutanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Proyek ISDN, 1981/1983, hlm. 146.

menyadari akibat-akibat buruk yang disebabkan oleh sistem feodalisme yang belaku pada waktu itu, tetapi pengalaman pribadi yang dirasakannya dari situasi/keadaan feodal dan kolonial itu sangat menentukan kepribadian dan perjuangan hidupnya di kemudian hari. Pengalaman masa kecil ini antara lain menumbuhkan jiwa kerakyatan pada dirinya, yang mendorongnya untuk berjuang demi kepentingan rakyat kecil.⁹

Potensi dasar Kasimo yang tergolong cerdas termasuk dalam hal berhitung sejak masih bersekolah di Sekolah Ongko Loro. Kecerdasan itu didukung dengan pengetahuan ketika setelah memasuki bangku sekolah di jenjang lebih tinggi (di *Kweekschool* Muntilan) dengan segala keaktifannya dalam membaca buku-buku dari sastra (babad tentang epos), ekonomi dan sosial, dan agama, serta Majalah *Sworo Tomo* disertai aktivitas kelompok diskusi untuk mengasah intelektualitasnya dalam setiap analisa atau mengomentari suatu masalah, dan dengan ditambah juga oleh didikan Pater Frans Gregorius Josephus van Lith, S.Y., berupa penanaman nilai humanisme yang diinspirasi dalam ajaran Kristiani kepada Kasimo muda ini dalam pedagogi Jesuit yang menekankan jiwa humanioranya dengan sikap hidup berspiritualitaskan pada ajaran agamanya (Katolik) lewat “spiritualitas Ignatian”, yang menggiatkan jiwa/spiritualitas untuk “menemukan Tuhan dalam segala hal”,¹⁰ yang hal itu

⁹ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 159.

¹⁰ Anhar Gonggong, *Ignatius Loyola. Siapa Dia ?*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Tahun I, November 1998, hlm. 1-3.

diinspirasi dan dilaksanakan dalam “Latihan Rohani”¹¹ yaitu dengan suatu proses perenungan batin (refleksi) untuk menjadi peka dan terbuka akan tugas pelayanan Kristus kepada sesama, termasuk rakyat yang terpinggirkan, tereksploitasi/terjajah atas aktivitas kolonialis. Jiwa/spiritualitas yang humanis itu menginsafi serta membentuk karakter dan kepribadian pada diri Kasimo, sehingga dirinya menjadi seorang intelektual sebagai generasi nasionalis anak bangsa yang mampu merefleksikan kondisi masyarakatnya dan berusaha untuk memperjuangkannya ke arah masyarakat yang sejahtera.

Sifat humanis dan nasionalis dalam diri I.J. Kasimo ini dapat dilihat dalam motto/semangat hidupnya yang sangat mengutamakan kehidupan negara dan masyarakat, yaitu “*solus populi suprema lex*” (kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi) dan “*pro bono publico*” (demi kepentingan umum), yang merupakan asas, dorongan dan inspirasi bagi Kasimo untuk terjun dalam kancah perjuangan politik¹². Selain sifat nasionalis yang dimilikinya, I.J. Kasimo juga menjunjung kehidupan gereja dan tanah air dalam mottonya, yaitu “*pro ecclesia et patria*” (demi gereja dan tanah air), yang artinya sehubungan dengan perjuangannya, yaitu bahwa Gereja Katolik di Indonesia dapat melaksanakan tugas misionnnya dengan berhasil dalam negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹³

¹¹ Kelompok Studi Credo. “Sarekat Yesus”, dalam *Majalah Credo, Visi dan Tradisi Katolik*, Jakarta, April 1996, hlm. 30.

¹² Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980, hll. 174.

¹³ *Ibid.*

Dalam hal ini, I.J. Kasimo dalam perjuangannya sebagai anak bangsa, selain berperan dalam kehidupan bernegara juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara, berdasarkan semboyan "*salus populi suprema lex*" dan "*pro bono publico*", I.J. Kasimo mendasarkan pada asas negara hukum, yang bagi dirinya hukum yang berlaku harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan.¹⁴ Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, I.J. Kasimo mendasarkan pada asas subsidiaritas. Bagi I.J. Kasimo, kesatuan-kesatuan sosial yang terkecil pun mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha masyarakat. Hak dan kewajiban yang dikonstruksikan oleh I.J. Kasimo ini diwujudkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga sosial karitatif dan sebagainya.¹⁵

Sifat-sifat nasionalis dan kerakyatan pada diri I.J. Kasimo di atas, kemudian diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, mulai dari kehidupan politik dan pemerintahan, dengan mendirikan partai politik (PPKD pada bulan Agustus 1923) hingga kemudian menjabat beberapa badan pemerintahan, baik itu ketika masa Pemerintahan Hindia Belanda dengan menjabat sebagai *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang kemudian memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan RI dengan diplomasi dengan Belanda (bulan April 1947 mengenai penyerahan kedaulatan RI dan bulan Agustus 1960 mengenai penyerahan Irian Barat); maupun ketika negara RI terbentuk dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

menjabat sebagai menteri dan anggota di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, seperti KNIP (di tahun 1945), DPAS (di tahun 1968) pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, serta menjabat sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 1967 pada masa orde baru.

Dalam kementrian pada Kabinet Amir I (3 Juli 1947-11 November 1947), Kabinet Amir II (11 November 1947-29 Januari 1948), dan Kabinet Hatta I (29 Januari 1948-1949) selain menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan Menteri Peresediaan Makanan Rakyat, I.J. Kasimo juga mengeluarkan suatu program, yaitu *Kasimo Plan*, yaitu rencana produksi tiga tahun (1948-1950) berupa swasembada pangan, antara lain dengan intensifikasi pertanian dan pengembangan ternak dengan bibit unggul. *Kasimo Plan* ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas kesukaran ekonomi yang dihadapi Indonesia pada situasi tekanan revolusi fisik (agresi I 1947).¹⁶

Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, I.J. Kasimo berperanan mulai dari bidang pertanian/perkebunan rakyat, pendidikan, ekonomi swasta, perbankan, sosial-budaya hingga keagamaan/kegerejaan. Dalam bidang pertanian dan perkebunan, I.J. Kasimo berperan melindungi petani dari Pemerintah Hindia Belanda dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun sistem baru yaitu sistem kontrak dan meninggalkan sistem sewa tanah. Penyejahteraan oleh I.J. Kasimo kepada petani tebu dalam sistem kontrak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181-182.

ini menyebabkan dirinya dikenal sebagai “Bapak Tebu Rakyat”. Dalam bidang pendidikan, I.J. Kasimo berperan sebagai pengajar atau guru pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Sekolah Rakyat (di Sekolah Pertanian Rendah Tegaldono); pengkader kaum muda Katolik Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah di bawah naungan AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia) pada tahun 1945 dan Yayasan Kasimo pada tahun 1973; serta ikut mendirikan institusi pendidikan tinggi swasta yaitu Universitas Atma Jaya pada tahun 1960-an.

Dalam bidang ekonomi swasta dan perbankan, I.J. Kasimo berperan sebagai Presiden Direktur Bank Perkembangan Ekonomi di Jakarta pada tahun 1960-an; Dalam bidang sosial yang menyangkut jaminan kesejahteraan masyarakat, I.J. Kasimo mendirikan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Ramayana pada tahun 1960-an. Dalam bidang budaya, I.J. Kasimo berperan dalam usaha pengembangan budaya dan informasi pada masyarakat melalui pengembangan media massa, antara lain: mendirikan Majalah “Intisari” pada tahun 1963, Surat Kabar “Kompas” pada tahun 1965, dan lembaga penerbitan/percetakan buku PT Gramedia pada tahun 1970.¹⁷ Dalam kehidupan menggereja, I.J. Kasimo menerapkan ajaran sosial gereja di tengah masyarakat, baik itu dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, dan pelayanan karitatif lainnya.

¹⁷ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm, 179.

B. Permasalahan

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, yaitu topik mengenai “Peran I.J. Kasimo dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973”, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahannya sebagai berikut:

1. Siapa I.J. Kasimo dan bagaimana latar belakang kehidupannya ?
2. Apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973 ?
3. Apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973 ?

C. Tujuan Penulisan

Untuk menjelaskan secara historis beberapa hal yang menyangkut permasalahan di atas, maka dapat penulis sebutkan beberapa tujuannya, yakni untuk:

1. Mendeskripsikan siapa I.J. Kasimo dan bagaimana latar belakang kehidupannya.
2. Mendeskripsikan apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973.
3. Mendeskripsikan apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973.

D. Manfaat Penulisan

Dalam menyusun penulisan sejarah ini, penulis memiliki beberapa harapan yang nantinya dapat berguna baik bagi pembaca, maupun penulis sendiri, yang diantaranya sebagai berikut:

- **Bagi pembaca:**

1. Secara umum, penulisan ini untuk memberikan khasanah pengetahuan bagi pembaca tentang sejarah perjuangan seorang tokoh dengan beberapa usaha dan peranannya di Indonesia pada masanya dan masa-masa berikutnya.
2. Secara khusus, bagi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, penulisan ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya ilmiah tentang objek studi sejarah.

- **Bagi Penulis:**

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru bagi penulis mengenai seorang tokoh nasionalis Indonesia.
2. Berkenaan dengan bidang studi yang diampu penulis sendiri (sebagai mahasiswa Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma) dan alternatif bidang kerja sebagai guru mata pelajaran Sejarah, penulisan ini diharapkan memberi sarana pengajaran kepada anak didik dalam praktek mendidik nantinya untuk memberikan bahan ensiklopedi tentang tokoh nasionalisme yang ada di Indonesia dengan beberapa jasa dan peranannya.

E. Landasan Teori

Penulisan sejarah yang menyangkut peranan seorang tokoh, tentunya perlu juga menuliskan sekelumit tentang biografi kehidupan dari seorang tokoh itu sendiri. Salah satu penulisan tentang peranan seorang tokoh yang pernah ditulis dapat diambil dari contoh penulisan biografi dalam bentuk skripsi yang pernah ditulis oleh Sr. Henricia CB. dengan judul “Peranan Monsigneur Albertus Soegiyopranata S.J. Dalam Rangka Usaha Membina Kehidupan Gereja di Vikariat Apostulik Semarang Antara 1950-1960”, yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Keguruan dalam Ilmu Sejarah di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 1973.

Berkaitan dengan judul skripsi “Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973” ini ada beberapa konsep yang perlu pahami terlebih dahulu dalam penjelasan berikut:

1. Peran

Menurut Peter Salim dan Yeni Salim, definisi “peran” adalah bagian dari tugas utama yang dilakukan.¹⁸ “Peran” juga berarti fungsi sesuatu dalam kehidupan, faktor manusia penting dalam pembangunan.¹⁹

Maka yang dimaksud peran dalam penulisan ini mengacu pada peran atau tugas yang dilakukan oleh I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara dan

¹⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 1133.

¹⁹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, jilid II, Departemen Jakarta: Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 1579.

bermasyarakat di Indonesia 1921-1973. I.J. Kasimo sebagai politisi menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Di samping itu, I.J. Kasimo sebagai anggota masyarakat dan tokoh awam Katolik juga menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja.

2. Bernegara

- a) Menurut Mariam Budiardjo, dalam kehidupan bernegara itu, meliputi pada tugas-tugas dari seseorang yang terlibat dalam urusan kenegaraan, yaitu: a) kehidupan seseorang/dirinya dalam mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan; 2) kehidupan seseorang/dirinya dalam mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.²⁰
- b) Menurut P.J. Suwarno, kehidupan bernegara ialah hal yang mengenai/menyangkut tentang negara ialah unsur-unsur negara itu, yaitu wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya pemerintahan negara terdiri dari lembaga-lembaga negara berhubungan satu sama lain sehingga bersama-sama mewujudkan sistem pemerintahan yang mewujudkan norma hukum.²¹ Maka kehidupan bernegara menurutnya,

²⁰ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980. hlm. 39.

²¹ P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 133.

meliputi kewagranegaraannya (partisipasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara), usaha mempertahankan wilayahnya (masalah kedaulatan), mengatur pemerintahan berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan pemerintahan itu juga kehidupan dalam lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPA, dan Menteri dalam suatu kepresidenan.

Pedoman kehidupan bernegara itu di dasarkan pada beberapa hal mengenai lembaga-lembaga kenegaraan dan segala orientasi kehidupannya dengan usaha berpartisipasi dalam hal yang menyangkut civilization/kerakyatan dan tentunya berpartisipasi dalam kehidupan politik, karena orang/seorang yang terlibat dalam urusan kenegaraan, orang tersebut juga terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa kehidupan bernegara menyangkut juga dengan politik dan pemerintahan.

Politik sendiri berarti pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (menurut Joyce Mitchel).²² Sedangkan kebijakan umum (*publik policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.²³ Maka di sini negara sebagai organisasi politik juga menentukan kebijakan yang mengarah pada tujuan yang diharapkan.

²² Mariam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. : 1.

²³ *Ibid.*

Dalam penyelenggaraan negara pemegang kekuasaan dalam hal berpolitik dalam suatu negara ialah pemerintah (*government*). Hal itu dikarenakan juga bahwa syarat atau unsur terbentuknya negara ialah adanya suatu pemerintahan, di samping terdapat wilayah, penduduk dan kedaulatan. Pemerintah sendiri berarti suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.²⁴ Dalam hal ini pemerintah dalam suatu pemerintahan memiliki kuasa (politik) untuk bertindak dalam hal pembuat dan pelaksana keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan negara. Hal itu juga sesuai dengan pernyataan Robert M. MacIver, bahwa negara diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ketertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang berlaku.²⁵

Berdasarkan uraian konsep negara, politik dan pemerintahan di atas dapat direlevansikan bahwa kehidupan bernegara dapat disebutkan atau diartikan juga perikehidupan dengan segala keterlibatan, pengaruh serta peranannya dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Berdasarkan pada uraian pendahuluan dijelaskan bahwa I.J. Kasimo berperanan atau berkiprah dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia dari tahun 1921-1973, selanjutnya perlu diuraikan juga secara khusus mengenai sistem politik dan pemerintahan di Indonesia termasuk sistem kepartaiannya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Melihat ruang lingkup antara tahun 1921-an sampai terbentuknya sebuah negara RI, tentu tidak sama mengenai sistem politik dan sistem pemerintahan di dalam perjalanan waktunya, karena memang dalam melakukan usaha kekuasaan dan tujuan yang dicapai dalam suatu pemerintahan juga berbeda dalam tataran politiknya. Pada awal abad ke-20, sistem politik dan pemerintahan yang pada waktu itu dikuasai oleh pihak kolonis Hindia Belanda berbeda dengan sistem politik dan pemerintahan setelah dikuasai kolonis Jepang, begitu pula sistem politik dan pemerintahan pada waktu Indonesia berdiri sebagai nation state, yang tentu saja memiliki sistem politik dan pemerintahan sendiri.

Untuk melihat konsep dari sistem politik dan pemerintahan, yang pernah terjadi di Indonesia termasuk sistem kepartaiannya, maka perlu dibahas terlebih dahulu sistem politik dan pemerintahan secara harafiah baru kemudian sistem politik dan pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk partai politik di pemerintahan di Indonesia.

a) Definisi sistem politik dan pemerintahan

Menurut David Easton, sistem politik adalah “keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif”.²⁶ Sistem politik di sini dapat diartikan bahwa pola-pola interaksi dalam kehidupan politik

²⁶ *Ibid.*

melibatkan kekuasaan dan kewenangan, sedangkan apa yang diputuskan melalui proses politik mempunyai kekuatan mengikat (otoritatif).²⁷

Unsur utama sistem politik ialah pemerintah yang diberikan kewenangan yang secara otoritatif dengan penggunaan paksaan fisik sesuai undang-undang dalam melaksanakan jalannya pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang diharapkan. Yang dimaksud pemerintahan (government) ialah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dan pemerintahan disini memiliki suatu perbedaan yaitu pemerintahan lebih menyangkut tugas dan kewenangan sedangkan pemerintah lebih mengarah pada aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan itu.²⁸

b) Pemerintahan kolonial dan pemerintahan berdaulat

- 1) Pemerintahan kolonial (*colonial government*), adalah pemerintahan yang dibangun di bawah inspirasi filsafat “merkantilisme”; filsafat ini tercermin dalam pemerintahan wilayah-wilayah yang diduduki di mana mula-mula pemerintahan oleh negara asing kemudian diambil oleh perwakilan negara asing itu (baik sipil maupun militer) yang memiliki kekuasaan penuh yang merancang pemerintahan itu “untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya” bagi pemerintahan negeri induk.²⁹ Contoh pemerintahan

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992, hlm. 167.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jahja Muhaimin, dkk., *Kamus Istilah Politik*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1985, hlm. 190.

kolonial ialah) Pemerintahan Hindia Belanda (sipil) dan pemerintahan Jepang (militer).

- 2) Pemerintahan berdaulat (*sovereign government*), adalah sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk mempertahankan konstituitas nasional (berlangsung secara nasional) yang otonom dan untuk kepentingan itu digunakan suatu monopoli kekuasaan pemaksa, jika kekuasaan itu sah (hak yang dianggap "suci"/absah untuk menggunakan kekuasaan atas nama kelompok-kelompok lain dalam hal pembuatan keputusan), maka pemerintahan adalah sekelompok orang yang menggunakan wewenang yang sah dan melindungi serta mempertahankan komunitas itu dengan pembuatan dan pelaksanaan keputusan, misalnya pemerintahan RI, Pemerintahan Amerika Serikat dan Pemerintahan Inggris Raya.³⁰

c) Pemerintahan yang pernah ada di Indonesia

1) Pemerintahan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan Hindia Belanda ialah pemerintahan kolonial yang terwujud dalam usaha penanaman kekuasaannya dari negeri induk (Belanda) dengan membentuk institusi perwakilan sipil di Indonesia (Pemerintahan Hindia Belanda). Usaha penanaman kekuasaan itu dapat dilihat pada salah satu tindakan yang jelas ialah dengan dikeluarkannya peraturan perundang-

³⁰ *Ibid.*

undangan yang rasional, yang didasarkan pada *Grondwet* pada tahun 1922, dengan dilalui beberapa kali perubahan tahun-tahun sebelumnya³¹, bahwa di sana terdapat peraturan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia sejak tahun 1854 (*Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indie*) diganti dengan undang-undang yaitu: *Wet op de Staats inrichting van Nederlandsch-Indie* yang selanjutnya disebut *Indische staatsregeling* atau IS yang teksnya diumumkan dalam S.1925 No. 447.³²

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sebagai berikut: Gubernur Jendral didampingi oleh Dewan India sebagai dewan penasihat; para direktur yang membantu Gubernur Jendral untuk memimpin departemen-departemen; dan *Volksraad* (dewan rakyat) yang dibentuk tahun 1917. Gubernur Jendral diangkat oleh Ratu atas pencalonan dari Dewan menteri untuk waktu yang tidak ditentukan (pasal 2 ayat 2 IS), tetapi biasanya setelah 5 tahun Gubernur Jendral meletakkan jabatan.³³

2) Pemerintahan pada masa pendudukan Jepang

Pemerintahan Jepang pada Indonesia juga berupa pemerintahan kolonial, di mana Jepang melakukan pendudukan dan penguasaan di Indonesia dengan institusi militernya. Hal itu dilatarbelakangi pada situasi perang Dunia II yang

³¹ P.J. Suwarno, *Sejarah Birokrasi Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 37-38.

³² B.P. Paulus, *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 31.

³³ *Ibid.*

meletus pada tanggal 1 September 1939, yang menjadikan situasi keamanan negeri Jepang tidak baik, termasuk ancamannya di kawasan Asia Pasifik, sehingga kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan pemerintah Jepang setelah berhasil menanamkan pengaruhnya pada daerah koloni, khususnya Indonesia ialah stabilisasi dan eksploitasi barang-barang ekonomi lewat pemerintahan militer atau di sebut *Gun Sei Bu* (Pemerintahan Balatentara Dai Nippon) pada tanggal 1 Agustus 1942 yang disahkan oleh pemerintah Jepang dalam Undang-Undang No.27 dalam *Kan Po* No.1 Tahun ke-1 Boelan 8-2602, hal. 7-8.³⁴

3) Pemerintahan pada masa kemerdekaan dan kedaulatan RI

Setelah dicapainya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka terbentuklah sebuah negara yang dilegitimasikan dengan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sebuah negara yang dibuat sehari setelah proklamasinya (18 Agustus 1945). UUD 1945 ini merupakan landasan konstitusional dari pembentukan negara RI karena di dalam pembukaannya (preamble) terdapat latar belakang pembentukan negara (alinea 1), dasar-dasar negara (rumusan Pancasila) hingga tujuan-tujuan negara RI sendiri (alinea 4). Untuk melihat sistem politik dan sistem pemerintahan, serta sistem kepartaiannya di Indonesia pada masa kemerdekaan dan kedaulatan, maka perlu melihat hukum dasarnya.

³⁴ P.J. Suwamo, *Sejarah Birokrasi Indonesia Dahulu dan Sekarang*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989. hlm. 87.

Ketentuan pokok mengenai sistem politik RI yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:³⁵

- (a) Bentuk pemerintahan RI ialah adalah Republik. Dengan demikian kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR ini bersidang sekali dalam masa tugasnya, yaitu untuk menetapkan presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- (b) Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensiil. Dengan demikian, presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penerima mandat dari MPR, maka presiden bertanggung jawab langsung kepada MPR. Tugas penting presiden adalah melaksanakan kehendak rakyat yang terwujud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR untuk kurun waktu lima tahun.
- (c) Dalam mekanisme pemerintahan RI, terdapat lembaga legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Secara operasional, dapat disebutkan sebagai berikut:
 - (1) Fungsi lembaga legeslatif dan pengawasan dilaksanakan oleh DPR. Badan ini bersama-sama dengan presiden (sebagai lembaga eksekutif) bertugas merumuskan Undang-Undang. Di samping itu, DPR, yang

³⁵ Zulkifli Hamid (ed), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 518-519.

bertugas mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan, apakah telah sesuai dengan GBHN yang ditetapkan oleh MPR.

- (2) Fungsi eksekutif ialah presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pererima mandat dari MPR dan menjalankan GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR.
- (3) Fungsi lembaga yudikatif dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung yaitu suatu lembaga hukum tingkat tinggi negara.
- (4) Bentuk negara RI ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena Indonesia merupakan suatu negara kepulauan. Pengaturan daerah dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa daerah yang disebut provinsi, selanjutnya setiap provinsi dibagi lagi secara bertingkat menjadi daerah yang lebih kecil (kota madya, kabupaten). Penetapan pembagian wilayah ini secara rinci dilakukan melalui Undang-Undang dan peraturan daerah. Peraturan daerah dilaksanakan dengan model desentralisasi, dalam arti daerah diberikan otonomi daerah dalam batas-batas tertentu. Penanganan otonomi ini diatur oleh suatu Badan Perwakilan Daerah.

Meskipun tetap memakai dasar konstitusi negara yaitu UUD 1945, namun dalam perjalanan pemerintahannya, RI mengalami perubahan

bentuk pemerintahan. Menurut Drs. M. Rusli Karim,³⁶ perubahan pemerintahan RI dalam kurun waktu 1945-1973 terbagi dalam 3 bagian masa/periode, yaitu: 1) Periode Kepresiden Sukarno pada masa Demokrasi Liberal antara tahun 1945-1950 (dilihat dengan berpengaruhnya parlementer dan banyaknya partai); 2) Periode Kepresidenan Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) antara tahun 1955-1966 (dengan kepemimpinan tunggal Sukarno dan fungsi konstituante dipegangnya, meskipun masih terdapat multi partai karena alasan pertimbangan politik) dan; 3) periode Kepresidenan Suharto (Masa Orde Baru) antara tahun (1973-1998).

d) Partai Politik.

1) Definisi Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil.³⁷

Menurut R.H. Soltau, partai politik adalah kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik

³⁶ Rusli Karim, *Perjalanan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 17.

³⁷ Mariani Budiardjo, *loc.cit.*, hlm. 160

dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.³⁸

Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berkuasa untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda.³⁹

Maka, secara umum partai politik dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

- 2) Fungsi partai politik, secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut:⁴⁰
 - (a) Sosialisasi politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.
 - (b) Rekrutmen politik, yaitu seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan khususnya.
 - (c) Partisipasi politik, yaitu suatu kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm. 116-121



- (d) Pemandu kepentingan, yaitu parpol berfungsi menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
- (e) Komunikasi politik, yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya.
- (f) Pengendalian politik, yaitu parpol berfungsi untuk mengendalikan konflik, melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik dan berusaha menyelesaikannya dalam bentuk keputusan politik.
- (g) Kontrol politik, ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

3) Partai Politik di Indonesia

Kehidupan yang menyangkut sistem politik dan pemerintahan di Indonesia bila diperiodisasikan dalam kurun waktu awal abad ke-20 sampai tahun 1973 dapat disebutkan yaitu politik pada masa penguasaan Pemerintahan Hindia Belanda, politik pada masa pendudukan Jepang, dan politik pada masa kemerdekaan dan pemerintahan berdaulat RI. Namun untuk memilah periodisasi partai politik di Indonesia dapat disebutkan menurut Dr. Daniel Dhakidae,⁴¹ sebagai berikut, yaitu periode I (1905-1945), yaitu periode/era

⁴¹ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia*, Jakarta: Litbang Kompas, 1999, hlm. xii.

tumbuhnya kesadaran berpolitik tumbuhnya kesadaran berpolitik diawali dengan pendirian Partai Syariat Islam Indonesia yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam. Periode ini merandai awal kepartaian di Indonesia. Periode ini diakhiri dengan jaman penjajahan Jepang yang melarang keberadaan partai-partai; periode II (1945-1955); yaitu periode berkembangnya partai-partai, dengan bentuk multi partai dengan ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Presiden 3 November 1945, yang menganjurkan untuk mendirikan partai-partai; dan periode III (1955-1973), yaitu periode menyusutnya jumlah partai menuju kekuatan tunggal (baik itu jaman demokrasi terpimpin, maupun orde baru).

Setelah Indonesia merdeka terbentuklah beberapa sistem kepartaian di Indonesia yaitu sistem kepartaian yang multipartai (banyak partai) yang terjadi selama Orde Lama (pemerintahan Sukarno) dan sistem kepartaian multipartai terbatas (masa Orde Baru atau pemerintahan Suharto). Pada masa Orde Lama dikatakan multi partai karena sejak dikeluarkannya Maklumat Presiden 3 November 1945 berbagai partai bermunculan dengan jumlah partai yang terbilang besar mengenai komposisi/jumlah kepartaiannya. Sedangkan pada masa Orde Baru dikatakan multipartai terbatas karena sistem kepartaiannya berjumlah lebih dari 2 macam partai atau berjumlah 3 partai secara terbatas yaitu terbatas pada 2 partai politik (parpol), yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dan 1 golongan keormasan (organisasi kemasyarakatan), yakni golongan karya.

Sistem kepartaian pada masa orde baru sendiri dibentuk pada tanggal 5 Juli 1966, berdasarkan Tap MPRS No. 22 Tahun 1966, yang isinya: Pemerintah bersama-sama DPR segera membuat Undang-Undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju penyederhanaan. Ketetapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1973, di mana secara resmi Indonesia hanya ada 3 buah partai politik saja, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak saat itu pula Partai Katolik diintegrasikan dalam tubuh PDI.⁴²

3. Bermasyarakat

a. Definisi Bermasyarakat

Definisi hidup bermasyarakat menurut Dr. P.J. Suwarno ialah hidup bersama. Kehidupan bersama ini dapat dilihat dari beberapa segi, segi ekonomi, menampakkan kegiatan berproduksi, pembagian dan penggunaan barang dan jasa, segi agama, dan sebagainya. Dalam kehidupan bersama itu selalu nampak unsur-unsur sosial yang menjadi objek studi sosiologi, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan sosial. Unsur unsur itu terjalin menjadi satu sama lain, dan keseluruhannya disebut struktur sosial. Pengaruh timbal balik antara segi-segi kehidupan tersebut disebut proses sosial. Jadi dalam sosiologi sebenarnya berusaha dijelaskan struktur dan proses sosial itu.⁴³

⁴² Y. Heri Siswanto, "I.J. Kasimo dan Partai Katolik", dalam Majalah *Driyarkara*, Jakarta: Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyarkara, 1996, hlm. 35.

⁴³ P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 133; Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Serangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1964, hlm. 14.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa hidup bermasyarakat mencakup beberapa segi/aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik dan agama dalam lingkup masyarakat. Maka dalam hal ini dapat disebutkan bahwa I.J. Kasimo berperan dalam kehidupan bermasyarakat mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agama (Katolik atau Gereja, khususnya) dalam masyarakat.

Peranan politik dalam kehidupan bermasyarakat di sini lebih berlingkup kecil yaitu komunitas masyarakat tertentu dan dengan lokalitas tertentu (misalnya masyarakat Jawa atau Surakarta), bukan politik secara luas yaitu negara, yang secara teritorial lebih makro atau bersifat nasional. Segi ekonomi, sosial-budaya, dalam konteks bermasyarakat, misalnya perusahaan swasta, pendidikan dan informasi (kejournalistikan/pers) dapat dimasukkan dalam segi kemasyarakatan atau termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, bila tidak begitu mengacu pada kepentingan nasional atau dapat dikatakan lebih pada kepentingan swasta (dalam lingkungan komunitas tertentu), seperti: perusahaan asuransi swasta, penerbitan suatu media massa swasta, peresmian/pendirian suatu yayasan atau institusi pendidikan swasta (universitas swasta). Dalam segi agama, kehidupan bermasyarakat itu dikhususkan mengenai peranannya dalam Gereja Katolik, karena aspek keagamaan yang melingkupi dalam hidup I.J. Kasimo ialah agama Katolik.

Peran I.J. Kasimo dalam hidup bermasyarakat ini sesuai dengan ideologi dan cita-citanya yaitu selain dalam mottonya: "*salus populi suprema lex*" (kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi) yang tidak hanya terbatas

dalam wawasan bernegara tetapi masyarakat umum lainnya; juga mendasarkan pada asas subsidiaritas, yang diartikan bahwa kesatuan-kesatuan sosial yang terkecilpun mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha masyarakat. Hak dan kewajiban yang dikontribusikan oleh I.J. Kasimo ini nantinya diwujudkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kariatif, rumah sakit dan sebagainya.⁴⁴ Sedangkan peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat pada segi agama (bagi gereja) ialah terlihat dalam mottonya yang menjunjung kehidupan gereja dan tanah air, yaitu "*pro ecclesia et patria*" (untuk gereja dan tanah air), yang artinya sehubungan dengan perjuangannya, yaitu bahwa Gereja Katolik di Indonesia dapat terlaksana tugas misionnnya dengan berhasil dalam negara Indonesia yang berdaulat.⁴⁵

Karena peranan I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat juga mencakup aspek Agama Katolik atau berperanan bagi Gereja Katolik. Maka perlu dibahas konsep Gereja Katolik itu sendiri. Di samping itu, perlu juga dibahas konsep panggilan hidup Kristiani pada diri I.J. Kasimo sehingga dirinya berkehendak sesuai dengan ajaran yang dihayatinya (pada latar belakang pendidikan Kristiani).

Kehidupan bermasyarakat dalam aspek agama atau Gereja Katolik Peran I.J. Kasimo dalam kegerejaan ini ialah segala partisipasi dalam komunitas

⁴⁴ Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo dan Perjuangannya*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 175.

⁴⁵ *Ibid.*

Gereja Katolik. Usaha "*pro ecclesia et patria*" (untuk gereja dan tanah air) dari I.J. Kasimo ini terlihat dalam keyakinannya bahwa hanya dalam negara Indonesia yang berdaulat dan bangsa yang merdeka, umat dan Katolik dapat berkembang dengan aman dan baik dan gereja dapat melaksanakan tugas manusiawinya dengan tenang dan tentram.⁴⁶

F. Kajian Pustaka

Sumber utama yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan sumber primer dan juga didukung sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian seseorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain, atau orang yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan saksi pandangan mata sendiri, yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.⁴⁷ Contoh sumber primer ialah catatan rapat, daftar anggota organisasi, arsip-arsip laporan (manuskrip), dan hasil wawancara langsung dari wartawan atau seseroang yang melakukan penelitian (oleh Lithang) pada suatu obek penelitian. Sedangkan contoh sumber sekunder ialah buku-buku yang disusun bukan dari saksi mata tetapi dari referensi beberapa sumber primer.⁴⁸

Adapun sumber-sumber primer itu dalam bahasan ini antara lain adalah:

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Ilmu Sejarah* (terj), Jakarta: UI Press., 1986, hlm. 35

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995, hal. 94-95.

Buku berjudul *Peringatan Perdjoangan Politik Katholik Indonesia*. Buku ini ditulis oleh I.J. Kasimo sendiri sebagai ketua panitia yang berisi refleksi perjuangan PKR (pada ulang tahun ke-4 PKRI), sejak Partai Katolik berberntuk PPKD sampai PKRI. Terdapat krtitik dan masukan dalam buku ini yang dituliskan oleh beberapa tokoh yang memberikan sambutan dalam peringatan PKRI yang ke-4 tahun. Terdapat anggaran dasar dan keterangan asas, dan program PKRI yang dituliskan secara asli oleh I.J. Kasimo sebagai penulis dengan mata kepala sendiri, dengan ejaan yang belum disempurnakan dan warna/jenis kertas yang pudar dan tipis.

Buku berjudul *Dasar-Dasar Perdjoangan PKRI-AMKRI dan Dasar-Dasar Perdjoangan Kami*, diterbitkan oleh Canisius, Jogjakarta, tahun 1948. Buku ini ditulis oleh I.J. Kasimo. Di dalam isinya, buku ini menuliskan mulai dari alasan Perjuangan PKRI-AMKRI oleh pernyataan/statement I.J. Kasimo sendiri, hingga upaya dan strategi yang dilakukan di dalamnya. Upaya itu selain dalam bernegara dengan mengetengahkan hak dan kewajiban hidup bernegara maupun sosial ekonomi, juga dengan mengetengahkan perjuangan pemuda/kepemudaan RI dalam AMKRI.

Artikel yang ditulis I.J. Kasimo dalam Surat Kabar *Suara Katolik* No.4. Tahun 4, Tahun 1953, Jakarta, dengan judul "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia 1923-1953". Dalam artikel ini merupakan sumber primer karena I.J. Kasimo sendiri mengulas dan menjelaskan sekaligus merefleksikan beberapa

gerakan/aksi politik Katolik di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu antara tahun 1923-1953.

Artikel yang ditulis dalam Majalah *Warta Partai Katolik*, Edisi Khusus Pemilu 1971, Jakarta, dengan judul "Maka Lahirlah Dia: Partai Katolik". Artikel ini ditulis oleh I.J. Kasimo yang mengetengahkan lahir dan berdirinya Partai Katolik Indonesia. Di dalam artikel ini, terdapat statement/ Pernyataan I.J. Kasimo dalam mendirikan Partai Katolik Indonesia.

Sedangkan sumber-sumber pendukung (sebagai sumber sekunder) lainnya antara lain:

Majalah *Solidaritas*, Diterbitkan oleh Yayasan Kasimo, Jakarta, oleh Tim Redaksi dan Pengurus Yayasan, yaitu Drs. Ben Ben Mang Reng Say (sebagai ketua yayasan) dan F.S. Wignyosumarsono (sebagai sekretaris yayasan). Dalam majalan bulanan ini menuliskan program dan kegiatan organisasi Katolik dalam bentuk Yayasan yang terlepas dari politik praktis karena dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXII Tahun 1966 yang menyebabkan Partai Katolik berfusi dalam PDI. Di dalam majalah ini, mengulas beberapa keterlibatan dan peran Kasimo dan para penerusnya yang bernaung dalam Yayasan Kasimo, meliputi peran dan kegiatan baik itu dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.

Buku berjudul *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, buku ini disusun oleh Tim Wartawan Kompas, terbitan P.T. Gramedia, Jakarta, tahun 1980. Buku ini berisi tentang kehidupan I.J. Kasimo secara umum, mulai dari kecil,

muda hingga dewasa yang kemudian berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Pengkisahan I.J. Kasimo dalam hidup dan perjuangannya ini telah dilakukan usaha penginterpretasian oleh Tim Wartawan Kompas sehingga buku/sumber ini dapat disebut sebagai sumber sekunder. Tim Wartawan Kompas juga merekonstruksi dari beberapa saksi sejarah baik I.J. Kasimo dan orang-orang terdekatnya.

Buku berjudul *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, yang disusun oleh Tashadi, dkk. diterbitkan oleh Depdikbud, Jakarta 1993. Buku ini berisikan 3 tokoh pemikir paham kebangsaan, yaitu Moh Hatta, HOS. Tjokroaminoto dan I.J. Kasimo. Dalam bagian pembahasan tentang I.J. Kasimo, dituliskan beberapa hal yang isinya diambil dari buku I.J. Kasimo *Hidup dan Perjuangannya* oleh Tim Wartawan Kompas di atas.

Sedangkan sumber tertierinya (sumber yang memberikan pelengkap pembahasan tetapi tidak menyinggung secara langsung pada topik) ialah sebagai berikut:

Buku berjudul *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid 4, yang ditulis oleh Dr. M.P.M. Muskens, Pr., diterbitkan oleh Dokpen MAWI (Dokumentasi Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, Jakarta, 1973. Buku ini berisikan beberapa data orang-orang Katolik dalam lembaga-lembaga tertinggi Republik Indonesia 1945-1973, dan bahasan keterlibatan, usaha, dan perjuangan umat Katolik pada bidang politik.

Buku berjudul *Susunan dan Program Kabinet RI 1945-1970*, oleh Deppen (Departemen Penerangan), terbitan Pradnja Paramita, Djakarta, 1970. Buku ini berisikan data susunan kabinet dari masa ke masa dari tahun 1945-1970, beserta program kabinet. Data ini dapat memberikan gambaran di kabinet mana saja dan kapan saja I.J. Kasimo duduk dalam kabinet dan apa saja program kabinet ketika ia menjabat.

Buku berjudul *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, oleh Daniel Dhakidae, dalam artikel Prisma terbitan LP3ES, Jakarta, 1985. Dalam buku ini Daniel Dhakidae menuliskan Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia secara umum dan terdapat analisa pencarian jumlah partai, dan membahas kerangka teortitis sistem kepartaian di Indonesia.

Buku berjudul *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*, oleh P.J. Suwarno, terbitan Andi Offset, Yogyakarta, 1989. Buku ini selain membahas birokrasi pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, juga menuliskan beberapa ketetapan konstitusi, UU, Tap MPR, dan sebagainya yang memberikan sumber dukungan penulisan ini, yaitu bahwa berdasarkan sistem birokrasi dengan berdasarkan konstitusi yang disebutkan dalam buku ini dapat mengarahkan pada beberapa bagian kehidupan bernegara di Indonesia.

Buku berjudul: *Indonesia Abad ke-20 jilid 1 (dari Kebangkitan Nasional sampai Perundingan Linggajati)*, terbitan Kanisius, Yogyakarta, 1988 dan buku tentang: *Dari Pembentukan Pax Nerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, terbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2003, yang

keduanya ditulis oleh Drs. G. Moedjanto. Pada jilid 1, Drs. G. Moedjanto menuliskan secara periodisasi beberapa hal mengenai latar belakang historis Indonesia pada abad ke 20, dari munculnya nasionalisme (kebangkitan nasional), kemerdekaan, hingga perundingan Linggajati; sedangkan pada jilid 2, ia menuliskan secara periodisasi perkembangan Indonesia Modern dari masa Perang Kemerdekaan Pertama hingga Pelita III.

Buku berjudul *Sejarah Indonesia Modern*, oleh M.C. Ricklefs, terbitan Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998. Dalam buku ini, M.C Ricklefs secara sistematis menuliskan perkembangan Indonesia modern mulai dari masa kedatangan Islam (tahun 1300-an), kedatangan Barat (tahun 1500-an), Politik Etis dan kebangkitan nasional (1900-1927), kedatangan Jepang (1942-1945), masa revolusi 1945-1950, masa demokrasi terpimpin (1956-1965), dan masa Orde Baru.

G. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti data terkumpul.⁴⁹ Dengan adanya rumusan jawaban sementara ini dapat memberikan langkah penelitian dan pengujian secara lebih terarah. Karena dengan jawaban sementara ini suatu penelitian yang merupakan pedoman bagi peneliti, nantinya dapat secara terarah dalam menerapkan langkah-langkahnya dan pengujiannya dalam sebuah

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 62.

penelitian. Untuk itu penulisan skripsi tentang “Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973”, dapat disebutkan jawaban semantarnya sebagai berikut:

1. Hipotesis I

Jika I.J. Kasimo telah mendapat pendidikan dari sekolah Belanda, maka ia memiliki motivasi untuk mengupayakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur melalui beberapa peran yang dilakukannya.

2. Hipotesis II:

Jika I.J. Kasimo telah mengenyam pendidikan, maka terbukalah wawasan kebangsaan (nasionalisme) I.J. Kasimo sehingga ia tergerak untuk mewujudkan peranannya dalam kehidupan bernegara melalui kiprahnya dalam partai politik (Partai Katolik Indonesia) dan beberapa lembaga negara (Komite Nasional Indonesia Pusat, DPR-RIS, DPA, dan Menteri)

3. Hipotesis III:

Jika I.J. Kasimo memiliki kepekaan sosial yang dipengaruhi oleh sifat solidaritas dan humanismenya yang tinggi, maka I.J. Kasimo tergerak untuk mewujudkan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat melalui karya-karya sosial dan mewujudkan eksistensi golongan Katolik di tengah-tengah masyarakat.

H. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu memiliki metode-metode ilmiah seperti halnya ilmu lainnya. Metode ilmiah dalam penulisan sejarah digunakan untuk mengeksplanasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada sehingga dapat diketahui secara tepat mengenai kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh menempuh proses itu disebut *historiografi* (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan *historiografi*, sejarawan atau penulis sejarah berusaha merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia.⁵⁰ Metode analisa sejarah ini mencakup empat hal yaitu:

- a. Pemilihan subjek untuk diselidiki
- b. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut.
- c. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati-tidaknya.
- d. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya dari pada sumber-sumber (atau bagian dari sumber-sumber) yang terbukti sejati.⁵¹

Untuk melihat contoh metode analisa yang mencakup empat hal tersebut yang menyangkut dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

⁵⁰ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

⁵¹ *Ibid.*

- a) Pada pemilihan subjek yang diselidiki di sini ialah mengangkat subjek mengenai seorang tokoh yaitu I.J. Kasimo yang dilihat dari segi biografi latar belakang kehidupannya serta beberapa peranan dan jasanya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.
- b) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut ialah dengan pencarian sumber data kepustakaan yang menyangkut topik tersebut, seperti buku-buku yang menuliskan dan mengkisahkan kehidupan dan perjuangannya, dan beberapa artikel yang pernah ditulis oleh tokoh yang bersangkutan (I.J. Kasimo yang menuliskannya dalam buku tentang peringatan Perjuangan PKRI dan Dasar-Dasar Perjuangan PKRI/AMKRI).
- c) Pengujian sumber supaya dikatakan sejati atau tidak dapat dilakukan dengan kritik sumber yang lebih pada otentisitas sumber data (kritik intern), yaitu dengan membandingkan antara sumber data yang ada untuk menjauhkan subjektivitas penulis dalam menuliskan kisah tokoh I.J. Kasimo, hal-hal yang diuji seperti, gaya bahasa, kejujuran atau objektivitas dan prasangka penulis, yang harus ditimbang kepentingan penulis, pengaruh keadaan, simpati dan antipati penulis keangkuhan, pengaruh pandangan umum, dan penafsiran lainnya.
- d) Pemetikan unsur-unsur yang dipercaya dari sumber-sumber (atau bagian-bagian dari sumber) yang terbukti sejati dapat dilakukan dengan mengambil data yang berdasarkan fakta dan obyektivitasnya tinggi dalam penulisannya.

Beberapa fakta kehidupan yang terlihat jelas seperti jabatan yang pernah dipangkunya (seperti menteri, DPA dan sebagainya) dan beberapa surat keputusan dalam suatu dokumen baik kenegaraan ataupun gereja, gelar tanda jasa yang pernah diperolehnya, serta pengalaman empiris lainnya di tengah-tengah masyarakat.

Adapun penulisan ini menyangkut objek proses sejarah, sehingga metode sejarah adalah yang paling tepat untuk digunakan. Menurut Louis Gottschalk ada lima tahap yang harus ditempuh untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yaitu:

1) Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan salah satu langkah kerja yang pertama yang harus dikerjakan oleh seorang penulis agar apa yang ingin diketengahkan dalam penulisannya menjadi jelas lebih-lebih di mata pembaca sendiri.

Untuk itu diperlukan beberapa kriteria sebagai acuan, yaitu:

- a) Topik harus memiliki nilai, yang artinya topik di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat.
- b) Topik harus orisinal yang berarti bahwa apa yang ditulis belum pernah ditulis orang lain.
- c) Topik harus praktis yang berarti bahwa pemilihan topik di sini apa bila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan waktu.

d) Topik harus memiliki kesatuan tema dan topik di sini harus berangkat dari suatu permasalahan.

2) Pengumpulan sumber (Heuristik)

Setelah memilih topik mengenai Peranan I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973, selanjutnya diambil langkah heuristik (pengumpulan data). Dalam mengumpulkan sumber data yang relevan untuk keperluan subjek yang diteliti, dicari dan dikumpulkanlah sumber yang diperoleh di perpustakaan baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik.

Mengingat karena begitu banyaknya macam dokumen, sumber data yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengadakan penelitian atau penulisan sejarah, perlu memilih suatu subjek dan mengumpulkan informasi mengenai subjek itu. Pemilihan sumber-sumber tulisan dan lisan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder serta didukung sumber tertier. Sumber primer merupakan sumber yang merupakan sumber yang disampaikan dari seorang saksi yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Mengenai contoh sumber primer yang dikumpulkan dalam bentuk buku dapat disebutkan dalam buku yang ditulis oleh I.J. Kasimo sendiri, seperti buku yang berjudul "Dasar-Dasar Perjuangan PKRI-AMKRI", diterbitkan Dewan PKRI Jakarta tahun 1949 dan "Peringatan Perjuangan Politik Katholik Indonesia", diterbitkan oleh Canisius Jogjakarta tahun 1948, serta beberapa artikel yang ditulisnya dalam

surat kabar Suara Katolik dengan judul “30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia : 1923-1953”, di tahun 1953 dan “Maka Lahirlah Dia: Partai Katolik”, di tahun 1971. Beberapa tulisannya itu mengetengahkan perjuangan politikrya dalam Partai Katolik.

Sedangkan sumber sekunder dan tersier biasanya buku-buku yang ditulis oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu peristiwa ataupun sumber-sumber pendukung yang dapat membantu dalam menjelaskan suatu peristiwa. Untuk sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Contoh sumber sekundernya ialah pada buku yang disusun oleh Tim Wartawan Kompas yang berjudul “T.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya, terbitan Gramedia, Jakarta, tahun 1980, yang mengkisahkan biografi kehidupannya. Kemudian ditulis juga oleh Tim Redaksi Yayasan Kasimo dalam majalah bulanan berjudul “Solidaritas” yang menuliskan program kegiatan di luar politik praktis pasca difusikannya PKRI dalam PDI ketika dikeluarkannya Tap MPRS. No. XXII tahun 1966, tentang penyederhanaan sistem kepartaian.

Sumber tertier yang terkumpul dan terseleksi secara relevan dalam topik di sini mencakup banyak jenis buku, baik sejarah politik, ekonomi dan sosial, pendidikan maupun keagamaan. Buku tentang sejarah politik seperti buku yang ditulis oleh P.J. Suwarno (tentang birokrasi ketatanegaraan dan politik) dengan judul “Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu

dan Sekarang”, cetakan Andi Offset Yogyakarta tahun 1989, “Pancasila Budaya Bangsa Indonesia”, tebitan Kanisius Yogyakarta tahun 1993; Drs. G. Moedjanto (tentang sejarah umum Indonesia), dengan judul “Dari Pembentukan Pax Nerlandica Sampai Negara Kesatuan RI” terbitan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2003, “Indonesia Abad Ke-20, jilid I dan Jilid II., terbitan Kanisius Yogyakarta 1988; M.P.M. Muskens (tentang sejarah gereja), dengan judul “Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Pengintegrasian di Alam Indonesia”, Jilid 4 diterbitkan Dokpen MAWI Jakarta tahun 1967.

3) Kritik sumber

Kritik sumber merupakan tahap penelitian/penulisan sejarah setelah pengumpulan data. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas (dapat percaya atau tidak) dan otentisitas (asli atau tidaknya) sumber data yang dipakainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber merupakan uji terhadap data penelitian. Kritik sumber dalam penelitian/penulisan sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepaluan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.⁵²

Langkah-langkah konkret kritik eksem dalam rangka mendapatkan otentisitas/keaslian dari beberapa sumber yang telah terkumpul seperti

⁵² Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 99-100.

terlihat pada buku yang ditulis oleh I.J. Kasimo dengan judul Dasar-Dasar Perdjongan PKRI-AMKRI, yang dicetak oleh Canisius Jogjakarta tahun 1948 dan buku berjudul Peringatan Perdjongan Politik Katholik Indonesia, yang dcetak oleh Dewan PKRI tahun 1949, yang nantinya dianggap sebagai sumber primer, yaitu bahwa pertanyaan mengenai siapa yang membuat jelas bahwa I.J. Kasimo sendiri selaku ketua umum PKRI yang menyusun/menulisnya, kapan sumber itu dibuat jelas pada tahun ketika diterbitkan/dicetaknya yaitu tahun 1948 dan 1949, berasal dari mana sumber itu diperoleh tentunya dari I.J. Kasimo sendiri selaku ketua dan para anggota-anggota pengurus PKRI di dalamnya, serta bagaimana ciri tulisan/gaya bahasa, dan ejaan yang terlihat belum pada ejaan yang disempurnakan termasuk kualitas kertas dengan warna dan jenis kertas yang pudar dan tipis.

Sedangkan pada langkah kritik intern dalam mendapatkan kredibilitas sumber data ini ialah dengan usaha mengoreksi arti dan layaknya suatu dokumen data. Salah satu contoh langkah kritik intern sumber primer dari buku yang berjudul "Dasar-Dasar Perjuangan PKRI-AMKRI" dan "Peringatan Perdjongan Politik Katholik Indonesia", yang ditulis oleh I.J. Kasimo, dapat dilihat dari usaha mengoreksi dan menimbang mengenai apa kepentingan penulis, seperti kepentingan I.J. Kasimo untuk membuat suatu publikasi dan pengaktualisasian secara faktual pendirian PKRI dengan mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program-

programnya, supaya maksudnya dapat diterima oleh masyarakat luas; kemampuan penulis sendiri sebagai saksi sejarah sekaligus pelaku utama yang berperanan di dalamnya (sebagai pendiri dan Ketua Partai Katolik) sehingga layak sebagai penulisan yang kredibel. Langkah kritik intern lainnya pada sumber sekunder atau tersier juga perlu usaha membandingkan antara penulis satu dengan penulis lainnya yang mengisahkan I.J. Kasimo, mengenai apa maksud/motif dan kepentingan serta objektivitas penulisannya, ataupun posisi penulis sebagai saksi atau pengamat atau pengumpul data yang akurat, sehingga dapat diuji keabsahannya.

4) Interpretasi data (analisa data)

Analisis sumber atau interpretasi dalam penelitian sejarah merupakan tahap yang sangat penting, karena dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah dinilai kebenarannya. Pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu mengurangi subjektivitas yang dapat muncul dalam historiografi. Penulisan sejarah dalam suatu peristiwa yang diamati dan masuk kepikiran subjek tidak akan murni, tetapi akan murni apabila diberi warna sesuai kacamata subjek dengan interpretasi-interpretasi data yang ada.

Langkah dalam interpretasi data, yaitu usaha penafsiran pada sumber data yang ada dengan menafisirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya, yang kemudian dari fakta yang ada digabungkan menjadi satu atau dapat digeneralisasikan sehingga menjadi suatu rangkaian

peristiwa sejarah yang bermakna. Penafsiran-penafsiran dan beberapa sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penafsiran mengenai faktualisasi (penafsiran fakta) mengenai peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dari beberapa sumber yang digeneralisasikan dan diidentifikasi berdasar permasalahan yang telah dibuat. Misalnya penafsiran mengenai soal politik, sosial, pendidikan atau kegerejaan yang diterjuni I.J. Kasimo perlu generalisasi dan identifikasi yang kemudian dianalisis berdasarkan bidang-bidang dan buku acuan yang ada dan kredibel sehingga mengurangi subjektivitas kajian sejarah.

5) Penulisan sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber sejarah yang terkait di dalamnya, yang memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dengan mudah memberi suatu pengertian dasar kapan peristiwa itu terjadi.

Dalam historiografi/penulisan sejarah yang berupaya merekonstruksi peristiwa sejarah masa lampau dalam suatu totalitas yang utuh diperlukan kronologi dan periodisasi serta sistematika lainnya. Karena keilmiahannya penulisan sejarah dilihat dari sifatnya yang sistematis. Berdasarkan judul "Peran I.J. Kasimo dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973" yang menyiratkan ruang waktu yang begitu luas, maka perlu sistematisasi, kronologi dan periodisasi dalam

penulisan/penyusunannya, yaitu terlihat dalam pembagian periodisasi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa Pemerintahan Republik Indonesia yang masih terbagi lagi dalam tiga masa/periode lagi, yaitu masa Demokrasi Liberal, masa Demokrasi Terpimpin dan masa Orde Baru.

Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut di antaranya pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi. Di samping itu dalam penelitian/penulisan haruslah sistematis yang mencakup beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis di antaranya: topik, latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat dari penulisan/penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian/penulisan, dan sistematika penelitian/penulisan.

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode diskriptif analitis, yakni model penulisan sejarah yang membutuhkan landasan teoritis atau kerangka konseptual, sehingga nantinya dapat dianalisa dalam deskripsi penulisannya. Beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, *pertama*: bagaimana latar belakang kehidupan I.J. Kasimo; *kedua*, ialah apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973; dan *ketiga* yaitu apa saja dan bagaimana peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan politik, sosial-budaya, dan agama. Adapun yang akan dianalisis dalam pendekatan politik adalah bagaimana latar belakang kondisi politik dan pemerintahan yang melingkupi dalam keterlibatan/peranan I.J. Kasimo di bidang politik di Indonesia baik dalam Partai Katolik maupun lembaga pemerintahan. Dengan dukungan ilmu politik sebagai ilmu bantu (secara interdisipliner) pada penulisan ini nantinya dapat mengarahkan pada bahasan mengenai peranan I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan sosial-budaya dan agama, yakni pendekatan yang mengarahkan pada bahasan mengenai peranan I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang antara lain mencakup aspek/segi sosial-budaya, seperti perkebunan rakyat, perburuhan, jaminan atau perlindungan sosial, pendidikan rakyat, informasi dan kehidupan beragama Katolik dalam suatu masyarakat. Maka ilmu bantu sosiologi ataupun teologi (agama Katolik) sangat dipakai sebagai pendekatan yang dapat membantu dalam penulisan sejarah ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sejarah yang berjudul "Peranan I.J. Kasimo dalam kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973" ini, dapat dituliskan beberapa garis besar tata urutan atau sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab I ini berisikan: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II. Latar belakang sejarah kehidupan I.J. Kasimo.

Bab II ini berisikan uraian aspek/bidang yang melatarbelakangi kehidupan I.J. Kasimo, antara lain: latar belakang sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan pendidikan serta motivasi/cita-cita I.J. Kasimo.

Bab III. Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973.

Bab III ini berisikan uraian peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara dalam beberapa periode/masa, antara lain: masa Kolonial (1900-1945), masa Demokrasi Liberal (1945-1955), masa Demokrasi Terpimpin (1955-1966), dan masa Orde Baru (1966-1973).

Bab IV. Peran I. J. Kasimo dalam kehidupan Bernegara di Indonesia 1921-1973.

Bab IV ini berisikan uraian peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat dalam beberapa periode/masa, antara lain: masa Kolonial (1900-1945), masa Demokrasi Liberal (1945-1955), masa Demokrasi Terpimpin (1955-1966), dan masa Orde Baru (1966-1973).

Bab V. Kesimpulan.

Bab V ini berisikan kesimpulan dari uraian Bab II, Bab III dan Bab IV.



BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN I.J. KASIMO

A. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Latar Belakang Keluarga

Kasimo dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 10 April 1900, oleh Dalikem ibundanya dan Ronosentiko sebagai ayahandanya. Ronosentiko, merupakan seorang abdi dalem prajurit Mantrijeron.⁵³ Sebagai abdi dalem prajurit Mantrijeron, Ronosentiko cukup terpandang dengan kedudukan sosialnya dalam masyarakat, karena di antara prajurit lainnya, seperti Jogokaryo, Prawirotomo, Panyutro, dan Katanggung, prajurit Mantrijeron merupakan barisan kehormatan yang selalu berbaris di deretan paling belakang, yaitu tepat di depan Sri Sultan.⁵⁴ Jabatan sebagai prajurit ini menjadikan Ronosentiko memiliki hak privelese (kehormatan) sebagai *priyayi*.⁵⁵

Meskipun dimilikinya hak privelese/kehormatan tersebut, Ronosentiko tetaplah sebagai seorang abdi dalem. Dalam struktur masyarakat feodal yang berlaku di Yogyakarta pada waktu itu, seorang abdi dalem, tidak menerima gaji, namun sebagai imbalan untuk jasa-jasanya, Ronosentiko dan keluarga

⁵³ Tashadi, dkk., *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: IDSN, 1993, hlm. 156.

⁵⁴ Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 4.

⁵⁵ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 156.

mendapat sebidang tanah yang luasnya 2 jung atau kira-kira 8 bahu (7096,50m²).⁵⁶

Bila mendasarkan kehidupan pada pekerjaan sebagai abdi dalem saja, tentu kebutuhan ekonomi keluarga Ronosentiko dan Dalikem tidaklah mencukupi, karena selain Kasimo sebagai anak kedua mereka, masih terdapat 8 (delapan) anak lagi, yaitu Mangoenprawiro (kakaknya), Kasidjo, Katidjo, Katinah, Katiman, Tugiyo, Wagiman, dan Kasidjo⁵⁷ (adik-adiknya). Dengan demikian semangat kerja keras sangat ditekankan dalam keluarga ini, mulai dari Dalikem, ibunya yang bekerja membanting tulang untuk mencari penghasilan tambahan dengan membuka warung, jadi *tukang perelan* (tukang tukar uang di pasar) dan usaha pembatikan kecil-kecilan.⁵⁸ Maka anak-anaknya dituntut untuk giat membantu pekerjaannya.

Sebagai putra kedua, Kasimo membantu pekerjaan orang tua atau rumah tangga lainnya, mulai dari ikut membantu ibunya yaitu membantu di pasar dengan melayani pembeli di warung, mengerok batik, hingga membantu pekerjaan kakek-neneknya yang telah berusia 70 tahun. Sedangkan Mangoenprawiro, sebagai putra sulung Ronosentiko, mengarahkan pekerjaannya untuk ikut membantu dirinya, selain bermaksud mempersiapkan Mangoenprawiro untuk menggantikan dirinya sebagai prajurit Mantrijeron. Hal

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 5.

⁵⁸ *Ibid.*

itu dikarenakan bahwa hak atas kedudukan istimewa sebagai putra tertua dalam keluarga yang disebut *kompris* (berasal dari bahasa Belanda yakni *kroonprins* berarti anak laki-laki tertua dari keluarga priyayi) dibebaskan dari semua pekerjaan rumah tangga dan setelah cukup usianya harus meninggalkan rumah untuk magang di kediaman pangeran (Pangeran Buminoto).⁵⁹

Kehidupan keluarga Ronosentiko dan Dalikem sebagai warga Yogyakarta tentunya dipengaruhi oleh tata nilai tradisi dan kebudayaan Jawa (Kraton Yogyakarta). Tata nilai dan kebudayaan Jawa yang berkembang itu antara lain sikap hidup rukun⁶⁰ dan hormat⁶¹ yang dicerminkan dalam sikap sopan santun dan menghormati kepada orang tua atau orang lain; sikap sederhana (*prasojo*), berbudi luhur, rendah hati (*andap asor*), tenggang rasa (*tepo seliro*)⁶² terhadap orang lain; sikap hidup "*sepi ing pamrih rame ing gawe*"⁶³ yang menjaga keselarasan hidup dengan melepaskan kepentingan individu dengan melaksanakan peran dan kewajiban-kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat secara ikhlas/tanpa pamrih yang terlihat dalam sikap solider, kekeluargaan dan kegotong-royongan, serta saling memperhatikan kekurangan orang lain dan ikut membantunya.

Nilai-nilai dan sikap hidup yang membudaya tersebut di atas, tentunya juga mempengaruhi kepribadian Kasimo kecil yang bersikap "*njawani*". Sikap hidup

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 39.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

sederhan, yang terlihat ketika dirinya nanti masuk sekolah yang hanya mengenakan pakaian sederhana yaitu hanya mengenakan satu sorjan yang dipakainya selama satu minggu dan tanpa bersepatu, serta bersekolah dengan berjalan kaki.⁶⁴

Sikap hormat kepada orang tua, rajin/giat dan bertanggung jawab dalam bekerja, yang terlihat dalam usaha dan kesediaan Kasimo dalam membantu pekerjaan rumah tangga yang dipegang ibunya. Kerajinannya dalam bekerja itu terlihat dalam kesehariannya yaitu mulai dari pukul 5.00 pagi dengan membuatkan minuman untuk ayahnya, membersihkan rumah, menimba air untuk mandi sekeluarga, hingga membantu pekerjaan ibunya di pasar dan mengerok batik serta membantu pekerjaan kakek-neneknya yang telah renta.⁶⁵

Sikap kerukunan dan solider pada diri Kasimo kecil ini dapat dilihat dalam sosialisasinya dengan teman-teman sepermainannya tanpa membeda-bedakan, sehingga dalam pergaulannya sangat disenangi teman-temannya.⁶⁶ Sosialisasi yang baik sehingga dalam pergaulan sangat disenangi teman-temannya itu tentu tidak lepas dari sikap *tepo seliro*, rendah hati (*andap asor*), dan jauh dari rasa iri (*serik*), benci (*dengki*),⁶⁷ atau dengan kata lain Kasimo menjaga persahabatan/pertemanan dengan penuh *katresnan* (cinta kasih). Melihat beberapa sikap hidup Kasimo muda mulai dalam keluarga dan lingkungannya

⁶⁴ Tashadi, dkk., *op.cit.* hlm. 157.

⁶⁵ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 4-5.

⁶⁶ Tashadi., dkk., *op.cit.*, hlm. 157.

⁶⁷ Frans Magnis Suseno, *op.cit.*, hlm. 144.

itu dapat dikatakan bahwa dirinya memiliki konsep diri dan dedikasi yang baik dan berbudi luhur. Sifat pembawaan lahiriah dari masa muda ini, membentuk watak/kepribadian Kasimo pada perkembangan dan pendewasaan jiwa dan kepribadian selanjutnya.

2. Latar Belakang Pendidikan I. J. Kasimo

Terselenggaranya pendidikan seseorang tentunya tidak lepas dari kesediaan dan dukungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Ronosentiko merupakan orang tua yang berpikiran maju.⁶⁸ Berpikiran maju ini dapat dilihat dari pemikiran untuk mengorientasikan masa depan dan demi meningkatkan taraf hidup⁶⁹ karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka lewat pendidikan ini diharapkan keluarga Ronosenito dapat berubah lebih baik dalam segi ekonominya. Pola berpikir yang maju ini secara ekstern juga dipengaruhi dari lingkungan masyarakatnya, di mana lingkungan masyarakatnya di sekitar kraton, terlebih dirinya sebagai seorang priyai yang sosialisasinya berada di lingkungan kraton, di mana kraton di sini merupakan sebagai sentral politik dan sosial, yang hal itu merupakan tempat yang sangat strategis terjadi perubahan sosial, baik dalam interaksi antar orang, pekerjaan, serta pola nilai,⁷⁰ termasuk nilai-nilai tentang pentingnya pendidikan. Sri Sultan sebagai bangsawan yang terhormat dianggap sebagai suri tauladan/panutan,

⁶⁸ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 5.

⁶⁹ Tjetjep Rohendi Rohidi, dkk., *Pendekatan Sistem Sosial Budaya Dalam Pendidikan*, Semarang: FKIP Semarang, 1994, hlm. 37.

⁷⁰ *Ibid.*

sadar betul tentang pentingnya pendidikan bagi putra-putranya yang didasarkan pada pertimbangan pemikiran yang progresif untuk memajukan pendidikan putra-putranya.⁷¹ Wawasan dan kesadaran atas pentingnya pendidikan yang diteladankan oleh Sri Sultan itulah menjadikan Ronosentiko untuk menyekolahkan Kasimo di sekolah rakyat.

Di awal abad dua puluh, dibukalah program pendidikan (edukasi) berdasarkan pada kebijakan Politik Etis yang dicanangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Program edukasi ini kemudian mulai dijalankannya di Indonesia, pada tahun 1907 oleh Gubernur Jendral Van Heutz,⁷² dengan mendirikan sekolah-sekolah desa. Sekolah yang dibuka pada masa itu ialah sekolah khusus bumiputera yang di bagi dalam dua kelas sosial, yaitu Sekolah Bumiputera Kelas Satu (*Eerste Inlandsche School*) yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi dari golongan masyarakat atas/bangsawan dan Sekolah Bumiputera Kelas Dua / Sekolah Ongko Loro (*Tweede Inlandsche-School*).

Setelah berusia 8 (delapan) tahun, Kasimo disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah bumiputera kelas dua, karena orang tuanya merupakan golongan masyarakat bawah dengan pemilikan tanah (sebagai ukuran kekayaan/kelas) seluas dua jung atau kurang lebih delapan bahu (7096,50 m²), sehingga ditempatkan di Sekolah Ongko Loro (*Tweede Inlandsce-school*), di Kampung

⁷¹ Ahmad Adaby Darban, dkk., *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*, Jakarta: ISDN, 1998, hlm. 7.

⁷² Tashadi, dkk., *loc.cit.*, hlm. 158.

Gading.⁷³ Sedangkan untuk Sekolah Kelas Satu ialah anak pribumi yang orang tuanya memiliki kekayaan atau penghasilan di atas £1200 setahun.⁷⁴

Sekolah Ongko Loro merupakan sekolah rakyat yang bertujuan mendidik pegawai rendahan dengan lama pendidikan empat tahun. Adapun pelajaran yang diberikan antara lain membaca menulis, berhitung, bahasa Melayu dan ilmu bumi tentang Pulau Jawa.⁷⁵ Dengan pengajaran yang diberikan dan dienyamnya itu setidaknya telah menambah khasanah pengetahuan pada diri Kasimo, meskipun pada usia dini tersebut Kasimo belum menyadari akibat-akibat buruk yang disebabkan *sistem feodalisme*, diskriminasi dengan penggolongan-penggolongan kelas di dalam masyarakat pribumi sendiri dan eksploitasi yang berlaku pada waktu itu, tetapi pengalaman pribadi yang dirasakannya itu menentukan kepribadian dan perjuangan hidupnya di kemudian hari. Pengalaman masa kecil ini antara lain menumbuhkan jiwa kerakyatan pada diri Kasimo yang mendorong untuk selalu berjuang bagi kepentingan rakyat kecil.

Namun setelah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, Kasimo mulai menjadi seorang intelektual dan humanis yang terpanggil sebagai nasionalis Indonesia. Pendidikan yang di tempuh berikutnya ini ialah sekolah guru (*Kweekschool*), di Muntilan. Ketertarikan Kasimo untuk melanjutkan studi di

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm 7.

Kweekschool Muntilan ini selain memenuhi tawaran Van Lith (selaku kepala sekolah di sana) sewaktu mempromosikan sekolahnya untuk kelanjutan studi setelah lulus dari Sekolah Ongko Loro di Kampung Gading, juga di karenakan bahwa dirinya belum memiliki rencana setelah lulus dari Sekolah Ongko Loro, dan secara prospektif dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai masa depan jika terus tinggal di rumah orang tuanya dan keinginannya untuk maju.⁷⁶

Setelah lulus dari Sekolah Ongko Loro di kampung Gading, dengan restu dan dukungan (dengan disetujuinya rencana Kasimo untuk melanjutkan sekolah di Muntilan)⁷⁷ oleh orang tuanya, maka Kasimo pun memulai memasuki sekolah dan mengenyam pendidikan di *Kweekschool* Muntilan pada tahun 1912. Proses pendidikan di *Kweekschool* pun mulai dilaluinya. Proses pendidikan yang diterapkan di sekolah ini merupakan penerapan dari karya misi pendidikan Yesuit yang secara langsung ditangani oleh Pater Frans Gregorius Josepus van Lith.

Van Lith sendiri memiliki motivasi besar dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Jawa, yang didasarkan solidaritas terhadap keprihatinan akan ketertindasan yang dilatar belakangi oleh kemiskinan dan kebodohan yang dialami masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian tujuan pendidikan yang diselenggarakannya adalah meningkatkan kualitas anak-anak Jawa sehingga

⁷⁶ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 160.

⁷⁷ Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 9-10. Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 160.

⁷⁸ Y. Heru Hendarto, "SJ, Romo van Lith, SJ. Pembaharu Karya Missi Gereja di Jawa Tengah", dalam majalah *Rohani*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 215.

mereka mendapatkan kedudukan yang baik dalam masyarakat.⁷⁹ Dengan visi itulah Kasimo bersama murid lainnya didik dalam kawah candradimuka yang menggembleng baik intelektual maupun spiritualitas dengan penekanan penanaman sikap humaniora di dalamnya.

Adapun bentuk dan metode pendidikan yang diterapkan tentu saja mengacu/berpedoman pada metode belajar pada pendidikan model Jesuit yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Januari 1599 di kota Roma (Pusat kongregasi Serikat Yesus / Jesuit) dalam suatu "*Ratio Studiorum*" (Rencana Belajar Mengajar⁸⁰), yang asas dasar berpangkal pada pengalaman Ignatius dalam bentuk Latihan Rohani. Dengan demikian bentuk persekolahan *Kweekshool* Muntian ini ialah bersama karena dengan bentuk asrama ini pendidikan yang menyeluruh dapat tercapai, di mana di dalamnya untuk menerapkan rutinitas belajar dan "Latihan Rohani" yang secara penuh kepada siswa-siswanya dengan beberapa tata tertib untuk mengatur setiap aktivitasnya dalam bersekolah.

Lingkungan belajar yang berinsprasikan ajaran Kristiani, baik mulai karena tingkah laku yang baik, sopan dan saleh dari siswa-siswa yang tinggal di sana dengan sistem asrama yang penuh peraturan untuk mendidik agar anak

⁷⁹ St. Sularto, *Van Lith dan Muntian "Bethlehem van Java"*, dalam <http://www.kompas.com>. 27 Desember 2003. hlm. 1.

⁸⁰ *Ratio Studiorum* atau Rencana Belajar Mengajar bagi sekolah-sekolah Yesuit adalah buku pedoman yang membantu para guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan sehari-hari. Lihat lebih lanjut dalam buku: *Provinsial Serikat Yesus Indonesia, Ciri-Ciri Khas Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Yesuit*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, hlm. 72-73.

berdisiplin dengan jadwal-jadwal yang teratur dan intensif,⁸¹ terlebih dengan pengajaran dengan pendekatan personal yaitu dengan kontak pribadi dalam proses pendidikan yang penuh perhatian dan kasih sayang dari van Lith,⁸² menjadikan Kasimo tertarik dengan ajaran Kristiani tersebut, dan akhirnya menjadi seorang Katolik dengan mengikuti pelajaran agama Katolik dan kesediaannya untuk dibaptis dengan nama Ignatius Joseph pada bulan April 1913.

Ada beberapa faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kehidupan Kasimo semasa hidupnya di *Kweekschool*. Kasimo tertarik dan terkesan pada pribadi van Lith yang pengaruh iman dan ajarannya meresap pada jiwa Kasimo sehingga dapat dikatakan sebagai pedoman hidupnya selanjutnya. Mula-mula Kasimo terkesan karena van Lith sangat menyelami jiwa Jawa,⁸³ karena pada dasarnya van Lith sangat mencintai bumi dan masyarakat Jawa yang kebetulan sifat kebudayaannya sama dengan watak dan kepribadian dirinya sendiri yang sabar dan berperasaan halus, sehingga dirinya merasa "*Aku ini hidup ditengah-tengah orang Jawa; berperasaan dan berpikir seperti mereka*".⁸⁴ Kecintaan dan kedekatan akan masyarakat Jawa ini terlihat dalam kesabarannya dan perhatiannya kepada anak didiknya yang sangat mementingkan agar apa yang

⁸¹ Tashadi, *loc.cit.*, hlm. 160.

⁸² Y. Heru Hendarto, SJ., *loc.cit.*, hlm. 218.

⁸³ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 11.

⁸⁴ St, Sularto, *op.cit.*, hal. 1; Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 11.

diajarkan itu benar-benar meresap ke dalam jiwa orang yang menerima pelajaran.⁸⁵

Di samping terkesan akan sifat van Lith di atas, Kasimo juga meneladani sikap hidup sederhana, bekerja keras, mempunyai rasa perikemanusiaan, bersikap jujur, berani membela hak dan kepentingan rakyat kecil yang tertindas, dan toleransi terhadap golongan lain.⁸⁶ Sikap-sikap tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian Kasimo.

Selain keteladanan van Lith, ada panutan lain yang berpengaruh juga dalam pembentukan watak dan kepribadian Kasimo, yaitu pater H. van Driessche. Satu hal yang paling menarik Kasimo ialah penafsiran Van Driessche tentang Perintah Keempat dari Sepuluh Perintah Tuhan, yang berbunyi "*Hormatilah bapak ibumu*", yang diartikan bukan hanya menghormati dan mencintai ayah dan ibu di rumah saja, melainkan juga hormat serta cinta kepada tanah air dan negara.⁸⁷

Semasa mengenyam pendidikan di *Kweekschool* Muntilan, selain diselaminya beberapa ajaran dan keteladanan para guru/pengajarnya (van Lith dan van Driessche) tentang sikap dan kepribadian yang lebih mengarah pada segi humanioranya, juga digalinya ilmu pengetahuan untuk memperkaya segi intelektualitasnya. Proses pendidikan di sekolah ini selain belajar individu,

⁸⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.* hlm. 11.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

seperti yang dilakukan Kasimo dengan membaca-baca buku tentang ilmu sosiologi, agama dan sastra serta majalah *Sworo Tomo*, juga diterapkan model diskusi dalam suatu kelompok siswa mengenai materi pelajaran, seperti yang dibentuk dalam klub diskusi yang dipimpin Mas Soejoet (guru bahasa Jawa), yang setiap minggu harus menyampaikan materi dalam bentuk pidato/presentasi.⁸⁸

Dari pengembangan klub diskusi dengan teman-teman sekolahnya itu tentu membawa dampak bagi pembentukan sebuah organisasi yang bernama PPKD (Pakempalan Politik Djawi) yang didirikan oleh Kasimo dan teman-temannya (F.S. Harjadi dan R.M. Jakob Soedjati) dari sekolah *Kweekschool* Muntilan ini. Dengan demikian, sosialisasi dan lingkungan belajar yang intensif yang dilakukan di *Kweekschool* ini sangat memberikan pengaruh baik watak/kepribadian, maupun cita-cita perjuangan Kasimo.

Selepas dari *Kweekschool*, Kasimo meneruskan pendidikannya ke Sekolah Pertanian Menengah atau *Middelbare Landbouwschool* (MLS) di Bogor pada tahun 1918. Pilihan Kasimo untuk bersekolah di MLS di Bogor dengan jurusan pertanian selain dikarenakan adanya peraturan bagi siswa *Kweekschool* yang ingin melanjutkan sekolah dan tidak ingin menjadi guru di HIS boleh meninggalkan sekolah pada waktu duduk kelas 5 dari 6 tahun masa studi, juga karena ketertarikannya terhadap bidang pertanian, yang hal itu dipengaruhi dari

⁸⁸ *Ibid.*

latar belakang pengetahuan dan wawasan Kasimo sendiri yaitu dari kakeaknya yang merupakan seorang bekel yang memiliki sawah luas, sehingga dirinya tidak merasa asing dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanian.⁸⁹

Di Bogor, Kasimo memusatkan pikirannya terhadap masalah pertanian, ekonomi, dan sosial. Di samping Kasimo mengikuti pelajaran di MLS juga mengikuti kursus *Volkeredietwezen* (Perkreditan Rakyat), yang waktu itu berada di bawah *Binnenlands Bestuur* (Departemen Dalam Negeri). Di tengah aktivitas itu, Kasimo juga banyak belajar sendiri dengan meneliti pengetahuan dari buku-buku, majalah serta surat kabar.⁹⁰

Buku-buku yang memberikan pengaruh bagi pemikiran Kasimo di antaranya ialah buku berjudul *Sociologische Beginselen* (Prinsip-Prinsip Sosiologi) karangan de Bruijn, yang mengilhami Kasimo mengenai pemerintah yang baik dalam suatu masyarakat dan buku *De Katholieke Maatschappijleer* (Ajaran Sosial Katolik), karangan Dr. Llovera, yang di dalamnya terdapat kutipan Ferarri dengan judul *Il Popolo* yang mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan.⁹¹ Buku-buku pemberian L. van Rickvorsel ketika memasuki MLS ini memberi landasan idiil pada Kasimo untuk memperjuangkan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

⁸⁹ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 164. (Lihat lebih lanjut pada lampiran: 2, hlm. 209.)

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 17.

Selain belajar di MLS Bogor, Kasimo juga aktif dan bergabung dalam beberapa kegiatan dalam organisasi kesiswaan atau kepemudaan, seperti menjadi anggota *Jong Java* (organisasi pemuda Jawa), anggota dan ketua *Ceres* (organisasi siswa- siswa MLS Bogor). Sosialisasi berorganisasinya pun mulai meluas dengan berelasi dengan organisasi lain mulai lintas bidang/jurusan pendidikan, seperti berelasi dengan Renatus (perkumpulan siswa-siswa Kedokteran Hewan di Bogor) dan perkumpulan siswa *Stovia* dan *Rechtshool* di Jakarta, hingga berelasi dengan lintas suku, seperti pemuda Sunda, Madura, Minahasa, Ambon, Indo, Arab dan lain-lain.⁹² Dengan wawasan dan pengalaman serta sosialisasi dalam berorganisasi nantinya memberikan peluang untuk memperluas lingkungan pergaulan dan mempengaruhi dan mendorong dirinya untuk membentuk organisasi atau partai yang berjuang demi masyarakat dan bangsanya.

Proses perkembangan pemikiran dan jiwa kepribadian/kehumanistisan Kasimo tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang pernah dienyamnya semasa hidupnya. Melalui pendidikan ini, cakrawala berpikir dan peka rasa I.J. Kasimo mulai terbuka. Kepekaan sosial dan solidaritas pada diri I.J. Kasimo mulai muncul dan dirinya merasa terpenggil terhadap situasi dan kondisi bangsa dan masyarakatnya yang dilanda ketertindasan. Sebagai wujud solidaritas, I.J. Kasimo ingin mendedikasikan hidupnya bagi negara dan

⁹² Tashadi, dkk., *op.cit.* hlm. 187.

masyarakatnya. Dedikasi I.J. Kasimo bagi negara dan masyarakatnya itu terlihat dalam mottonya “*salus populi suprema lex*” (kesejahteraan adalah hukum yang tertinggi) dan “*pro bono publico*” (demi kepentingan umum). Semangat dan dedikasi yang besar itu tidak lepas dari proses perkembangan pemikiran (intelektualitas) dan kematangan humanioritas (kepekaan jiwa kemanusiaan) pada diri I.J. Kasimo. Kematangan intelektualitas dan humanitas pada diri I.J. Kasimo tidak lepas dari pendidikan yang ditempuhnya itu.

B. Latar Belakang Sosial Politik

1. Kondisi Sosial Politik

Setelah VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799, maka Pemerintah Belanda kemudian membentuk suatu kolonialisasi baru di Indonesia yaitu politik kolonial liberal.⁹³ Bentuk kolonisasi liberal ini ialah berdasarkan prinsip golongan/kaum liberal dan humanis di negeri Nederland yang berkembang prinsip-prinsip liberalis yaitu menghendaki dilaksanakan usaha-usaha bebas dan pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah.⁹⁴ VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) yang berdiri sebelumnya (1602) merupakan suatu aktivitas penyelewengan dari

⁹³ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati* Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 19.

⁹⁴ *Ibid.*

prinsip liberal, yang dalam usaha kolonisasinya di tanah jajahan (Indonesia) menerapkan aktivitas eksploitasi dan penindasan kepada pihak rakyat.

Dengan pertimbangan liberalis dan humanis, maka ditetapkanlah sistem politik kolonial baru yang dinamakan Politik Etis, yaitu suatu kebijakan pemerintah Nederland (oleh ratu Wilhelmina tahun 1901 tentang *Ethisce Richting*/Haluan Etika) yang dimaksudkan bahwa Belanda sebagai bangsa yang beradab berkewajiban memajukan bangsa yang terbelakang (Indonesia) sebagai tugas suci (*mission sacree*),⁹⁵ sebagai etisistas bangsa yang beradab. Etisitas Belanda terhadap Indonesia dilakukan dalam bentuk “balas budi”, karena balas budi itu adalah suatu kewajiban moral atau etis (berdasarkan pengajuan kritik C.Th. van Deventer yang termuat dalam majalah *de Gids* tahun 1899 tentang *Debt of Honour* atau Utang Budi),⁹⁶ yang maksudnya negeri Belanda haruslah membalas budi mengenai pemenuhan atas kekosongan kas negaranya kepada Indonesia sebagai akibat perang Diponegoro dan perang Belgia itu diisi oleh keringat orang Indonesia dalam pengerahan tenaga kerja secara eksploitasi oleh institusi VOC pada tahun 1602-1799. Oleh karena itu, menurut van Deventer, “Hutang Budi” itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui trias politiknya, yaitu irigasi, emigrasi/transmigrasi dan edukasi.

Dengan pencanangan dan dimulainya Politik Etis pada tahun 1901, yang ditandai dengan pengangkatan J.B. van Heutz sebagai gubernur jendral Hindia

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

Belanda (1904-1909), maka sejak saat itu pula tata pemerintahan kolonialis-pun dijalankan. Usaha politik kolonial itu didasarkan pada *Grondwet* pada tahun 1922, dengan dilalui beberapa kali perubahan tahun-tahun sebelumnya, bahwa di sana terdapat peraturan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia sejak tahun 1854 tentang *Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch-Indie* diganti dengan undang-undang *Wet op de Stssts inrichting van Nederlandch-Indie* yang selanjutnya disebut *Indische staatsregeling* atau IS yang teksnya diumumkan dalam S.1925 No.447.⁹⁷

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda sebagai berikut: Gubernur Jendral di dampingi oleh Dewan India sebagai dewan penasihat; para direktur, yang membantu gubernur jendral untuk memimpin departemen-departemen dan *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang dibentuk tahun 1917. Gubernur jendral diangkat oleh Ratu Wilhelmina atas pencalonan dari Dewan menteri untuk waktu yang tidak ditentukan (pasal 2 ayat 2 IS), tetapi biasanya setelah 5 tahun gubernur jendral meletakkan jabatannya.⁹⁸

Secara politik, dalam pemerintahannya di Indonesia, dipengaruhi oleh seorang penasehat pemerintahan yaitu Prof.C. Snouck Hurgronje, yang dalam anjurannya terdapat “haluan ethika” yang bersemboyankan “unifikasi” Indonesia-Belanda dengan “asosiasi” dan asimilasi”. Dengan kata lain

⁹⁷ B.P. Paulus, *Garis Besar Haluan Tata Negara Hindia Belanda*, Bandung: Alumi, 1979, hlm. 31.

⁹⁸ *Ibid.*

Indonesia di-Belanda-kan, sehingga ikatan Indonesia-Belanda bisa langgeng.⁹⁹ Dengan demikian keterikatan dan ketertundukkan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda dapat tetap eksis.

Meskipun telah diterapkannya Politik Etis, namun Belanda masih membatasi hak pribumi untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting. Hal itu dapat dilihat dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang mayoritas anggota dan pengurusnya ialah orang Belanda, termasuk van Lith (berkebangsaan Belanda) yang pernah duduk di *Volksraad*, menjadi Dewan pendidikan Hindia Belanda dan anggota Komisi Peninjauan kembali Ketatanegaraan Hindia Belanda,¹⁰⁰ yang akhirnya memihak pribumi dan mengusulkan keanggotaan bagi pihak pribumi.

Unifikasi, asosiasi dan asimilasi ini tentunya memberikan dampak sosial bagi pihak pribumi, di antaranya secara feodalistik masyarakat Indonesia masih tetap dalam lingkungan “terjajah” meskipun diselubungi “politik kesejahteraan/etis”. Hal itu nampak dalam bentuk-bentuk penerapan diskriminasi rasial atau *colour-line*,¹⁰¹ seperti penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kelas-kelas sosial, berdasarkan ras atau warna kulit/bangsa (warna kulit putih pada strata atas, kulit kuning pada strata tengah, dan kulit coklat pada strata bawah), pengangkatan kepegawaian berdasarkan jabatan dan kedudukan

⁹⁹ G. Moedjanto, *op cit.*, hlm. 23.

¹⁰⁰ St. Sularto, *loc.cit.*, hlm. 1

¹⁰¹ G. Moedjanto, *op.cit.* hlm. 21

peran sosial dalam masyarakat, seperti wedana dalam suatu kawedanan tidak melebihi kewenangan dari politik yang di atasnya, terlebih bupati atau gubernur jendralnya. Hal di atas dapat dikatakan secara struktural, masyarakat Indonesia masih terikat tradisi feodalisme yang tetap diterapkan dalam lingkungan penjajahan dan ketertundukan, sehingga kebebasan yang berdasarkan prinsip liberalis seperti yang diharapkan tidaklah terlaksana.

Latar belakang politik-sosial yang dirasakan oleh masyarakat pribumi di atas tentunya memberikan bahan renungan, pemikiran dan keinginan/cita-cita beberapa orang intelektual dan nasionalis yang terlahir dari program edukasi-Politik Etis ini. Kasimo yang terlahir sebagai seorang intelektual dan nasionalis Indonesia ingin memperjuangkan kesejahteraan rakyat dari segala ketidakadilan sosial dan ketertindasan tersebut.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Usaha unifikasi, assosiasi dan asimilasi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam hal ekonomi ini dapat disebutkan bahwa pemerintah tidak memberi perlindungan dan bantuan kepada usahawan pribumi secara sungguh-sungguh.¹⁰² Salah satu pengaturan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda dalam bidang pertanian dapat dilihat dalam Undang-Undang Tanah (*Agrarische Hervorming*) tahun 1918, di mana kepentingan ekonomi Pemerintah

¹⁰² *Ibid.*

Hindia Belanda sangat besar pada petani-petani pribumi, seperti yang diberlakukan bagi Ronosentiko pada lahan pertaniannya yang merupakan hibahan dari Sri Sultan kepadanya, yaitu dengan pengantian berupa uang sebesar 26 gelo.¹⁰³ Ketetapan dan ganti rugi itu tidaklah adil bagi pihak pemilik tanah seperti Ronosentiko, ataupun pemilik tanah yang lain. Ketidakadilan dalam hal ekonomi yang dialami pihak pribumi ini tentunya hanya menambah penderitaan ekonominya sehingga masih terdapat kemiskinan dalam masyarakat.

Ketidakadilan ekonomi antara pihak pribumi dan kolonis (Belanda) juga dipengaruhi dari proses swastanisasi industri Belanda yang mengalir memasuki dan berkembang Indonesia. Banyak perusahaan perkebunan, pertambangan dan transport serta perbankan berdiri. Lahan-lahan pertanian sering kali dibeli dari rakyat oleh pemerintah dengan harga yang murah untuk memenuhi investasi pengembangan proyek industri perkebunan dan sebagainya. Berkembangnya industri yang semakin besar dan memakan dana yang besar pula tentunya memaksa pengenaan pajak yang tinggi¹⁰⁴ kepada pihak pribumi yang diperuntukkan untuk memenuhi perusahaan-perusahaan industri tersebut. Hal ini tentunya menambah penderitaan bagi pihak pribumi, baik dengan pengenaan

¹⁰³ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 156.

¹⁰⁴ M.C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern* (terj), Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 1998, hlm. 232.

pajak yang tinggi hingga pemanfaatan tenaga pribumi pada perusahaan-perusahaan swasta tersebut.

3. Kondisi Pendidikan

Pencanangan program edukasi/pendidikan oleh Pemerintah Belanda tahun 1904 oleh Gubernur Jendral van Heutz memang pada dasarnya memiliki motivasi yaitu seperti yang diharapkan dari gagasan dikeluarkannya Politik Etis yang arahnya ialah untuk kepentingan penduduk pribumi dengan cara memajukan penduduk asli melalui pendidikan. Berkaitan dengan “arah etis” (*etishe koers*) yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda ini. Adapun beberapa dasar kebijakan pemerintah penyelenggaraan pendidikannya, yaitu meliputi: *pertama*, pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk pribumi, untuk itu bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah; *kedua*, pemberian sekolah pendidikan rendah bagi golongan pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka.¹⁰⁵

Atas dasar arah pendidikan itu, maka tujuan pendidikannya antara lain ialah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh atau pegawai rendahan dalam pemerintahan untuk kepentingan kaum modal Belanda, karena kaum terdidik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri dan ekonomi dan kebutuhan tenaga menengah seperti tenaga administrasi, tenaga teknik, dan tenaga

¹⁰⁵ Sumarsono Moestoko, *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 108.

pertanian, serta tenaga rendah.¹⁰⁶ Dengan demikian tujuan pendidikan itu tidak lain ialah untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja murah yang dipekerjakan di lapangan usaha Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini mengartikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan berupa pendidikan yang tidak bersifat sebagai praktek pembebasan¹⁰⁷ atau pendidikan yang terikat bagi kepentingan kolonial, karena pendidikannya terkait dengan “pemenuhan kebutuhan pembangunan” atau pendidikan mengarah pada penyediaan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Bila dilihat dari segi struktur sosial, pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda ialah pendidikan yang terkotak-kotak pada kelas-kelas sosial (dalam struktur pelapisan masyarakat yang feodalistik). Hal itu dapat dilihat dari pembagian pendidikan berdasarkan ketentuan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1920, yang pembagiannya terdiri dari tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan bumiputera/pribumi. Sedangkan untuk pribumi masih digolongkan lagi menurut keturunan dan status sosial, yaitu golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat, pemimpin agama (ulama) dan rakyat biasa.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Paulo Feire, *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (terj), Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. xvii-xviii.

¹⁰⁸ Sumarsono Muestoko, *op.cit.*, hlm. 111.

Penggolongan dalam persekolahan tersebut merupakan bentuk diskriminasi baik rasial maupun diskriminasi sosial-ekonomi. Pengelompokan masyarakat ke dalam golongan-golongan dengan garis pemisah yang tajam, yang tidak hanya antara penduduk Eropa dan masyarakat pribumi, tetapi juga mendorong penggolongan di dalam masyarakat pribumi sendiri.

Diskriminasi dan pengelompokan dalam lapisan sosial ini tentunya mendukung aktivitas kolonial, yang hal itu dapat diartikan bahwa dengan pengelompokan ini, masyarakat pribumi tetap terkondisikan dalam suatu ketertundukan karena lapisan di bawahnya tidak lain ialah masyarakat bumiputera sendiri yang masih dibawah oleh lapisan teratas ialah orang Eropa sebagai penguasa (Pemerintah Hindia Belanda). Pada masa kolonial yang penuh diskriminasi dan pendindasan sosial inilah Kasimo lahir, besar dan menuju proses pendewasaan. Karena dirinya masih berusia 11-12 tahun maka belum begitu menyadari akibat dari keadaan feodal dan kolonial tersebut,¹⁰⁹ namun hal itu sangat menentukan kepribadian dan perjuangannya di kemudian hari.

C. Motivasi dan Cita-Cita I.J. Kasimo

Pengalaman Kasimo masa kecil, secara sosial politik kondisi masyarakatnya berada dalam lingkungan alam kolonialis dan diskriminasi, sehingga masih terjadi kemiskinan dan ketertindasan/ketidakbebasan. Kondisi

¹⁰⁹ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 8

tersebut nantinya menumbuhkan jiwa kerakyatan pada diri Kasimo setelah dirinya terbuka dan sadar akan keprihatinan kepada masyarakatnya setelah mendapat pencerahan atas pengaruh intelektualitas dan kehumanisan ketika mengenyam pendidikan. Kedewasaan berpikir dengan kritis pada masalah sosial dan kepekaan sosial/solidaritas yang tumbuh dari jiwa humanisnya manyadarkan Kasimo bahwa kondisi masyarakatnya yang tengah mengalami ketertindasan dan kemiskinan inilah yang nantinya mendorong dirinya untuk selalu berjuang bagi kepentingan rakyat kecil.¹¹⁰

Dorongan itu memang timbul dari hati sanubari Kasimo sendiri yang merasa terpanggil untuk membela dan berjuang demi kesejahteraan rakyat kecil, namun tidak lepas dari beberapa pengaruh ektern yang memberikan pemahaman dan penyadaran sehingga dirinya tergerak dan terdorong memperjuangkannya. Dorongan dari luar itu ialah berkat dari pendidikan dan pengajaran serta inspirasi dari Pater van Lith, van Driessche selaku pengajar/guru dan didukung juga oleh lingkungan belajar dan beberapa metode belajar di dalamnya yang hal itu memberikan kerangka humanistik dan rasionalitasnya, sehingga kepekaan jiwa sosial kemasyarakatannya menjadi terbuka.

Secara intelektual, pendidikan dan pengajaran yang diterapkan di *Kweekschool* Muntilan, memberikan metode baik belajar individual maupun

¹¹⁰ Tashadi, dkk., *loc.cit.*, hlm. 159.

kelompok (klub diskusi). Secara individual siswa-siswanya, termasuk Kasimo diberikan kebebasan berkembang membaca literatur yang menjadi minatnya, seperti Kasimo yang menggemari bidang ekonomi, sosiologi, agama, dan sastra, dan secara individual pengajar (van Lith) menggunakan pendekatan personal sehingga ide dan gagasan dapat berkembang dan kedekatan batin yang terjalin, sehingga menjadi inspirasi bagi dirinya. Secara berkelompok, siswa membentuk klub diskusi sehingga mengasah rasionalitas dengan pengembangan gagasan yang didiskusikan. Selain itu, Kasimo ditempa oleh aspek kedisiplinan, kesederhanaan, kerajinan, kerja keras hingga kerohanian/spiritualitas yang diterapkan dalam lingkungan kawah candradimuka pendidikan dengan sistem asramanya, yang terlihat dalam sistem jadwal dan aturan yang ditentukan di *Kweekschool* ini.

Melalui pengetahuan dari buku dapat memberikan inspirasi kepada Kasimo untuk mewujudkan motivasi dan cita-citanya. Adapun beberapa buku pengetahuan umum itu seperti buku berjudul *Sociologische Beginselen* (Prinsip-Prinsip Sosiologi) karangan de Bruijn¹¹¹, yang mengilhami Kasimo mengenai pemerintah yang baik dalam suatu masyarakat dan buku *De Katholieke Maatscappijleer* (Ajaran Sosial Katolik), karangan Dr. Llovera, yang di dalamnya terdapat kutipan Ferarri dengan judul *Il Popolo* yang mengatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai

¹¹¹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, h.m. 17.



kemerdekaan dan persatuan.¹¹² Buku-buku pemberian L. van Rickvorsel ketika memasuki MLS ini memberi landasan idiil pada Kasimo untuk memperjuangkan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Secara spiritual, nilai-nilai humaniora yang menjadi landasan kepribadian Kasimo menjadikan dirinya memiliki motivasi dan cita-cita yang besar bagi masyarakatnya. Hal itu tidak lepas dari nilai-nilai yang terinspirasi dari pribadi van Lith dan ajaran van Driessche. Salah satu faktor yang sangat menentukan kepribadian Kasimo dari van Lith ialah sifat perikemanusiaan, kerakyatan, kesederhanaan, kejujuran dan keberanian serta toleransi terhadap golongan lain.¹¹³ Sifat kerakyatan, perikemanusiaan, keberanian dan toleransi terhadap golongan lain itu nantinya diteladani dan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakatnya, dengan semboyan/motto "*salus populi suprema lex*" (kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi) dan "*pro bono publico*" (demi kepentingan umum).

Selain itu suatu hal yang menjadi pedoman Kasimo dalam perjuangannya sehingga dirinya ingin terjun dalam bidang hal politik nanti ialah artikel atau brosur yang dikeluarkan van Lith tahun 1922 dalam majalah *Studien* dengan judul *De politeik van Nederland ten opzichte Nederland Indie* (Politik Negeri Belanda terhadap Hindia Belanda). Artikel ini merupakan ajakan kepada orang-

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

orang Indonesia untuk berjuang bersama dia yang di dalamnya berisikan antara lain berbunyi demikian:

“Jika persetujuan kalian dapat memperkuat suara saya yang lemah ini maka saya yakin bahwa suara saya ini akan menggugah seluruh Negeri Belanda dan akan membawa apa yang kalian cita-citakan. Agar Pulau Jawa tumbuh dan menjadi Hindia Belanda dan seluruh Nusantara mengalami masa jayanya, dan akhirnya dilahirkan kembali untuk menempati tempat terhormat di antara bangsa-bangsa lain”.¹¹⁴

Terlebih lagi suatu hal yang mendorong secara khusus ialah kata-kata Van Lith yang nantinya memantapkan pendirian dan keberanian Kasimo untuk berjuang pada tanah airnya ialah “*Jangan takut tulisan saya adalah seruan kepada kamu sekalian untuk berdiri di belakang saya...*”.¹¹⁵ Seruan tersebut tertuju pada siswa-siswanya (siswa *Kweekschool* Muntilan) di antaranya I.J. Kasimo dan teman-temannya F.S. Haryadi, dan R.M. Soedjadi, yang memberikan motivasi yang cukup berarti bagi mereka untuk berjuang bagi bangsa dan negaranya, yang dilakukan dengan jalan mendirikan partai (PPKD/Partai Katolik Jawa) yang berjuang di pihak rakyat.

Selain ajakan dari van Lith, inspirasi ajaran Kristiani tentang Perintah Keempat dari Sepuluh Perintah Tuhan yaitu “Hormati bapak ibumu” dari penafsiran van Driessche, bahwa hendaknya seseorang hormat dan cinta pada tanah air dan negara.¹¹⁶ Ajaran mengenai cinta tanah air memiliki arti

¹¹⁴ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hal. 184.

¹¹⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hal. 26

¹¹⁶ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 184.

yang sama dengan menghormati ayah ibu. Menurut I.J. Kasimo hubungan penghormatan antara ayah-ibu dan tanah air diartikan sebagai berikut:

“...bahwa segala bangsa turun dari seorang bapa dan seorang ibu, berhamburan di atas bumi, merupakan suatu rumah tangga terbesar, dihubung dengan ikatan darah dan asal bersama-sama; sama zat-nja dan sama haknja. Tak adalah bangsa, jang dengan sendirinya lebih mulia dalam segala-galanya daripada bangsa lain...”¹¹⁷

Penanaman nilai dari ajaran ini dijadikan sebagai dasar perjuangan I.J. Kasimo untuk mewujudkan perannya dalam kehidupan bernegara. Ungkapan I.J. Kasimo itu membuktikan bahwa dirinya memiliki jiwa nasionalis atau cinta pada tanah air.

Sebagai seorang Indonesia dan seorang Katolik, ia juga memiliki suatu cita-cita dan misi selain berkewajiban untuk berjuang demi tercapainya kehormatan dan keagungan tanah air juga berjuang bagi gerejanya yang hal itu dengan berlandaskan pada semboyan/motto “*pro ecclesia et patria*” (untuk gereja dan tanah air), yang artinya bahwa perjuangannya tidak hanya untuk tanah air saja tetapi juga dalam gereja/umat Katolik di Indonesia untuk maju bersama. Maka ketika memasuki dunia politik (dengan membentuk Partai Katolik), I.J. Kasimo bercita-cita atau membawa misi bahwa untuk mewujudkan keberhasilan bangsa Indonesia dan juga mewujudkan pemerintahan yang baik; sedangkan pemerintahan yang baik itu ialah pemerintahan yang menjamin kebebasan

¹¹⁷ I.J. Kasimo, *Dasar Perjuangan Kami*, Jogjakarta: Canisius, 1948, hlm. 8.

fundamental seperti kebebasan beragama, kebebasan menerima pendidikan, kebebasan menerima layanan pendidikan dan lain-lain.¹¹⁸

Untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya itu, I.J. Kasimo terlibat dalam bidang politik guna memperjuangkan aspirasi umat/komunitas Katolik. Ia yakin bahwa hanya dalam negara Indonesia yang berdaulat dan bangsa yang merdeka, umat Katolik dapat berkembang dengan aman dan baik dalam melaksanakan gereja dan dapat melaksanakan tugas manusiawinya dengan tenang dan tenteram.¹¹⁹

Demi mewujudkan *pro ecclesia*, I.J. Kasimo secara khusus memperhatikan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang bertitik tolak pada pedoman ajaran sosial gereja. Pedoman Ajaran Sosial Gereja diinspirasi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pedoman Ajaran Sosial Gereja yang menjadi inspirasinya ialah *Rerum Novarum*, yaitu berisi ajaran sosial tentang kaum pekerja yang dikeluarkan di Roma oleh Paus Leo XII tanggal 15 Mei 1891 dan *Quadragesimo Anno*, yang berisi tentang penataan kembali tatanan sosial, yang dikeluarkan di Roma oleh Paus Pius tanggal 15 Mei 1931.¹²⁰ Melalui dokumen ajaran sosial Gereja itu, Paus mengajak umat Katolik untuk membangun masyarakat dari segala keprihatinan sosialnya. Di dalam dokumen tersebut terdapat pedoman tersebut memuat prinsip-prinsip sosial, antara lain: *bonum*

¹¹⁸ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 23.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Piet Go O'Carm (ed), *Ajaran Sosial Gereja Dalam Konteks Indonesia*, Malang: Dioma, 1991, hlm 1; Tim Penulis, "10 Tahun Sidang Terakhir Dewan Partai Katolik", dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1983, hlm. 9.

commune (kesejahteraan umum), *solidaritas* (kesetiakawanan), *subsidiaritas* (membantu), serta beberapa asas dan pedoman-pedoman kerasulan awam dalam bernegara dan bermasyarakat.

Salah satu asas yang diinspirasikan dalam ajaran itu ialah pada *Encycliek Quadagesimo Anno 22 II 2*, yakni: bahwa di dunia ini dijadikan untuk kebahagiaan manusia, bahwa semua manusia itu ber-Bapa satu ialah Tuhan, yaitu akhirnya segala tujuan (dalam *Encycliek Rerum Novarum* alinea 118). Asas tersebut kemudian dijadikan asas Partai Katolik pada pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, asas mengenai sikap solidaritas dengan menganjurkan cinta sosial dan keadilan sosial (berdasar *Encycliek Quadragessimo Anno 115*) yang kemudian ditetapkan pada pasal 2 ayat 2 asas Partai Katolik.¹²¹

Penerapan I.J. Kasimo sebagai kaum awam Katolik mengenai mengenai Ajaran Sosial Gereja dalam karya kerasulan awam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat nantinya mendapat perhatian dari pimpinan Gereja Katolik di dunia. Pada tahun 1952, I.J. Kasimo menerima gelar kehormatan dari Sri Paus dengan gelar *Komandu Ordo Santu Silvester* dengan bintang perak besar.¹²²

¹²¹ I.J. Kasimo, "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia: 1923-1953", dalam *Suara Katolik*, No. 4 Tahun 4, April 1953, Djakarta, hlm. 23-31. (Lihat pada lampiran 7, hlm. 214.)

¹²² Lihat pada lampiran 1, hlm. 208.

BAB III.

PERAN I. J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA 1921-1973

A. Peran I. J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara Pada Masa Kolonial 1921-1945

Sejak berdirinya Budi Utomo di tahun 1908 dan Trigoro Darmo di tahun 1915, banyak golongan muda Katolik ikut bergabung dengan organisasi tersebut karena organisasi-organisasi itu tidak membedakan golongan agama tertentu, kendati menerima semua orang pribumi, khususnya yang berasal dari Jawa. Dengan demikian sampai awal tahun dua puluhan masih banyak orang dari kalangan pemuda Katolik menjadi aktivis ataupun pimpinan di cabang-cabang organisasi tersebut di atas.¹²³

Memasuki tahun 1917, ketika organisasi dan partai politik khusus dari Pemerintah Hindia Belanda untuk golongan Katolik dibentuk di tahun 1917, banyak pemuda Katolik pribumi turut menggabungkan diri dalam IKP (*Indische Katholieke Partij*), karena menganggap bahwa partai tersebut dapat menyalurkan aspirasi atau inspirasi mereka. Alasan ini pernah dikatakan oleh I.J. Kasimo dalam tulisannya yang berbunyi:

“... maka waktu belum ada jalan lain banjak penduduk Katolik Indonesia jang menjadi anggota partai jang berdasar neutraal, jang pada waktu itu sudah ada, ialah Boedi Oetomo, ja malahan tidak sedikit jang

¹²³ Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 18.

terpilih menjadi pengurus tjabang² partai itu, suatu bukti bahwa dalam penguasaan tertjapainya tjita² nasional mereka mendapat kepertjayaan dari lain² anggota yang berbeda azas kejakinannya. Tetapi lambat laun timbullah keinsjafan, yang makin lama makin mendalam, bahwa partai yang berdasar neutraal itu bukan tempatnya bagi orang Katolik.”¹²⁴

Seiring terdapatnya pemekaran dan perkembangan gereja di seluruh Indonesia dengan angka 2435 orang Katolik pribumi dari 30 juta penduduk Pulau Jawa, di tahun 1915,¹²⁵ serta sangat sedikitnya keterwakilan kuota perolehan kursi dalam *Volksraad* (di mana IKP hanya memperoleh satu kursi di tahun 1918-1921 dan dua kursi di tahun 1921-1924), dan itupun yang diikutsertakan ialah orang Katolik Belanda/Eropa,¹²⁶ sehingga seringkali menyebabkan adanya ketidakadilan dalam politik, karena tidak diikutsertakannya pribumi, khususnya pribumi Katolik dalam hak bersuara dan keterwakilan politik dalam *Volksraad*. Hal itu menimbulkan dorongan dari pemuda Katolik pribumi di Jawa untuk mendirikan partai yang diharapkan bisa mewadahi aspirasi pribumi Katolik dalam *Volksraad*. *Volksraad* ini dibentuk tahun 1917 pada pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. van Heutz berdasarkan peraturan/undang-undang *Wet op de Staats inrichting van Nederlandsch-Indie* atau disebut *Indische Staatsregeling* (IS) yang teksnya diumumkan dalam S.1925 No.447.¹²⁷

¹²⁴ I.J. Kasimo, “30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia: 1923-1953”, dalam *Suara Katolik*, No 4. Tahun 4, April, 1953, Djakarta, hlm. 5.

¹²⁵ M.P.M. Muskens, Pr., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia. Pengintegrasian di Alam Indonesia*, Jakarta: Dokpen MAWI. 1973, hlm. 243-246.

¹²⁶ *ibid.*, hal. 230-244.

¹²⁷ B.P. Paulus, *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, Alumni: Bandung, 1979, hlm. 31.

Selain anggota-anggota yang beragamakan Katolik menginginkan keluar dari Budi Utomo, terdapat juga alasan lain dalam upaya pembentukan PPKD, yaitu mulai bertambahnya jumlah keanggotaan non Katolik dan adanya kesadaran yang makin mendalam bahwa partai yang berdasar netral dan umum, sangat sedikit bahkan tidak memperhatikan masalah-masalah khusus dan minoritas dari pihak Katolik. Dengan kata lain, Budi Utomo sebagai organisasi netral tidak dapat memperhatikan kepentingan agama tertentu seperti Katolik karena terdapat cara-cara yang berbeda (yang didasarkan pada asas atau keyakinan yang berbeda pula), meskipun untuk mencapai satu tujuan ialah sama dan umum yaitu ketercapainnya persamaan keinginan nasional yang merdeka dan berdaulat.¹²⁸ Perbedaan asas dan keyakinan menyebabkan golongan Katolik keluar dari keanggotaan Budi Utomo yang didasarkan pada alasan pemikiran I.J. Kasimo, bahwa:

“sebab meskipun kita dengan partai-partai nasional itu mempunyai banyak kepentingan-kepentingan nasional bersama, namun di sana kita merasa kekurangan banyak satu hal sangat penting, yaitu perhatian terhadap soal agama Katolik di bidang politik. Memang sewajarnya bahwa, suatu partai netral tidak dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan agama, dan berdasarkan asas-netralnya malahan tidak boleh berbuat demikian, lain dari pada itu, meskipun tujuan-tujuan nasional golongan Katolik. Bangsa kita sama dengan tujuan partai-partai netral: namun penentuan memilih syarat-syarat, untuk mencapai tujuan tersebut dapat berlainan sama sekali, karena asas dan keyakinan berlainan.”¹²⁹

¹²⁸ I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjooangan Politik Katholik Indonesia*, Djakarta, Dewan PKRI, 1949, hlm. 18

¹²⁹ I.J. Kasimo, “Maka Lahirlah Dia: Partai Katolik”, dalam *Warta Partai Katolik*, Edisi Khusus Pemilu 1971, Jakarta, 1971, hlm. ; M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 234.

Berdasarkan alasan pemikiran dan keyakinan yang berlainan itu, maka orang-orang Katolik Jawa berpindah dari Budi Utomo masuk ke *Indische Katholieke Partij* (IKP). Namun menurut I.J. Kasimo, IKP ini merupakan Partai Katolik-nya orang Belanda yang beragama Katolik yang sama namun mempunyai aspirasi serta pemikiran yang jauh berbeda.¹³⁰ Keinginan I.J. Kasimo sebagai orang Jawa yang beragama Katolik ingin membentuk suatu Partai Katolik agar orang-orang Katolik Jawa dapat menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Hindia-Belanda.

Maka pada tahun 1922 di Yogyakarta, I.J. Kasimo bersama F.S. Haryadi dan R.M. Yakob Sujadi membentuk persiapan untuk mendirikan Partai Katolik yang dimaksud tersebut. Selanjutnya secara politis, I.J. Kasimo rekannya (F.S. Haryadi dan Yakob Sujadi) menggunakan taktis-politis dengan cara kooperatif (kerja sama) dari partai yang akan dibentuk nanti menjadi bagian IKP. Taktik tersebut dilakukan demi memperoleh izin dari hirarki gereja.

Setelah mencapai jalan kompromi dengan pihak IKP, maka pada tanggal 5 Agustus 1923 di Yogyakarta, secara resmi Partai Katolik untuk orang Jawa terbentuk, dari sebelumnya (di tahun 1918) bernama *Katholieke Vereeniging Voor Politieke Actie* menjadi bernama *Katholieke Vereeniging Voor Politiek Actie Afdeling Katholieke Javanen* atau Perkumpulan Katolik untuk Aksi Politik Bagian orang-orang Jawa, atau disebut juga Pakempalan Politik Katolik

¹³⁰ Tashadi, dkk., *loc.cit.*, hlm. 193.

Djawi (PPKD). Dalam kepengurusannya, PPKD terdiri dari tiga orang, mula-mula F.S Haryadi sebagai ketua, I.J. Kasimo sebagai sekretaris, dan R.M. Yakob Sujadi sebagai bendahara. Namun setelah setahun kemudian (1924), I.J Kasimo menjabat sebagai ketua PPKD.¹³¹

Semula I.J. Kasimo dan kawan-kawannya, dalam mendirikan partai bertujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, tetapi tidak mungkin dipropagandakan secara eksplisit karena suasana jaman itu ialah penjajahan dan tidak mungkin dicantumkan dalam tujuan partai. Maka, I.J. Kasimo dan kawan-kawannya memiliki siasat dengan mencantumkan tujuan yaitu “ikut serta berusaha membangun dan memajukan negara” sebagai “kamufase” dari tujuan sebenarnya, sehingga pemerintah Hindia Belanda mengakui dengan cepat dengan adanya partai baru ini. Berdasarkan tujuan tersebut, PPKD memiliki tiga pedoman pokok, yaitu: a) aksi PPKD terletak pada lapangan politik yaitu politik yang berdasarkan asas-asas Katolik; b) aksi PPKD bersifat pada permulaan lokal Jawa, kemudian nasional Indonesia; c) haluan PPKD harus “evolusioner”, yang artinya bertahap/perlahan dengan cara-cara moderat dan kooperatif.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjjoangan Politik Katholik Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 18.; Tashadi, dkk., *op.cit.*, hl n. 189.

Memasuki tahun 1925, PPKD menjadi partai politik yang mandiri/otonom kendati masih terikat dalam suatu hierarki gereja (Vikariat Apostolik Batavia). Dengan demikian keterwakilan politik yang dimiliki oleh PPKD ini ialah dengan berhak duduk dalam *Volksraad*. Sejak menjadi anggota *Volksraad* (1931),¹³³ I.J. Kasimo mulai melakukan beberapa usaha perjuangan berupa prasaran dalam Sidang *Volksraad* untuk membebaskan rakyat dari ketertindasan.

Dengan keikutsertaan dan keterlibatannya dalam *Volksraad* ini, pengabdian I.J. Kasimo kepada rakyat Indonesia yang terpendam akhirnya dapat diwujudkan. Perjuangannya itu juga merupakan tanggapan kelanjutan atas seruan dan perjuangan oleh Frans van Lith, pendahulunya dalam brosurnya yang berbunyi:

“Dengarkanlah dan usahakanlah dengan sungguh-sungguh. Karangan saya ini saya maksudkan sebagai seruan bagi kalian untuk berdiri di belakang saya, agar tanah Jawa berkembang menjadi Hindia, ya menjadi seluruh Nusantara akhirnya akan mengalami masa jayanya- dan timbul kembali, guna menduduki tempat terhormat di kalangan bangsa-bangsa”.¹³⁴

Brosur tersebut merupakan suatu ajakan dari Van Lith kepada I.J. Kasimo dan rekan-rekannya sebagai anak bangsa untuk memperjuangkan rakyat Indonesia baik tanah Jawa maupun seluruh Nusantara ke arah masa jaya atau kemerdekaan.

¹³³ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 33.

¹³⁴ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 280-281.

Perjuangan I.J. Kasimo di dalam *Volksraad* di tahun-tahun pertama memang ditujukan untuk meyakinkan para pemimpin golongan lain, bahwa golongan Katolik Indonesia adalah orang-orang nasionalis seperti golongan lainnya yang dilakukan dengan jalan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.¹³⁵ Dalam usahanya memperjuangkan kepentingan rakyat, I.J. Kasimo sebagai anggota *Volksraad* mula-mula banyak memfokuskan perhatiannya khususnya dalam bidang pertanian dan pendidikan,¹³⁶ meskipun nantinya aspek-aspek lain juga diperjuangkannya baik ekonomi sosial, agama, maupun aspek politik atau ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda.

Mengenai peranannya dalam bidang pertanian dan pendidikan yang menyangkut aspek sosial dan budaya masyarakat akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Peranan I.J. Kasimo ketika duduk dalam *Volksraad* dalam kehidupan bernegara ini akan dibahas mengenai usahanya dalam bidang politik dan ketatanegaraan. Usaha yang dilakukan I.J. Kasimo dalam hal politik dan ketatanegaraan, ialah mengadakan perombakan di bidang ketatanegaraan, politik-ekonomi, dan sosial melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan bersifat kooperatif.¹³⁷

¹³⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 39.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Langkah pertama yang dilakukan I.J. Kasimo dalam bidang ketatanegaraan ialah berupa pernyataan politik, yang disampaikan dalam sidang *Dewan Volksraad* pada tanggal 19 Juli 1932. Dalam pernyataan itu I.J. Kasimo menghimbau dan menuntut suatu pembaharuan politik yang memungkinkan bangsa dan rakyat Indonesia mengurus kepentingannya sendiri untuk mencapai kesejahteraan yang ia harap dan cita-citakan. Dasar pemikiran itu tersirat dalam pernyataannya yang berbunyi:

“ Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa dengan kebutuhan nasional, yaitu sesempurna mungkin.

Ini berarti bahwa negeri Belanda sebagai negara berbudaya yang terpanggil mempunyai kewajiban untuk ikut mengembangkan seluruh rakyat dan khususnya sebagai negara penjajah, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat, sehingga dengan demikian dapat dicapai kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah negara sendiri.”¹³⁸

Pernyataan I.J. Kasimo di atas merupakan suatu pengajuan diadakannya bentuk negara yang “memerintah negara sendiri” atau menghendaki adanya otonomi pemerintahan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Kendati hal itu tidak diterima oleh IKP karena kebijaksanaan negara tidak perlu seperti apa yang

¹³⁸ M.P.M. Muskens, Pr., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Pengintegrasian di Alam Indonesia*, Jakarta: Doken MAWI, 1973, hlm. 38.

nantinya ternyata akan paling sesuai bagi golongan pribumi untuk memerintah sendiri.¹³⁹

Setelah mengalami penolakan usulan dalam Sidang *Volksraad*, I.J. Kasimo bersama tokoh moderat kooperatif lainnya seperti Moh. Hoesni Thamrin, Soetardjo Kartohadikusumo, Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Soekardjo Wirdjopranoto, Wurjayaningrat dan Dr. Sam Ratulangi melakukan kolaborasi politik dengan mengusahakan untuk mempersatukan gerakan nasional Indonesia. Hal ini diharapkan karena dengan mengumpulkan pemimpin-pemimpin Indonesia dari berbagai daerah dan menghadapkan mereka pada masalah-masalah bersama, terutama hubungan mereka dengan Belanda.¹⁴⁰

Seiring dengan meluasnya relasi PPKD di tengah-tengah partai yang saling berkolaborasi, pengaruh kepartaian dan politik dari PPKD sendiri lambat laun mulai berkembang luas seiring peningkatan perjuangan golongan nasionalis seperti munculnya *Indische Partij*, PNI, Perhimpunan Indonesia, dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi sikap dan pandangan PPKD yang makin meluas, yaitu Partai Katolik yang dikehendaki tidak hanya melingkupi orang Katolik Jawa saja tetapi juga mencakup seluruh masyarakat Indonesia.

Di samping berelasi dengan partai lain, PPKD juga melakukan sosialisasi partainya denganewartakan, menginformasikan sekaligus mempropagandakannya lewat suatu surat kabar yang diterbitkan di tahun 1924

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

dengan nama “Suara Katolik”. Alasan dasar penerbitan “Suara Katolik” ini ialah untuk menguatkan organisasi, menanam, memperdalam keyakinan, membangkitkan kesadaran, menyiarkan dan memperkembangkan pandangan-pandangan Katolik di depan umum/publik, sehingga diharapkan berfaedah untuk memperkuat cita-cita PPKD.¹⁴¹ Dengan media surat kabar ini, membuka cakrawala umat Katolik yang tersebar di nusantara untuk mengadakan suatu integrasi. Penerbitan surat kabar “Suara Katolik” ini juga bersifat politis, yaitu bahwa PPKD mulai mengorientasikan pergerakannya yang bukan hanya bersifat lokal (bukan hanya khusus untuk golongan Katolik Jawa saja) melainkan juga mewujudkannya menjadi sebuah partai nasional.

Dari beberapa pengaruh yang berkembang di atas nantinya di tahun 1930 terjadi pengubahan nama partai dari Pakempalan Politik Katolik Djawa (PPKD) menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI). Jika semula bernama PPKD hanya mempunyai cabang-cabang di Jawa Tengah saja, maka sejak Partai Katolik berganti format menjadi PPKI. PPKI memiliki beberapa cabang daerah kepartaian sebagai pelebaran sayap politiknya, yaitu cabang Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang, dan setelah memasuki tahun 1941, PPKI telah mempunyai 41 cabang.¹⁴²

¹⁴¹ Tim Penulis, “50 Tahun Perjuangan Partai Katolik di Indonesia”, dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1973, hlm. 12.

¹⁴² Y. Heri Siswanto, “I.J. Kasimo dan Partai Katolik”, dalam Majalah *Driyarkara*, Jakarta: Seksi Publikasi Mahasiswa STF Driyarkara, 1996, hlm. 26-27.

Proses berkembangnya Partai Katolik di seluruh Nusantara ini nantinya juga membawa pengaruh pada I.J. Kasimo sebagai Ketua Umum PPKI, bahwa kepercayaan masyarakat yang besar kepadanya atas aspirasi yang mewakili suara nurani rakyat Indonesia umumnya dan umat Katolik Indonesia khususnya. Pengaruh besar yang dimiliki I.J. Kasimo dalam *Volksraad* disebabkan karena dirinya mendapat dukungan di beberapa daerah cabang, sehingga keterwakilan PPKI itu terus berlanjut dengan tetap duduknya I.J. Kasimo dalam *Volksraad* selama sidang tahun 1931-1935, 1935-1939 dan 1939-1943.¹⁴³

Kepercayaan masyarakat Indonesia khususnya golongan Katolik kepada I.J. Kasimo ini tidak ia sia-siakan dan selalu terus diperjuangkan dalam beberapa program partainya. Program itu meliputi: usaha memperjuangkan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, pembentukan undang-undang sosial, peningkatan serta perluasan dalam bidang pendidikan dan memperbaiki kesehatan masyarakat umumnya.¹⁴⁴ Contoh konkret programnya dalam bidang kenegaraan yaitu meliputi dalam usaha memperjuangkan desentralisasi kekuasaan pemerintahan dengan dikeluarkanlah usulan dalam sidang *Volksraad* mengenai hak mengatur dan memerintah negara sendiri dan persetujuan dari

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 36.

hirarki gereja dan IKP tentang PPKI untuk diberi wewenang yang mewakili pada daerah-daerah di luar Jawa.¹⁴⁵

Perjuangan I.J. Kasimo dalam aspek politik dan ketatanegaraan ini tak pernah surut meskipun mengalami penolakan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda. Usaha itu tetap diteruskan pada masa pemerintahan Hindia Belanda selanjutnya yang dipegang oleh Gubernur Jenderal de Jonge. Ketika pemerintahan Hindia Belanda dijabat oleh Gubernur Jendral de Jonge (1933-1934) membawa perkembangan politik yang semakin buruk. Buruknya perkembangan politik itu dirasakan bagi beberapa organisasi pergerakan yang menganut asas non-kooperasi mendapat tekanan dari pemerintah dan tidak mendapat peluang mencari keterwakilan suara dalam *Volksraad*. Tekanan pemerintah itu dialami oleh para pemimpin organisasi pergerakan, seperti Sukarno mewakili PNI ditangkap dan diasingkan.¹⁴⁶

Melihat tekanan yang besar dari Pemerintah Hindia terhadap bangsa Indonesia memunculkan perasaan tidak puas dari beberapa tokoh organisasi, seperti Sutardjo Kartohadikusumo, Dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Alatas, Ko Wat Tjong dan I.J. Kasimo. Para tokoh tersebut memiliki motivasi yang sama untuk memerdekakan bangsa dari pengaruh tekanan pemerintah Hindia Belanda. Keinginan bersama para tokoh tersebut disampaikan dalam

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

Sidang *Volksraad* dalam bentuk “Petisi Sutarjo” yang diajukan pada tanggal 15 Juli 1936.¹⁴⁷

Usul Sutarjo Kartohadikusumo itu antara lain berisikan agar diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dengan utusan Kerajaan Belanda yang akan menetapkan masa depan Indonesia dengan harapan dalam jangka waktu 10 tahun Indonesia dapat berdiri sendiri meskipun tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Petisi Sutarjo ini ditandatangani oleh enam orang, yaitu Sutarjo Kartohadikusumo, Dr. Sam Ratulangi, Datuk Tumenggung, Alatas, Ko Kwat Tiong dan I.J. Kasimo.¹⁴⁸

Dalam Petisi Sutarjo ini, I.J. Kasimo sangat mendukung dan memperjuangkannya, karena alasan prinsipil (Petisi Sutarjo sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Katolik, tentang kenegaraan dan sosial) dan alasan ekonomi (kerjasama ekonomi antara pemerintah Hindia Belanda dan negeri Belanda tidak terjadi keseimbangan dan hanya menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah).¹⁴⁹ Untuk mendukung Petisi Sutarjo ini, dibentuklah Sentral Komite Petisi Sutarjo yang dipimpin oleh Mr. Sartono, dan I.J. Kasimo yang duduk sebagai anggota panitia. Dukungan I.J. Kasimo dalam Petisi Sutarjo ini nampak nyata selain ikut menandatangani dan mengajukannya juga mengungkapkan dalam tulisannya yang menyatakan:

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 196.

¹⁴⁹ *Ibid.*

*"Sifatnya sungguh-sungguh. Dan meskipun agak cenderung ke nasionalisme paling tegas, namun mampu mempertahankan pendiriannya sendiri."*¹⁵⁰

Untuk membantu agar di Nederland Petisi Sutarjo diterima baik oleh ratu dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka selama tahun 1937-1938 di Hindia Belanda diadakan aksi-aksi massa. Aksi massa tersebut dilakukan oleh I.J. Kasimo sendiri (selaku anggota Sentral Komite Petisi Sutarjo¹⁵¹) dengan berperan dalam parlemen. Di dalam aksi berpalemen, I.J. Kasimo berperan sebagai salah seorang pemimpin terkemuka yang berjuang dalam pembentukan parlemen sendiri lengkap dengan menteri-menteri yang bertanggung jawab di Indonesia.¹⁵²

Meskipun telah ditempuh beberapa usaha perjuangan untuk mempertahankan usul atau Petisi Sutarjo, alhasil mengalami penolakan oleh pemerintah Nederland pada tanggal 16 November 1938. Penolakan Petisi Sutarjo ini tentunya menimbulkan kekecewaan di pihak panitia komite dan pendukungnya, sehingga memunculkan reaksi dan aksi untuk membentuk suatu federasi, di mana partai politik yang ada menyusun kekuatan di luar badan perwakilan *Volksraad* tersebut. Maka pada tanggal 21 Mei 1939, muncul organisasi pergerakan politik dengan nama Gabungan Politik Indonesia

¹⁵⁰ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 283.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid*

(GAPI), yang di dalamnya terdiri dari organisasi politik yaitu PPKI, Parindra, Gerindo, PSII, PII, Persatuan Minahasa dan Pasundan.¹⁵³

Dalam GAPI sendiri memiliki beberapa tuntutan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Tuntutan GAPI meliputi: 1) hak menentukan nasib sendiri; 2) nasionalisme dalam bidang politik, sosial dan ekonomi; 3) parlemen yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada rakyat; 4) pembentukan solidaritas antara Indonesia dan Belanda untuk melawan *fasisme*; 5) peng-Indonesia-an berbagai jabatan dalam pemerintahan di Hindia Belanda/Indonesia.¹⁵⁴ Pada realisasinya keberadaan GAPI sebagai gerakan massa politik dengan beberapa tuntutannya itu tidak begitu mengenai sasaran yang ditujukan kepada Pemerintah Nederland. Meskipun demikian, GAPI ini berdampak positif bagi pengintegrasian bangsa Indonesia yang tentunya mengarah nasionalisme yang lebih kuat, yaitu dimilikinya sifat kebangsaan atau mengarah pada kebersamaan dalam kehidupan berbangsa yang terintegrasi dari beberapa elemen kepertaian.

Kerjasama serta kegiatan bersama semua partai di dalam GAPI kemudian memberikan dampak nasional (bersifat dan berscope nasional dan tidak bersifat kedaerahan lagi), yang orientasinya secara bersama-sama dalam ikatan persatuan kebangsaan. Ikatan yang mengintegrasikan itu diwujudkan dalam Kongres Rakyat Indonesia pada tanggal 25 Desember 1939 yang menetapkan

¹⁵³ Tashadi, ckk., *loc.cit.*, hlm. 167.

¹⁵⁴ G. Moedjanto, *loc.cit.*, hlm. 63-64.

bendera Merah-Putih sebagai bendera persatuan, Lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan, serta Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.¹⁵⁵

Kerjasama serta kegiatannya di dalam GAPI memberikan dampak politik pada I.J. Kasimo sendiri baik dirinya sebagai pemimpin partai (PPKI) maupun politikus. Hal itu nampak dari segala langkah konstitusional, bahwa PPKI selalu menyumbangkan andilnya. Dengan demikian citra golongan Katolik di dalam *Volksraad* dan di mata kaum nasionalis lainnya semakin menanjak, serta persepsi yang keliru tentang Partai Katolik (PPKI) yang dianggap pro Belanda mulai terlihat nyata. Maka dengan adanya kondisi yang baik ini, jalan menuju peran dan partisipasi politik yang lebih besar dari I.J. Kasimo selaku wakil dari golongan Katolik Indonesia dalam masa-masa selanjutnya, termasuk masa setelah proklamasi kemerdekaan mulai terbuka lebar.

Dengan berelasi dan bersosialisasi yang baik dalam GAPI ini memberikan dampak positif secara pribadi dalam politik bagi pihak I.J. Kasimo sendiri, yaitu lebih mendekatkan serta memperluas hubungannya dengan pemimpin-pemimpin nasional lainnya. Dengan kerjasama yang baik antara I.J. Kasimo dengan para pemimpin lain, seperti Mr. Amir Syarifuddin nantinya membawa pertimbangan politis berikutnya. Ketika menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1947, Mr. Amir Syarifuddin merekrut I.J. Kasimo sebagai Menteri Muda Kemakmuran. Rekrutmen politik¹⁵⁶ tersebut, didasarkan pada pertimbangan

¹⁵⁵ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit*, hlm. 42.

¹⁵⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992, hlm. 118.

bahwa I.J. Kasimo memahami tentang pertanian rakyat dan pernah akrab dengan Amir Syarifudin ketika berjuang bersama dalam GAPI ini.

Usaha-usaha untuk melepaskan diri dari penjajah dan menuntut kemerdekaan dalam hal berpolitik di dalam *Volksraad* ini memang pada kenyataannya sangat sulit terwujud. Beberapa kali masa sidang *Volksraad*, I.J. Kasimo mendapat penolakan dari Pemerintah Hindia Belanda. Hal itu terus berlanjut sampai dewan ini bubar seketika setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. .

Setelah Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral van Stakenborg Stachouwer dan Letnan Jendral Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jendral Hitoysi Imamura di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia dikuasai oleh tentara Jepang.¹⁵⁷ Memang pada awalnya Jepang menduduki Indonesia dengan usaha mengambil simpati rakyat dengan semboyan Tiga A-nya (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia). Tetapi pendudukan Jepang yang dilakukan oleh pemerintahan militer ini pada pelaksanaannya tidak lebih dari penjajahan yang lebih berat bagi pihak pribumi. Pendudukan dan penjajahan Jepang ini memberikan dampak kepada masyarakat dengan menanggung penderitaan yang besar, terlebih bagi golongan Katolik.

¹⁵⁷ Tashadi,dkk., *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: ISDN, 1993, hlm. 166.

Untuk memperoleh dukungan dan mendapat simpati dari rakyat, Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pembentukan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) oleh Jepang pada tanggal 14 April 1943 dengan memasukkan Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara ialah salah satu bentuk taktiknya yang bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdikan kepada usaha perang Jepang.¹⁵⁸

Dengan dibentuknya PUTERA sebagai kekuatan politik tunggal bagi Indonesia, maka kekuatan politik Partai Katolik menjadi tidak berpengaruh lagi. Dengan kata lain Partai Katolik diinternir atau tidak diberlakukan lagi oleh Jepang untuk berdiri di Indonesia. Hal itu disebabkan bahwa Partai Katolik merupakan partai berhaluan agama Kristiani atau agama dari Barat yang dianggap sebagai musuh bagi pihak Jepang.¹⁵⁹

Meskipun pengaruh kekuatan politik dari Partai Katolik telah ditiadakan oleh Jepang namun dukungan I.J. Kasimo terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sangatlah besar. Dukungan I.J. Kasimo terhadap proklamasi itu terlihat dalam pernyataannya bahwa ia sangat setuju dengan adanya revolusi

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ M.P.M. Muskens, Pr., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Pengintegrasian di Alam Indonesia*, Jakarta: Dokpen MAWI, 1973, hlm. 303.

Indonesia dengan pernyataan kemerdekaan itu, dan ia memutuskan bahwa golongan Katolik Indonesia wajib ikut berjuang, bila perlu berkorban demi revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.¹⁶⁰

Peran politik I.J. Kasimo pada masa pendudukan Jepang lainnya juga terlihat pada tahun 1942, ketika ia dipekerjakan oleh tentara Jepang untuk menjabat di kantor Jawatan Pertanian Surakarta sebagai *adjun landbouw counsult* (sebagai pegawai tinggi) di bawah Sri Susuhunan Pakubuwono XI. Jabatan sebagai *adjun landbouw counsult* ini secara birokratis, memberikan pengaruh politik pada I.J. Kasimo untuk berperan dalam kehidupan politik di bawah pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono XI yaitu dengan memajukan para pejabat pemerintah daerahnya di antaranya para matri dan demang itu untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat.¹⁶¹

B. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara Pemerintahan RI Pada Masa Demokrasi Liberal 1945-1955

Setelah Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dirancanglah beberapa usaha PPKI (Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan negara setelah terjadi

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Tashadi.dkk., *op.cit.*, hlm. 169.

pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.¹⁶² Usaha PPKI pada pasca kemerdekaan ialah dengan membentuk alat-alat dan lembaga negara, antara lain: *pertama*, menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945; *kedua*, mengangkat Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI pada tanggal yang sama; dan *ketiga*, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pengganti PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945.¹⁶³ Setelah terbentuknya KNI ini, I.J. Kasimo ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk menjadi anggota KNIP (KNI tingkat Pusat) ketika dibuka sidang pertama KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945.¹⁶⁴

Setelah memasuki pasca kemerdekaan, dunia perpolitikan Republik Indonesia yang baru berdiri ini sedang dalam upaya penataan dan pengembangan politiknya, sehingga tidak dapat dipungkiri bila masa kepresidenan Sukarno sebagai kepala pemerintahan seringkali mengalami pasang surut baik di tubuh partai maupun di tubuh pemerintahannya. Pasang surut kepartaian itu dimulai sejak dimulainya perubahan sistem kepartaian pada tanggal 3 November 1945 dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah, yang isinya menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai dengan alasan bahwa partai-partai yang terbentuk tersebut digunakan sebagai sarana

¹⁶² G. Modejanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 85.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 48; M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 315. (Lihat pada lampiran 15, hlm. 234.)



perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.¹⁶⁵

Ketetapan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 oleh Moh. Hatta memunculkan antusiasme dari masyarakat dengan ditandai munculnya berbagai partai baik partai lama maupun partai yang baru. Partai-partai yang bermunculan itu antara lain: Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang merupakan badan federasi partai-partai Islam yang dibentuk oleh Jepang (7 November 1945) sebagai partai politik, di bawah pimpinan Dr. Soekiman Wirdjosandjojo; Partai Komunis Indonesia (PKI), di bawah pimpinan Mr. Moh. Yusuf; Parkindo (Partai Kristen Indonesia), di bawah pimpinan Mr. A.M. Tambunan; Partai Sosialis (PS) di bawah pimpinan Mr. Amir Syarifuddin; Partai Rakyat Sosialis (PRS), di bawah pimpinan Sutan Syahrir; dan partai yang mewakili golongan Katolik yaitu bernama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) di bawah pimpinan I.J. Kasimo.¹⁶⁶ PKRI ini merupakan format baru dari Partai Katolik yang telah ada sebelumnya, yakni PPKD dan PPKI. Penggantian format dari PPKD dan PPKI menjadi bernama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) karena penamaan partai ini direlevansikan pada jaman kemerdekaan dalam bentuk NKRI.

Dalam kongres yang diselenggarakan dari tanggal 7 –15 Desember 1945 di Surakarta, I.J. Kasimo dan golongan Katolik lainnya telah memutuskan: untuk

¹⁶⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁶⁶ *Ibid.*

menghidupkan kembali partai yang sudah tidak aktif dan dilarang selama masa pendudukan Jepang.¹⁶⁷ Dalam kongres itu, disahkanlah partai politik golongan Katolik dengan nama Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) pada tanggal 8 Desember 1945. PKRI ini berkedudukan di Surakarta dengan memilih ketuanya yaitu I.J. Kasimo.¹⁶⁸

Setelah PKRI dibentuk, para pengurus mulai menghidupkan kembali dan membentuk cabang-cabang partai di berbagai kota dan daerah yang masih berada di bawah kekuasaan RI. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan menggunakan sarana demokrasi yang sehat dalam PKRI ini, perwakilan-perwakilan rakyat dari daerah sampai pusat, akan selalu teraspirasikan pendapatnya dalam rangka memajukan programnya dalam hal kemakmuran, keadilan sosial, dan pendidikan.¹⁶⁹ Dengan demikian seluruh potensi golongan Katolik dapat dikerahkan dan digerakkan untuk mempertahankan kemerdekaan dan memajukan negara Republik Indonesia.

Usaha-usaha I.J. Kasimo bersama pengurus lainnya dalam PKRI dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari politik dalam negeri, politik luar negeri (usaha diplomasi), bidang ekonomi, sosial, kemerdekaan agama dan pendidikan (yang tersirat dalam minimum program PKRI¹⁷⁰). Untuk mewujudkan peran politik dalam negeri, I.J. Kasimo selaku pemimpin PKRI sangat mendukung

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian dan Parleментарia*, Jakarta: Deppen, 1954, hlm. 390.

¹⁶⁹ I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjjoangan Politik Katholik Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 8

¹⁷⁰ *Ibid.*

proklamasi kemerdekaan dan kedaulatan RI sepenuhnya. Lewat partai, I.J. Kasimo memperhatikan kesejahteraan rakyat, sehingga setelah dirinya duduk dalam kabinet ia akan meneruskan program PKRI dengan mengupayakan berbagai bidang kesejahteraan rakyat itu, baik ekonomi, sosial hingga pendidikan masyarakatnya.

Pengabdian I.J. Kasimo pada bidang politik dalam negeri tidak lepas dari keyakinan yang dimilikinya, bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan membentuk pemerintahan nasional. Di samping itu, ia juga yakin bahwa hanya dalam negara Indonesia yang berdaulat dan bangsa yang merdeka, umat Katolik dapat berkembang dengan aman dan baik sehingga gereja dapat melaksanakan tugas manusiawinya dengan tenang dan tentram. Maka dari itu, I.J. Kasimo berkiprah dalam bidang politik dalam negeri dengan melibatkan diri pada beberapa lembaga negara yang strategis dalam kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan perannya, I.J. Kasimo berkiprah dalam birokrasi pemerintahan seperti dalam KNIP, Kabinet, DPA serta badan atau komite lainnya.¹⁷¹

Sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan Indonesia tetap merdeka dan berdaulat sekaligus mewakili suara rakyat umumnya dan golongan Katolik khususnya, I.J. Kasimo memutuskan untuk ikut serta berjuang membela dan mempertahankan Republik Indonesia. Hal itu didasari

¹⁷¹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 49.

pada pertimbangan atau alasan yang dikemukakan oleh I.J. Kasimo demikian:

*"sebab kami yakin bahwa Republik Indonesia itu mempunyai kuasa yang halal dan sah, baik menurut djadi dan adanja, maupun menurut sikap dan perbuatannya dalam menjelenggarakan kewajibannya sebagai pemerintah sehari-hari."*¹⁷²

Berdasar keyakinan bahwa Republik Indonesia mempunyai kuasa yang halal dan sah serta berhak membentuk pemerintahan nasional, maka I.J. Kasimo berkewajiban membawa golongan Katolik untuk membela, mempertahankan dan menaati negara Republik Indonesia.¹⁷³

Di samping perannya dalam politik dalam negeri, I.J. Kasimo juga berperan dalam politik luar negeri. Salah satu peran dalam politik luar negeri dapat dilihat dalam usaha diplomatik dengan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan RI secara *de jure* dalam beberapa perundingan (perundingan Linggajati pada tanggal 10 November 1945 dan KMB tanggal 23 Agustus-2 November 1949) dan upaya penyerahan wilayah Irian Barat kepada RI.

Secara *de facto* Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta. Namun Belanda sendiri belum mengakui kedaulatan RI tersebut. Maka usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia mulai

¹⁷² I.J. Kasimo, *Dasar Perjuangan PKRI-AMKRI*, Jogjakarta: Canisius, 1948, hlm. 5.

¹⁷³ I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjongan Politik Katholik Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 22.

dilakukan dengan segala macam cara untuk melemahkan Republik Indonesia baik itu berupa diplomasi maupun agresi.

Beberapa jalur perundingan antara Pemerintah Belanda dengan Republik Indonesia mulai dilakukan untuk menguasai kembali RI. Mulai dari Perundingan Syahir-van Mook dan Sir Archibald Clark Kerr (perwakilan Inggris) pada tanggal 10 Februari 1946, dilanjutkan dengan perundingan di Hoge Veluwe (Belanda) pada tanggal 14 April 1946. Kedua perundingan itu sangat tidak memuaskan bagi pihak RI dengan hasil tanpa mencapai kata sepakat. Kemudian hal yang sama juga terjadi, ketika usaha diplomasi Belanda-RI pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir III terbentuk (7 Oktober 1946), gagal mencapai kata sepakat dan kurang memuaskan bagi pihak RI.¹⁷⁴ Namun setelah diselenggarakannya Perundingan Linggajati pada tanggal 10 November 1946, di Linggajati, Jawa Barat, mulai terlihat titik terang yang menguntungkan bagi pihak RI, yaitu dengan pengakuan *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra dan Madura.¹⁷⁵

Dalam Perundingan Linggajati, I.J. Kasimo diikutsertakan sebagai delegasi Indonesia mewakili PKRI. Dalam perjuangan menegakkan kedaulatan, PKRI memilih jalur diplomasi dan pro demokrasi. Dengan jalur diplomasi itu PKRI mengirimkan wakilnya dalam KNIP yaitu I.J. Kasimo. Atas dasar pemikiran pro diplomasi dan pro demokrasi, I.J. Kasimo mendukung Perundingan

¹⁷⁴ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 52-53.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Linggajati. Selain dasar pemikiran pro demokrasi dan diplomasi, pertimbangan pendelegasian dari pihak Indonesia kepada I.J. Kasimo yang mewakili PKRI dan Supeno yang mewakili Partai Sosialis dalam perundingan ini, dikarenakan bahwa I.J. Kasimo wakil dari PKRI diharapkan dapat mencari jalan kompromi dan kooperatif dengan pihak delegasi Belanda. I.J. Kasimo sebagai wakil Partai Katolik Republik Indonesia diharapkan dapat berkompromi baik dengan Belanda karena terdapat anggota Partai Katolik Belanda KVP (*Katholieke Volkpartij*), yaitu Max van Poll. Mengingat Max van Poll ialah anggota Partai Katolik Belanda (KVP), maka I.J. Kasimo sebagai wakil PKRI ditunjuk sebagai negosiator perundingan dengan pendekatan keagamaan. Didelegasikannya pihak Indonesia kepada I.J. Kasimo dalam perundingan ini juga demi menjaga citra Indonesia di luar negeri.¹⁷⁶

Meski selama tiga bulan I.J. Kasimo secara resmi tidak banyak berperan sebagai delegasi Indonesia, namun dengan diam-diam ia berusaha memberikan sumbangannya, yaitu dengan mengadakan pertemuan rahasia dengan Max van Poll untuk menghimbau agar pihak Belanda berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dilancarkannya aksi militer terhadap Republik Indonesia.¹⁷⁷ Maksud pertemuan itu sangat positif supaya kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar sehingga pertumpahan darah dari kedua belah pihak dapat dihindarkan. Namun usaha yang dilakukan I.J. Kasimo ini tidak berhasil karena

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

pada tanggal 21 Juli 1947 pihak Belanda mengadakan agresi yang pertama. Agresi Militer Belanda I itu disebutnya sebagai aksi personil terhadap Indonesia,¹⁷⁸ karena himbauan dari pihak RI tidak dihiraukan tetapi lebih mementingkan kepentingan Belanda sendiri.

Tidak terlaksanakannya dengan baik hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda, menyebabkan I.J. Kasimo menerbitkan brosur dengan judul “Dasar-Dasar Perjuangan Kita” pada tanggal 15 Agustus 1947. Dalam brosur ini I.J. Kasimo menguraikan beberapa prinsip dan dasar perjuangan PKRI, antara lain tentang: perjuangan pengakuan Indonesia secara *de facto* dan *de jure*; hak pemerintahan nasional bagi setiap bangsa; batas-batas penjajahan, hidup kebangsaan atau pemerintahan kebangsaan; perselisihan Indonesia-Belanda dan PBB; Nasionalisme.¹⁷⁹ Sebagai realisasi perjuangannya, pada tanggal 12 November 1947, I.J. Kasimo mengeluarkan pernyataan di depan parlemen yang berisikan tentang keberatannya terhadap keputusan Belanda. Pernyataan I.J. Kasimo itu berbunyi demikian: *“Teranglah nampak haluan berat sebelah PBB yang memihak Belanda. Bahwa bangsa Indonesia tidak dapat mengerti mengapa sementara terang-terangan memihak Belanda dan tidak bersedia mengakui kemerdekaan dan menentukan sendiri nasib bangsa Indonesia, sama seperti yang telah mereka tandatangani di Atlantik dan UN Charter.”*¹⁸⁰

¹⁷⁸ MP.M. Muskens, *loc. cit.*, hlm. 334-344.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

Keikutsertaan dan perhatian I.J. Kasimo dalam perundingan Indonesia dengan Belanda mendapat nilai kepercayaan dari pemerintah RI dalam usaha perjuangan revolusi, khususnya demi menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada I.J. Kasimo itu nantinya membawa peluang pada dirinya untuk berkiprah dalam beberapa kabinet. Diberikannya kesempatan dan kepercayaan dari pemerintah kepada I.J. Kasimo itu terlihat pada Kabinet Amir I (3 Juli – 11 November 1947) dengan mengangkat dirinya menjadi Menteri Muda Kemakmuran.¹⁸¹ Pada periode pemerintahan kabinet berikutnya (Kabinet Amir II sampai Kabinet Hatta II¹⁸²), I.J. Kasimo menjabat sebagai Menteri Urusan Persediaan Makanan Rakyat. Ketika Kabinet Darurat terbentuk pada masa RIS tahun 1949-1950, I.J. Kasimo juga masih menjabat sebagai Menteri Kemakmuran Negara wilayah RI Yogya (Negara bagian RIS di wilayah Yogyakarta).

Salah satu sumbangan penting I.J. Kasimo sebagai Menteri Urusan Persediaan Makanan Rakyat adalah dikeluarkannya Rencana Produksi Tiga Tahun (1947-1950) yang kemudian disebut *Kasimo Plan*. Rencana itu merupakan jawaban atas kesukaran ekonomi yang dihadapi Indonesia pada saat tekanan agresinya yang pertama 1947. *Kasimo Plan* ini berisikan program

¹⁸¹ Lihat pada lampiran 4, hlm. 211, dan lampiran 15, hlm. 33.

¹⁸² Deppen, *Susunan dan Program: Kabinet Republik Indonesia, 1945-1970*, Djakarta: Pradjna Paramita, 1970, hlm. 6.; Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, 181-182.

swasembada pangan, antara lain dengan intensifikasi pertanian, dan pengembangan ternak dengan bibit unggul.¹⁸³

Rencana Produksi Tiga Tahun atau Produksi Plan / *Kasimo Plan* ini di keluarkan oleh I.J. Kasimo di Yogyakarta pada tanggal 20 November 1947, yang tertuang dalam kata pengantar buku yang berjudul “Rentjana Kemakmuran Istimewa, tahun 1946 oleh Kementrian Kemakmuran Djogjakarta”. Isi Rencana Kemakmuran itu dapat dituliskan sebagai berikut:

“Dalam keadaan sekarang, keadaan kita menderita rintangan blokade Belanda, jang demilitian berarti, bahwa produksi di tanah ini sendiri pada semua lapangan harus diusahakan tambah banjaknja, sehingga dari produksi itu:

- a) kebutuhan rakjat tentang bahan makanan jang perlu bagi kesehatan seluruhnja dapat dipenuhi;
- b) lain-lain kebutuhan rakjat jang penting seperti pakaian, perkakas rumah tangga dan alat² bekerja guna mentjari penghidupan sedjauh mungkin dapat dipenuhi djuga
- c) usaha di luar negeri, jang berguna bagi perdjuaan nasional kita, dapat dibijajai.

... Tetapi di samping dan sedang berdjuaan kita harus djuga dapat membangun; membangun ke arah:

- (1) tertjapainja tjita² yang termuat dalam fasal 33 dari Undang² Dasar Negara kita, ialah sebesar-besar kemakmuran rakjat;
- (2) terlaksananya kewadjiban kita sebagai bangsa merdeka di bagian dunia dengan begitu banjak kekajaan alam, ialah kewadjiban mengusahakan kekajaan itu tidak hanya untuk keperluan kita sendiri, tetapi djuga kepentingan dunia umumjna; dunia umumnja punja hak menerima bahan² kebutuhannja, jang mudah didapat atau dihasilkan hingga berkelebihan di tanah ini tetapi sukar terdapat di lain tanah; kita sebagai bangsa merdeka harus sanggup dan tjakap memberikan sumbangan berupa bahan² itu.¹⁸⁴

¹⁸³ G. Moedjanto, “Partisipasi Umat Katolik Dalam Revolusi Kemerdekaan dan Pembangunan”, dalam Majalah *Widya Dharma*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press., 1998, hlm. 55.

¹⁸⁴ Kementerian Kemakmuran Djogjakarta, *Dokumen Rencana Kemakmuran Istimewa Tahun 1946*, Yogyakarta: 1947, dalam arsip salinan di Sekretariat Yayasan Kasimo, Jln.Kramat V/18A, Jakarta.

Kasimo Plan ini merupakan suatu perwujudan dari program PKRI sendiri yaitu usaha untuk memajukan penghidupan rakyat dalam perekonomian dan terutama pertanian yang menjadi lapangan hidup rakyat yang terbesar.¹⁸⁵ Program ini merupakan bukti perhatian I.J. Kasimo (selaku ketua PKRI dan Menteri Persediaan Makanan Rakyat atau Menteri Kemakmuran Rakyat) pada kesejahteraan rakyat. Sebenarnya program ini sangat baik dalam hal memajukan perekonomian Indonesia, tetapi pada pelaksanaannya tidak dapat tercapai dengan baik karena mengalami hambatan dari luar dengan terjadinya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.

Pada masa agresi ini, I.J. Kasimo turun tangan untuk turut serta bergerilya dalam menghadapi perlawanan Belanda. Perlawanan bersenjata ini diterjuni secara langsung terlihat ketika I.J. Kasimo menjabat sebagai Menteri Persediaan Makanan Rakyat di daerah Jawa pada Kabinet Darurat (Sarifuddin) dan kemudian membentuk KKKPD (Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa), pada tahun 1948.¹⁸⁶

Dalam agresi Militer Belanda II itu, I.J. Kasimo (selaku Ketua DPP PKRI), bersama R.M. Santjojo (selaku Komisaris PKRI Sumatra Selatan) dan anggota lainnya turut serta bergerilya ke gunung-gunung. Dalam instruksinya, I.J. Kasimo mendatangi anggota-anggota PKRI dari Yogyakarta, Solo, Semarang,

¹⁸⁵ I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjoangan Partai Katholik, Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 8.

¹⁸⁶ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 131.

Jawa Barat untuk mengobarkan semangat partiotisme dan mengajak mereka untuk bersama-sama berjuang dalam agresi ini. Ajakan I.J. Kasimo itu yang berbunyi demikian: “ *Memang perdjoangan minta pengorbanan. Marilah kita sekarang berkorban, agar djangan sampai anak-tjutju kita menuduh kita dan golongan-golongan lain mengatakan umat Katolik Indonesia kurang patriotistis. Dalam perdjoangan sekarang ini, sendjata jang paling iadjam ialah non-kooperasi...* ”¹⁸⁷

Selain terjun langsung ke lapangan dengan bergerilya, I.J. Kasimo juga berperan dalam urusan birokrasi dan politik. Dalam menjabat Menteri Kemakmuran wilayah Jawa dan Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KKPD), I.J. Kasimo ikut mengesahkan surat dalam pemerintahan hariannya bersama Kol. A.H. Nasution selaku Panglima Tentara di Jawa dan pengurusan surat-surat Markas Besar Komando Jawa.¹⁸⁸ Selain itu, I.J. Kasimo juga ikut serta dalam perjuangan yuridis dalam Peraturan Darurat tentang Peradilan Militer, Pengadilan Sipil Pemerintahan Militer, Mahkamah Tentara Luar Biasa dan tentang Cara menjalankan Hukuman Penjara No. 46/MBKD/49. Peraturan-peraturan tersebut menjadi segi penting dari pertahanan *de facto* Indonesia mengenai hukum, walaupun masih berupa “hukum darurat” di masa revolusi.¹⁸⁹

¹⁸⁷ I.J. Kasimo, *op.cit.*, hal. 12.

¹⁸⁸ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 132-133.

¹⁸⁹ *Ibid.*

Setelah dua kali agresi militer Belanda tidak berhasil mematahkan kekuatan dan perlawanan fisik dari pihak RI, dan juga desakan dunia internasional untuk mencari penyelesaian melalui meja perundingan, akhirnya Belanda bersedia untuk berunding dengan pihak Indonesia. Perundingan ini disebut Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Perwakilan golongan Katolik pun tidak ketinggalan untuk ikut serta dalam konferensi tersebut. Adapun perwakilan dari golongan Katolik itu ialah Dr. R.V. Sudjito, Mr. Teng Tjin Leng dan Mr. Sunu, tanpa I.J. Kasimo di dalamnya,¹⁹⁰ karena dirinya disibukkan dalam urusan dalam negerinya yang masih berlangsung darurat.

Terselenggaranya KMB membuka jalan bagi RI untuk memperkuat tegaknya kedaulatan negara. Perundingan KMB dari bulan Agustus sampai awal November 1949 berhasil mencapai kompromi, yaitu: dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Dengan demikian konferensi tersebut mendorong pihak Indonesia menyetujui gagasan Belanda untuk membentuk negara Serikat yaitu Republik Indonesia Serikat. Hal itu terlihat dalam Piagam Penyerahan/Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 30 Desember 1949 yang corak pemerintahan RIS-nya diatur oleh Konstitusi yang dibuat

¹⁹⁰ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 337.

delegasi RI dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg* atau Badan Permusyawaratan Federal).¹⁹¹

Selain masalah bentuk Negara RIS, dalam konferensi tersebut juga dibahas masalah status Irian Barat. Status Irian Barat ini akan terselesaikan setahun setelah tersahkannya persetujuan KMB.¹⁹² Namun kenyataannya sampai tahun 1960 wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Beberapa usaha telah ditempuh RI untuk memperjuangkannya mulai dari perundingan secara bilateral hingga mengajukannya dalam PBB dengan tetap tidak membawa hasil.

Dari pihak PKRI, I.J. Kasimo menganjurkan agar pemerintah Belanda memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. I.J. Kasimo sebagai ketua umum Partai Katolik mengusahakannya dengan mengirimkan brosur kepada Belanda. Dengan tegas I.J. Kasimo menunjukkan bahwa kedudukan KVP sangat berpengaruh di dalam percaturan politik Belanda termasuk kepentingannya di Irian Barat. Brosur I.J. Kasimo yang ditujukan kepada KVP itu disebarluaskan dengan dimuat dalam harian *De Volksrant* dan Majalah *Penabur* tanggal 24 Juli 1960, bahwa Irian Barat harus menjadi pertimbangan *gewetenszaak* (pertimbangan masalah hati nurani)¹⁹³ dengan bertujuan sebagai

¹⁹¹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20, Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 57.

¹⁹² Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 88.

¹⁹³ *Ibid.*

propaganda politik dan kritik terhadap pemerintah Belanda supaya Irian Barat segera dilepaskan oleh pihak Belanda.

I.J. Kasimo sendiri semula percaya bahwa aksi yang dilakukan dalam bentuk pengajuan brosur tersebut dapat berhasil, namun pada kenyataannya belumlah menemui jalan terang. Berlarutnya masalah Irian Barat yang tak kunjung usai ini menyebabkan pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.¹⁹⁴

Pada tahun 1961, Sidang Majelis Umum PBB kembali membahas Irian Barat. Hal itu dilakukan untuk mencegah pecahnya perang antara Indonesia dengan Belanda. Maka Sekretaris Jendral U Thant menugaskan Duta besar Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk menyusun rancangan guna menyelesaikan masalah Irian Barat. Ellsworth Bunker menawarkan usul yang dinamakan *Bunker Plan*, kepada kedua belah pihak (Indonesia-Belanda) yang bersengketa. Isi pokok *Bunker Plan* itu ialah dalam waktu 2 tahun Pemerintah Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.¹⁹⁵

Dari pihak Indonesia, *Bunker Plan* mendapat respon positif oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat mengharapkan Irian Barat bersatu dengan Indonesia. Untuk menggalang keikutsertaan seluruh rakyat dalam usaha penyerahan Irian Barat kepada RI, Presiden Sukarno mengumumkan "Trikor" (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961. Trikor

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

tersebut yang berisi: 1) gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda; 2) kibarkan sang merah putih di seluruh Irian Barat; 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum.¹⁹⁶ Menanggapi Trikora ini, I.J. Kasimo turut serta mendukung dalam mengupayakan pembebasan Irian Barat. I.J. Kasimo mengajak beberapa tokoh Katolik, seperti Pastor Oudejans, Dr. Stockman, Prof. de Beaufort, dan Frans Seda¹⁹⁷ untuk mendukungnya.

Wujud dukungan I.J. Kasimo dan tokoh Katolik lainnya ialah dengan usaha mempengaruhi KVP di Belanda. Pada bulan April 1962, Pastor Oudejans dan Frans Seda bertolak ke negeri Belanda, untuk memperoleh persetujuan dari KVP dan Kabinet Pemerintah Belanda. Alhasil terkirimlah kabar persetujuan itu lewat telegram bahwa: KVP dan Kabinet Belanda menerima dan menyetujui "Bunker Plan".¹⁹⁸ Dengan demikian rencana I.J. Kasimo dan tokoh Katolik lainnya untuk mempengaruhi Pemerintah Belanda melalui KVP berhasil. Pada akhirnya tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani Perjanjian New York yang mengakiri persengketaan Indonesia-Belanda atas Irian Barat dan kemudian Irian Barat menjadi bagian dari RI.

Semasa RIS (1949-1950), I.J. Kasimo dan Mgr Soegijapranata mengadakan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) yang berlangsung di Yogyakarta dari tanggal 7-12 Desember 1949.¹⁹⁹ KUKSI merupakan kongres

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ Lihat pada lampiran 5, hlm. 212.

pertama dari golongan Katolik di seluruh Indonesia.²⁰⁰ Dalam KUKSI terdapat beberapa masalah yang dibahas²⁰¹, tetapi masalah yang paling dominan dibahas ialah mengenai keberadaan organisasi Katolik yang berdiri semasa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan bentuk negara yang secara administratif dan politik pemerintahan terpisah-pisah dan memiliki otonomi pada negara bagian dengan berbentuk serikat sehingga memungkinkan terjadinya disintegrasi baik bangsa maupun golongan. Diselenggarakannya kongres tersebut bertujuan untuk mempersatukan dan membentuk wadah persatuan golongan Katolik dari seluruh Indonesia. Usaha konsolidasi ini dianggap sangat penting karena golongan Katolik di seluruh Indonesia perlu dipersatukan meski dalam bentuk RIS. Untuk itu, semua organisasi Katolik (seperti Organisasi Buruh Indonesia, Organisasi Wanita Katolik Indonesia dan Organisasi Pemuda Katolik Indonesia diintegrasikan dalam satu bendera dan satu nama.²⁰²

Pada tanggal 12 Desember 1949 di Yogyakarta, KUKSI menghasilkan beberapa resolusi penting. Resolusi penting yang dikeluarkan dalam KUKSI itu antara lain memutuskan untuk membentuk satu partai Katolik bagi seluruh Indonesia, sebuah organisasi buruh Katolik, sebuah organisasi wanita Katolik

²⁰⁰ *Ibid*

²⁰¹ Lihat lebih lanjut pada lampiran 11, hlm. 227.

²⁰² Tim Wartawan Kompas, *op. cit.*, hlm. 69.

dan suatu organisasi pemuda Katolik. Berdasarkan resolusi tersebut, kongres memutuskan keenam partai politik yang ada di luar Jawa dan Sumatera dilebur menjadi satu partai dengan nama "*Partai Katolik*".²⁰³ Partai Katolik berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kesediaan partai-partai politik golongan Katolik untuk berfusi menjadi partai tunggal itu diumumkan lewat pernyataan bersama yang berbunyi sebagai berikut:

"Kami, umat Katolik seluruh Indonesia sejak duapuluh lima tahun yang lalu senantiasa berusaha untuk mengadakan satu partai Katolik saja, yang meliputi seluruh daerah Tanah Air kita, hal mana ternyata dari riwayat perkembangan beberapa perkumpulan Katolik, yang bergerak di lapangan politik, pada tanggal 12 Desember 1949 berkumpul dalam Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia di Yogyakarta dengan berkat dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan dengan suara bulat, bahwa saat untuk mendirikan satu partai Katolik saja buat seluruh Indonesia telah tiba; memutuskan, menjelmakan:

- 1) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI), yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1945 di Surakarta;
 - 2) Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI), yang didirikan di Flores;
 - 3) Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI), yang didirikan di Makassar;
 - 4) Partai Katolik Indonesia Timor (Parkit), yang didirikan di Timor;
 - 5) Persatuan Politik Katolik Flores (Perpokaf), yang didirikan di Flores
 - 6) Permusyawaratan Majelis Katolik (Pemakat), yang didirikan di Manado;
 - 7) Partai Katolik Indonesia Kalimantan (Parkika), yang didirikan di Kalimantan;
- menjadi satu partai kesatuan untuk semua Umat Katolik seluruh Indonesia, dengan nama "*Partai Katolik*".²⁰⁴

²⁰³ I.J. Kasimo, "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia 1923-1953", dalam *Suara Katolik* No.4 Tahun 4 April 1953, Djakarta, hlm. 23.; M.P.M. Muskens.Pr., *op.cit.*, hlm. 342-343.

²⁰⁴ *Ibid.* (Lihat pada lampiran 12, hlm. 229.)

Dengan demikian, sejak tanggal 12 Desember 1949 di seluruh Indonesia terdapat hanya satu partai politik dari golongan Katolik. Partai ini merupakan perwujudan kesatuan nasional dari seluruh umat Katolik Indonesia atas prakarsa I.J. Kasimo sebagai wakil kaum awam Katolik dan Mgr. Soegijapranata sebagai wakil Gereja Katolik Indonesia.

Sebagai pemimpin dari Partai Katolik, I.J. Kasimo berusaha mewujudkan asas dan tujuan yang telah digariskan dalam Anggaran Dasar Partai Katolik. Asas PKRI tersebut mendasarkan pada asas Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertindak menurut asas-asas Katolik, yaitu cinta tanah air demi kebahagiaan semua manusia (*Encycliek Quadragessimo Anno 22 II 2*) dan solidaritas dengan cinta sosial dan keadilan sosial (*Encycliek Quadragessimo Anno 115*). Asas yang diambil dari Ajaran Sosial Gereja dalam *Encycliek Quadragessimo Anno 22 II 2*, tentang cinta tanah air demi kebahagiaan semua manusia tersebut ditetapkan pada pasal 2 ayat 1 asas PKRI. Sedangkan asas yang diambil dari Ajaran Sosial Gereja dalam *Encycliek Quadragessimo Anno 115*, tentang usaha mengembangkan kemajuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya tercantum pada pasal 2 ayat 2 Asas PKRI.²⁰⁵

Pada masa pemerintahan RIS (1949-1950), I.J. Kasimo tidak menjabat sebagai menteri tetapi menjadi anggota DPR RIS.²⁰⁶ Di dalam DPR RIS ini I.J.

²⁰⁵ I.J. Kasimo, *30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia: 1923-1953*, dalam Suara Katolik, No.4 Tahun 4, April 1953, Djakarta, 53, hlm. 23-31.; M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 343 (Lihat pada lampiran 7, hlm. 214.)

²⁰⁶ Lihat pada lampiran 15, hlm. 234.

Kasimo terpilih menjadi Ketua Panitia Penyusunan Tata Tertib DPR RIS. Panitia ini berkerja selama kurang lebih satu bulan untuk menyusun peraturan tata tertib bagi anggota parlemen.²⁰⁷ Panitia Penyusun Tata tertib DPR RIS tidak dapat merealisasikan programnya secara baik karena pemerintahan RIS tidak bertahan lama dan kemudian kembali berbentuk NKRI. RIS tidak berumur lama (berusia sembilan bulan) karena pada tanggal 17 Agustus 1950 undang-undang dasar yang lama (UUDS 1950) diganti dengan disahkannya undang-undang dasar yang baru yaitu UUD 1945. Pengesahan UUD 1945 menurut pasal II UU No. 7 /1950,²⁰⁸ menandai secara resmi bahwa RIS dibubarkan dan kembali pada bentuk negara NKRI.

C. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara Pemerintahan RI Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1955-1965

Pada tahun 1950 telah terjadi perubahan Konstitusi RIS yang di dalamnya menetapkan UUD Sementara RI (atau disebut UUDS 1950). UUDS 1950 memberi landasan tahun kelahiran kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS 1950 inilah yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal terjadi usaha pergantian

²⁰⁷ Tashadi,dkk., *loc.cit.*, hlm. 176.

²⁰⁸ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20*, jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlm. 73.

konstitusi dan pembentukan badan pembuat konstitusinya, yaitu UUDS 1950 yang akan diganti menjadi UUD 1945 sebagai UUD yang bersifat tetap, dan badan yang membentuk undang-undang dasar yang kemudian disebut sebagai badan konstituante. Badan Konstituante ini memulai tugasnya pada tanggal 10 November 1959 dengan menyusun undang-undang dasar baru dan bersifat tetap.²⁰⁹

Dalam Badan Konstituante I.J. Kasimo diangkat sebagai anggota,²¹⁰ yang menyumbangkan pikiran dan sarannya baik untuk tetap berdirinya dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945 maupun penyusunan alat-alat negara.²¹¹ Namun Badan Konstituante ini tidak berjalan efektif dalam melaksanakan tugasnya, karena beberapa latar belakang sosial politik dan ekonomi yang tidak menentu. Akhirnya Sukarno sebagai presiden mengeluarkan usaha kebijakan merombak bentuk pemerintahan yang berbentuk demokrasi terpimpin.

Setelah terbentuknya NKRI selama lima tahun (1950-1955) dengan menerapkan demokrasi liberal, Presiden Sukarno mulai merombak demokrasi terpimpin, karena kelanjutan demokrasi liberal yang telah dicanangkan pada Maklumat Presiden 3 November 1945 tidaklah membuahkan hasil yang berarti. Hal ini terlihat dari kemerosotan ekonomi, sosial akibat revolusi fisik. Dengan

²⁰⁹ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 390.; Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 75.

²¹⁰ Lihat pada lampiran 15, hlm. 238

²¹¹ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm., 176 M.P.M., Muskens Pr., *op.cit.*, hlm. 411.

kata lain percobaan demokrasi liberal itu gagal untuk membangun pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹²

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kabinet, dari Kabinet Syahrir (1945) sampai Kabinet Ali I (1950) dengan menerapkan sistem kabinet parlementer (1945-1955). Ketidakstabilan politik yang ditandai jatuh bangunnya beberapa kabinet itu menyebabkan politikus Indonesia mencari sistem politik yang ideal. Dalam pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1950 di depan rakyat, Sukarno mengkritik pemerintahan demokrasi liberal dengan mengemukakan bahwa sampai saat itu Indonesia telah 12 kali mengalami pergantian kabinet dan sampai saat itu pula sudah ada 121 orang menteri diangkat.²¹³ Di samping pergantian kabinet, terdapat pembagian kursi yang tidak seimbang, misalnya antara Masyumi dan PNI dalam Kabinet Natsir dan Burhanuddin Harahap berisikan wakil dari Masyumi dan tidak ada satu menteri pun yang mewakili dari PNI. Perwakilan partai politik yang tidak seimbang ini menimbulkan adanya mosi-mosi tidak percaya. Hal ini menimbulkan periode masa bakti kabinet berumur pendek.²¹⁴

Setelah NKRI terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi suhu politik yang kian memanas seiring dengan semakin meningkatnya kompetisi antar berbagai partai politik dan golongan. Perwakilan partai politik dalam

²¹² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (terj), Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 1988, hlm. 35.

²¹³ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 350.

²¹⁴ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983, hlm. 130-131

DPRS banyak yang mendesak untuk segera memenangkan dalam pemilu, dengan hasil berdasarkan penunjukan partai-partai yang memenangkan dalam pemilu tersebut. Setelah perwakilan politik terpilih dalam kabinet, hampir setiap kabinet yang berdiri para wakil politiknya mencantumkan dalam programnya untuk segera mengadakan pemilihan umum guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis.²¹⁵ Hal ini mendorong dilangsungkannya pemilu secara demokratis dalam waktu yang singkat.

Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilu oleh pemerintah. Diselenggarakannya pemilu 1955 itu diharapkan menjadikan pemerintahan Indonesia lebih baik dalam mewujudkan sosial ekonomi, serta politik Indonesia. Meskipun telah diselenggarakan pemilu tahun 1955, pemerintah Indonesia tidak mengalami peningkatan yang berarti, tetapi yang terjadi ialah sebaliknya, keadaan ekonomi menjadi semakin terpuruk. Terpuruknya ekonomi Indonesia ini dapat dilihat dari angka inflasi yang tinggi dengan biaya hidup umum meningkat sekitar 100% selama tahun 1950-1957.²¹⁶ Kenaikan harga yang disebabkan angka inflasi yang tinggi ini menyebabkan masyarakat tidak tercapai kesejahteraannya. Kondisi demikian dilatarbelakangi juga oleh

²¹⁵ H. Imam Suhadi, *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1981, hlm. 6-13.

²¹⁶ M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998, hlm. 359.

perbedaan ideologi yang berkembang sangat tajam ada di dalam fraksi-fraksi, baik dalam DPRS maupun Badan Konstituante. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya pengotakan-pengotakan baik dalam masyarakat maupun partai politik. Pengotakan-pengotakan yang ada dalam masyarakat memunculkan gejolak dan gerakan massa. Gejolak dan gerakan massa mulai terjadi di awal tahun 1957. Gejolak yang ada di masyarakat itu ditandai dengan munculnya pemerontakan PRRI, Permesta, DI/TII dan RMS.²¹⁷

Menanggapi situasi politik yang penuh gejolak itu, Presiden Sukarno menyatakan kritik-kritiknya terhadap pemerintahan yang berbentuk demokrasi liberal itu. Ia menyatakan bahwa demokrasi 50% plus ala Barat sesungguhnya tidak sesuai bagi Indonesia yang sangat pluralistik dalam banyak hal.²¹⁸ Jalan keluar yang diajukan Sukarno sebagai alternatif sistem politik ialah dengan usul tentang “demokrasi terpimpin atau demokrasi dipimpin”.²¹⁹ Ide Sukarno ini kemudian dikeluarkan pada tanggal 30 Oktober 1956. Pada tahun 1957, Sukarno mulai menyiapkan orang-orang di sekitarnya untuk merealisasikan idenya itu.

Pada masa demokrasi terpimpin, I.J. Kasimo sebagai golongan Katolik memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; permohonan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959; perjuangan atas

²¹⁷ Ginanjar Kartasasmita, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Vol II, cetakan ketiga, Jakarta: Tira Pustaka, 1980, hlm. 97-100.

²¹⁸ Mariam Budiardjo, (ed), *Partisipasi Politik, Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia, 1982, hal. 201-228.

²¹⁹ *Ibid*.

pengaruh komunisme di dalam DPR-GR, Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Kaki Empat serta menentang Konsepsi Presiden. Usaha politik yang dilakukan oleh I.J. Kasimo ini secara khusus untuk melindungi hak kebebasan umat Katolik agar dapat eksis dalam alam kemajemukan di NKRI, dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Untuk menjalankan pemerintahan demokrasi terpimpin, Presiden Sukarno mengambil beberapa langkah kebijakan, di antaranya yaitu mengeluarkan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Dengan dikeluarkannya Konsepsi Presiden, secara politis menjadikan Sukarno sebagai penguasa yang cenderung otoriter meski terbatas pada UUD 1945. Hal itu dikarenakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali dan dijadikan konstitusi Republik Indonesia. Sukarno sebagai presiden secara langsung memimpin pemerintahan berdasarkan UUD 1945.²²⁰

Upaya Presiden Sukarno untuk membentuk pemerintahan demokrasi terpimpin dilakukan dengan usaha penetapan sistem, mekanisme dan administrasi pemerintahan. Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Sukarno menyampaikan pidato, yang kemudian terkenal sebagai “Konsepsi Presiden Sukarno” atau “Konsepsi Presiden” yaitu tentang konsep demokrasi terpimpin baik itu meliputi sistem, mekanisme maupun administrasi negara, di depan

²²⁰ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 392-393.

sekitar 900 orang undangan yang terdiri dari pemimpin partai-partai politik serta tokoh masyarakat.²²¹

Isi Konsepsi Presiden Sukarno ialah sebagai berikut. *Pertama*, sistem demokrasi liberal secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Maka sistem itu harus diganti dengan demokrasi terpimpin. *Kedua*, untuk melaksanakan sistem demokrasi terpimpin, perlu dibentuk suatu parlemen berdasarkan asas kegotong-royongan (DPR GR), yang anggota-anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.²²² Dalam melaksanakan tugas-tugas dari parlemen (DPR GR) perlu dibentuk “Kabinet Kaki Empat”, yang terdiri dari keempat partai besar hasil pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. *Ketiga*, dibentuklah Dewan Nasional, yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas Dewan Nasional ini ialah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.²²³

Keotoriteran Sukarno itu terlihat pada pembentukan lembaga negara yang terpola pada kekuasaannya, yaitu dengan dibentuknya Kabinet Kaki Empat yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI. Kabinet ini dibentuk dengan mengintegrasikan partai-partai yang mengarah pada kekuatan politiknya. Kekuatan politik yang dihimpun Sukarno sesuai dengan pandangannya

²²¹ *Ibid.*

²²² Lihat pada lampiran 15, hlm. 236.

²²³ Ginanjar Kartasasmita, *loc. cit.*, hlm. 107.



mengenai Nasakom (Nasionalis Agama Komunis)²²⁴ yaitu PNI mewakili golongan nasionalis, Masyumi dan NU mewakili golongan agama serta PKI mewakili golongan komunis.

Di tengah-tengah kondisi saling mementingkan kekuasaan tersebut di atas, I.J. Kasimo tetap pada pendiriannya, yaitu berjuang di bawah naungan partai dan suara hati rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan hak kewarganegaraan baik seluruh anggota masyarakat maupun dari golongan Katolik dari pengaruh fanatisme agama dan komunisme. Kesejahteraan umum masyarakat yang sangat diharapkan oleh I.J. Kasimo ialah seperti yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, karena dengan tegaknya Pancasila dan UUD 1945 di negara RI ini akan terwujud suatu kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan memberikan kemerdekaan beragama Katolik khususnya.²²⁵ Upaya I.J. Kasimo untuk melindungi hak kewarganegaraan bagi umat Katolik di Indonesia, dilakukan dengan bersikeras mempertahankan tegaknya UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia

Perjuangan untuk menegakkan UUD 1945 dilakukan oleh I.J. Kasimo ketika terjadi perdebatan tentang dasar konstitusi negara dalam Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1955. Perdebatan dalam sidang itu menimbulkan kemacetan dalam menyusun konstitusi negara. Kemacetan

²²⁴ Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, Yogyakarta: Pustaka Parama Abiwarra, 1988, hlm. 58.; M.P.M. Muskens, Pr. *loc.cit.*, hlm. 426-427

²²⁵ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 75.

Sidang Konstituante dikarenakan adanya kontroversi mengenai landasan konstitusi ini. Golongan Islam menghendaki agar Islam dijadikan agama negara. Sementara golongan nasionalis yang didukung Partai Katolik dan Kristen ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Golongan Islam bersikeras mewujudkan rumusan dasar yang berbunyi "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", sementara golongan nasionalis dan Kristen-Katolik, menyarankan agar sidang konstituante membuka kesempatan untuk mengajukan amandemen-amandemen pada undang-undang dasar tersebut.²²⁶ Dalam usaha saling mengajukan pendapat itu, I.J. Kasimo dan Wongsonegoro mengeluarkan prasaran kepada pemerintah supaya: 1) menyusun kembali alat-alat negara dari atas sampai ke bawah 2) memperhatikan faktor-faktor personality, seperti rasa tanggung jawab dari petugas dan para pemimpin; 3) melakukan penempatan orang yang tepat (*the right man in the right place*) dan 4) memperhatikan etos kerja dan prestasi kerja, yaitu sedikit berbicara tetapi banyak bekerja keras.²²⁷ Alhasil usulan I.J. Kasimo dan Wongsonegoro kepada parlemen untuk mengamandemen UUD itu ditolak

Meskipun I.J. Kasimo dan Wongsonegoro mengalami penolakan amandemen oleh parlemen, usaha dan perjuangan konstitusi itu tidaklah usai.

Perjuangan itu kemudian mendapatkan titik terang setelah dilakukannya usaha

²²⁶ Y. Heri Siswanto, *loc.cit*, hlm. 32

²²⁷ M.P.M., Muskens, *op.cit.*, hlm. 411.

Sidang Konstituante pada tanggal 2 Juni 1959 dengan mencapai suatu permufakatan. Dalam Sidang Konstituante tersebut para peserta sidang secara mufakat menetapkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara RI. Pencapaian permufakatan itu memuaskan bagi banyak pihak, meliputi golongan nasionalis, golongan Katolik dan Kristen. Golongan nasionalis, Katolik dan Kristen sangat puas dengan hasil permufakatan karena perolehan suara mereka lebih besar dibanding perolehan suara dari golongan Islam. Berdasarkan ketentuan UUDS 1950 pasal 37, jumlah suara dari golongan Islam tidak mencapai quorum dua pertiga dari yang hadir.²²⁸

Meskipun UUD 1945 telah disepakati dalam Sidang Konstituante pada tanggal 3 Juni 1959, namun Badan Konstituante masih mengalami reses. Melihat kondisi demikian, Suwiryo, ketua Umum PNI mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno pada tanggal 16 Juni 1959, agar mengeluarkan dekrit untuk memutuskan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Badan Konstituante. Dukungan dari berbagai pihak pun mulai bermunculan untuk menyerukan pembubaran Badan Konstituante ini. Dukungan itu meliputi dari pihak TNI-AD, Partai Katolik, dan beberapa partai lain yang secara bersama-sama mempertahankan Pancasila dengan mengajukan prasaran kepada Sukarno tentang pembubaran Badan Konstituante ini. I.J. Kasimo sebagai wakil Partai Katolik menyarankan kepada presiden supaya mengeluarkan dekrit untuk

²²⁸ *Ibid.*

menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap.²²⁹

Beberapa saran dari PNI, PKRI, TNI-AD dan beberapa partai pendukung akhirnya diterima Sukarno pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959. Pada hari itu juga secara langsung Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit tentang pembubaran Konstituante dan pemberlakuan UUD 1945.²³⁰ Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini, Pancasila dan UUD 1945 dapat diselamatkan. Dengan demikian golongan Katolik diberikan hak bernegara dan kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Usaha I.J. Kasimo dalam mempertahankan tegaknya Pancasila dan UUD 1945 terus dilakukan dengan mempertahankan pluralitas bangsa dan memperhatikan perlindungan hak kewarganegaraan golongan Katolik ketika menghadapi ketetapan demokrasi dipimpin oleh Sukarno dalam Konsepsi Presiden 21 Februari 1957. Konsepsi Presiden itu memperkuat kedudukan golongan komunis dalam negara RI. Dalam isi Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 tersirat ajakan Presiden Sukarno kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk ikut serta dalam kabinet. Kabinet bentukan Presiden Sukarno itu ialah Kabinet Kaki Empat, yang beranggotakan perwakilan dari PNI, Masyumi, NU dan PKI.

²²⁹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hal.75. dan M.P.M.Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 412.

²³⁰ Y. Heri Siswanto, *op.cit.*, hlm. 32.

Ajakan Sukarno kepada PKI dalam penyelenggaraan negara tersebut di atas memberikan respon negatif dari PKRI di bawah pimpinan I. J. Kasimo. I.J. Kasimo dengan tegas menolak Konsepsi Presiden yang mengajak PKI dalam Kabinet Kaki Empat.²³¹ Alasan penolakan I.J. Kasimo terhadap Konsepsi Presiden dikarenakan di dalam kabinet yang dibentuk itu akan menyertakan golongan komunis yang ateistis. I.J. Kasimo berpendapat bahwa di dalam negara komunis tidak akan ada kebebasan agama; sedangkan dirinya bercita-cita supaya negara Indonesia yang diharapkan ialah negara yang memberi kebebasan beragama.²³² Ia menolak konsepsi itu berdasarkan pengalaman sejarah di beberapa negara, terutama di Eropa Timur, bahwa dengan mengikutsertakan golongan komunis dalam suatu negara berarti memberikan peluang kepada golongan itu untuk mengambil alih kekuasaan negara.²³³ Bila kekuasaan negara RI dipegang oleh seorang ateis maka tidak akan terselenggara kebebasan beragama Katolik di Indonesia.

Penolakan I.J. Kasimo terhadap Konsepsi Presiden berdampak negatif pada citra dirinya sehingga pengaruh politik dari Partai Katolik menjadi merosot. Sukarno merasa tidak senang terhadap sikap I.J. Kasimo, karena dianggap meremehkan kebijakan yang dikeluarkannya.²³⁴ Sikap sentimen Sukarno kepada I.J. Kasimo ini membawa dampak negatif dalam partisipasi politik

²³¹ G. Moedjanto, "Partisipasi Umat Katolik dalam Revolusi Kemerdekaan dan Pembangunan", dalam *Majalah Ilmiah Widya Dharma*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 1998, hlm. 57-68.

²³² Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 85.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

PKRI selanjutnya. Sebagai perwakilan dari Partai Katolik I.J. Kasimo tidak diikutsertakan dalam Kabinet Karya dan kabinet-kabinet berikutnya semasa demokrasi terpimpin ini berjalan.²³⁵

Sebagai wakil PKRI, I.J. Kasimo ingin mempertahankan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan demokrasi terpimpin. Maka I.J. Kasimo menolak Konsepsi Presiden yang memberi uraian konsep pemerintahan demokrasi terpimpin. Selain PKRI, masih terdapat reaksi kontra lainnya, seperti: Masyumi, PSI, PSSI, IPKI, Parkindo.²³⁶ Reaksi kontra ini kemudian berkembang pada tahun 1960, ketika Presiden Sukarno membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dan membekukan DPRS karena masalah Anggaran Belanja Negara yang diajukan Presiden Sukarno tidak diterima oleh parlemen. Masyumi, PSI, PKRI, Parkindo dan IPKI menolak bila DPRS itu digantikan dengan DPR-GR karena anggota-anggota dewan yang duduk di dalamnya berbau komunis dengan mendasarkan pada pandangan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis).²³⁷

Sebagai wujud reaksi kontra terhadap pembentukan DPR-GR, Masyumi, PSI, Partai Katolik dan IPKI membentuk Liga Demokrasi pada tanggal 24 Maret 1960 di Jakarta. Tujuan pokok didirikannya Liga Demokrasi ini ialah untuk menegakkan demokrasi, menentang pembentukan suatu parlemen gotong

²³⁵ *Ibid.*

²³⁶ Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 53.

²³⁷ Syafii Maarif, *Islam dan Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*, Yogyakarta: Pustaka Parama Abiwara, 1988.; M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 426-433.

royong dan usaha antisipasi dalam menghadapi bahaya komunisme.²³⁸ Sebagai pembicara dalam Liga Demokrasi, I.J. Kasimo memandang perlu untuk meninjau kembali lembaga DPR-GR itu dengan melihat situasi politik yang berkembang di Indonesia sangat buruk dan memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada warganegaraanya mengenai hak-hak kepercayaan kepada Allah dan peri kemanusiaan dapat terjamin, bukan mengarah pada pemerintahan dengan masyarakat yang materialistis dan atheis.²³⁹

Pada tanggal 20 Juni 1960, Partai Katolik mulai tidak berkeberatan dengan pembentukan DPR GR karena jumlah anggota PKI tidak terlalu besar dan diikutsertakannya perwakilan dari PKRI dalam parlemen. Perwakilan dari PKRI yang menjadi anggota DPR GR ialah V.B. Saka, Drs. Matakupan, R.H. Soetarto Hadisoedibjo, F.C. Palaunsuka dan Drs. Frans Seda.²⁴⁰ Sedangkan I.J. Kasimo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).²⁴¹ Meskipun diikutsertakannya PKRI dalam parlemen, I.J. Kasimo mendesak secepat mungkin agar pemerintah mengadakan pemilihan umum untuk DPR dan MPR supaya pengaruh golongan komunis tidak terlalu besar dalam pemerintahan.

²³⁸ Jahja Muhaimin, *Perkembangan Militer, Dalam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Seri Penerbit Skripsi Terbaik, 1971, hlm. 120.

²³⁹ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 433.

²⁴⁰ Lihat pada lampiran 15, hlm. 236.

²⁴¹ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 433.

Pada tahun 1960, I.J. Kasimo tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Katolik. Namun dirinya masih tetap memberikan prasaran kepada Drs. Frans Seda untuk membawa partainya berdasarkan tujuan dan program yang telah ada. Pada Kongres Partai Katolik tahun 1960, I.J. Kasimo mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dan menyerahkannya kepada Frans Seda. Dengan demikian Frans Seda ialah pengganti dan penerus I.J. Kasimo dengan menjabat menjadi ketua PKRI yang baru.²⁴² Setelah melepaskan jabatan ketua PKRI kepada Dr. Frans Seda, I.J. Kasimo kemudian menjabat sebagai anggota DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).²⁴³ Sebagai Anggota DPA, I.J. Kasimo memberikan beberapa prasaran kepada pemerintah antara lain: peninjauan kembali pembentukan parlemen baru dengan tata cara yang demokratis, dan desakan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu DPR dan MPR.²⁴⁴

Setelah memasuki tahun 1965, situasi negara dalam keadaan darurat karena terjadi suatu peristiwa/pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa G 30 S. Gerakan 30 September diawali dengan usaha pemfitnahan golongan lain yang dianggap melawan PKI terutama pimpinan TNI-AD (Kostrad). Jabatan sebagai anggota DPA di masa G 30 S itu menyebabkan terbatasnya peran I.J. Kasimo untuk memberikan usaha aspirasinya kepada pemerintah. Terjadinya peristiwa

²⁴² Frans Seda, *Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1992, hlm. xxxii

²⁴³ Tashadi. dkk., *loc.cit.*, hlm. 178.

²⁴⁴ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 434.

G 30 S membawa dampak buruk pada lembaga-lembaga negara termasuk DPA. DPA mengalami perubahan struktur yang menyebabkan kegiatannya menjadi terhenti.

DPA kembali berjalan setelah ditetapkannya UU No 3 tahun 1967 dan disempurnakan dengan UU No. 4 tahun 1978, yang isinya merevitalisasi lembaga DPA, baik itu tugas maupun susunan keanggotaan. Untuk merealisasikan UU No. 4 Tahun 1968 ini, maka dilantiklah angkatan pertama anggota DPA yang berjumlah 17 orang pada tanggal 6 Februari 1968. Dalam angkatan pertama anggota DPA ini I.J. Kasimo terpilih sebagai salah satu anggotanya. DPA ini bertugas memberi jawaban atas pertanyaan presiden serta mengajukan usul kepada kepala negara baik diminta atau tidak.²⁴⁵ Di tahun-tahun inilah I.J Kasimo berkiprah di Era Brde baru.

D. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara Pemerintahan RI Pada Masa Orde Baru 1966-1973

Upaya yang dijalankan pemerintah dengan menempuh sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ternyata masih saja membawa Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan baik sosial ekonomi maupun politik. Pergantian kekuasaan pemerintahan RI yang tidak stabil menyebabkan timbulnya gangguan sosial-keamanan dan kehidupan ekonomi masyarakat menjadi

²⁴⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 95.

²⁴⁶ P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2004, hlm. 87-89.

menurun. Ancaman sosial-keamanan menjadi terbuka setelah muncul peristiwa G 30 S (Gerakan 30 September) dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu TNI-AD (Kostrad). Perebutan kekuasaan yang terjadi antara TNI-AD dengan PKI karena pemerintah RI pada masa demokrasi terpimpin cenderung berat sebelah, di mana PKI mendapat perhatian yang besar dari Sukarno. Maka PKI dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu TNI-AD (Kostrad) untuk merebut kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu sendiri dilakukan oleh Soeharto dengan segala apapun untuk mencapai tujuannya.

Untuk memperoleh kekuasaan, Soeharto mendekatkan diri dengan Sukarno dan PKI. Melalui pendekatan tersebut, Soeharto memainkan peranan dengan memanfaatkan orang-orang PKI, seperti Untung dan Latif untuk membantunya dalam pemberontakan. Tuduhan pun dialihkan kepada pihak PKI yang dianggap sebagai pihak yang melancarkan pemberontakan itu dengan menculik para jendral dan berusaha membunuh presiden. Walaupun rencana untuk membunuh Presiden Sukarno gagal dilakukan.²⁴⁷

Peristiwa G 30 S menyebabkan terjadinya gangguan keamanan masyarakat. Dalam situasi itu, Soeharto memanfaatkan keadaan masyarakat yang penuh antipati kepada pemerintah dengan mendesak Sukarno untuk segera mengantisipasinya. Soeharto melihat kedekatan Sukarno dengan PKI menimbulkan antipati pada masyarakat. Antipati rakyat kepada pemerintahan

²⁴⁷ *Ibid.*

Sukarno itu dilakukan dengan melakukan aksi anti PKI, seperti aksi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1967 dengan mengajukan tuntutan rakyat atau dikenal dengan nama Tritura. Tritura ini berisi: pembubaran PKI, bersihkan kabinet dari pengaruh komunisme dan turunkan harga. Melihat kondisi di atas, Soeharto memanfaatkan situasi itu dengan mengajukan desakan agar Presiden Sukarno mengeluarkan surat perintah (Supersemar) untuk membubarkan PKI pada tanggal 11 Maret 1966.²⁴⁸ Surat perintah itu dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan bahwa Soeharto diberikan mandat oleh Sukarno untuk menjalankan tindakan penertiban keamanan. Kewenangan penertiban keamanan yang ditimpakan oleh Sukarno kepada Soeharto lewat Supersemar itu dijadikan sebagai usaha awal merangkai kekuasaan politik pada masa pemerintahan Orde Baru.

Peran I.J. Kasimo pada masa Orde Baru dimulai dengan ikut serta dalam usaha pembubaran PKI dalam rangka mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di samping usaha pembubaran PKI, I.J. Kasimo juga berperanan dalam DPA, kabinet, serta dalam partai politik meskipun tidak berpengaruh besar karena PKRI terintegrasi dalam PDI. Di era pembangunan, I.J. Kasimo pun turut berperan dalam membangun kehidupan bernegara baik politik maupun hukum.

²⁴⁸ *Ibid.*

Beberapa waktu sebelum terjadi G 30 S di awal tahun 1965, I.J. Kasimo telah mensinyalir bahwa akan terjadi pemberontakan. Dengan adanya dugaan itu maka ia melakukan antisipasi kepada anggota DPP Partai Katolik dan umat Katolik dari pengaruh dan aksi komunisme. Dalam upaya mengantisipasinya, I.J. Kasimo mensosialisasikan kepada anggota DPP Partai Katolik dan Umat Katolik dengan mengeluarkan uraian mengenai peristiwa-peristiwa pada tahun 1965-1967, yaitu sebagai berikut:

“DPP Partai Katolik beberapa waktu sebelum pecahnya pemberontakan PKI, telah mensinyalir kemungkinan-kemungkinan terjadinya pemberontakan tersebut. Karenanya DPP Partai Katolik mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Maka I.J. Kasimo dalam Partai Katolik telah mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi kemungkinan tersebut, sehingga sebenarnya slagorde Katolik boleh dikata *combat-ready*” menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan.²⁴⁹

Dengan sikap antisipasi ini, ketika gerakan G 30 S terjadi golongan Katolik dapat siaga dan cepat memegang peranan penting untuk menumpas gerakan tersebut.

Dalam upaya mewujudkan isi Tritura terutama mengenai pembubaran PKI, I.J. Kasimo bersama anggota PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Pemuda Katolik (AMKRI), dan Wanita Katolik mendukung serta membantu TNI dalam penumpasan PKI. Peran Partai Katolik dalam upaya penumpasan PKI ini dengan mengkoordinir pemberantasan dalam Kesatuan Aksi Penggayaan Gestapu (KAP-Gestapu). PKRI dan PMKRI pada

²⁴⁹ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 452.

tingkat tertentu (propinsi) berperan sebagai *"policy and decision maker"* (pembuat kebijakan dan keputusan) dan mitra dalam bekerjasama dengan organisasi lain atau TNI, sehingga penumpasan PKI berjalan lancar. Di setiap daerah (kabupaten), PMKRI dan AMKRI bergerak sebagai *"stoot-troep"* (pelaksana kebijakan). Wanita Katolik berperan sebagai pendukung persiapan dan suplayer (penyedia perbekalan).²⁵⁰

Menimbang bahwa Tritura tidak mungkin tercapai hanya dengan turun ke jalan dalam suatu aksi massa, maka perlu upaya dari politisi untuk menggunakan saluran-saluran lembaga kenegaraan serta hukum yang ada supaya Tritura dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan pertimbangan itu, I.J. Kasimo, Frans Seda dan Cosmas Batubara mewakili Partai Katolik, mengeluarkan gagasan supaya pemerintah mengadakan Sidang MPRS sebagai forum guna meminta pertanggungjawaban Pimpinan Nasional atas timbulnya pemberontakan, serta mengkonsolidasikan strategi dan program Orde Baru. Hal ini dapat diartikan bahwa I.J. Kasimo dan wakil Partai Katolik lainnya menuntut kepada pemerintah mengenai revitalisasi pengembalian tertib hukum di Indonesia serta penegakan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.²⁵¹

Upaya pengajuan prasaran kepada pemerintah dalam hal revitalisasi tertib hukum di Indonesia tersebut di atas membawa pengaruh pada diri I.J. Kasimo

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

sebagai penyalur pendapat yang baik. Peran I.J. Kasimo dalam hal pengajuan pendapat yang baik bagi pemerintahan tersebut memberikan pertimbangan dari pemerintah untuk mengangkat I.J. Kasimo sebagai anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) pada tahun 1960.²⁵² Sumbangan I.J. Kasimo di DPA ini mulai terlihat ketika terjadi keresahan dalam masyarakat pada tahun 1960-an. Menurut pendapat I.J. Kasimo, keresahan yang timbul dalam masyarakat itu disebabkan dari segi ekonomi, yaitu terdapat pembangunan ekonomi yang kebijakannya diambil alih oleh pemerintah, mulai dari Bimas Gotong Royong, penanaman modal asing, transfer devisa, serta kebijakan impor. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu memberikan peluang besar bagi terjadinya penyelewengan, seperti adanya tindak korupsi.²⁵³

Keresahan yang terjadi di dalam masyarakat mengundang aksi protes dari golongan mahasiswa dan pelajar. Aksi protes yang digelar oleh golongan mahasiswa dan pelajar tersebut meyarakan anti korupsi dalam gerakan “Mahasiswa Menggugat” dan “Angkatan Pelajar Indonesia 70”.²⁵⁴ Menanggapi keresahan masyarakat dan beberapa aksi massa itu, pemerintah bertindak tegas dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tanggal 17 Desember 1967. Pada tanggal 31 Januari 1970, TPK menyelenggarakan sidang

²⁵² Lihat pada lampiran 15, hlm. 241.

²⁵³ Tashadi.dkk., *op.cit.*, hlm. 214.

²⁵⁴ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 96.

dengan menghasilkan suatu keputusan, yaitu membentuk Komisi Empat. Komisi Empat bertujuan untuk menilai kebijakan pemerintah, meneliti hasil-hasil pemberantasan korupsi selama pemerintahan berlangsung, serta memberikan saran atau pertimbangan mengenai kebijakan yang perlu diambil untuk memberantas korupsi secara fundamental.²⁵⁵ Beberapa tokoh yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi anggota Komisi Empat ini ialah I.J. Kasimo, Wilopo, H. Anwar Cokroaminoto, dan Prof. Ir. Johannes.²⁵⁶

Setelah pemerintahan berjalan selama lima bulan, Komisi Empat merangkum cara kerja beberapa lembaga negara. Hasil kerja yang dicapai oleh Komisi Empat ini kemudian dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada kepala negara. Surat itu berisi referensi mengenai cara kerja pemerintah selama 5 bulan. Dalam surat itu, Komisi Empat merangkum dan mengajukan beberapa pertimbangan kepada Presiden Soeharto, mengenai cara kerja dari: 1) Kejaksaan Agung, Tim Pemberantasan Korupsi serta kebijakan di bidang hukum dalam hal pemberantasan korupsi pada umumnya; 2) PN. Pertamina; 3) Bulog (Badan Urusan Logistik); 4) Perhutani; dan 5) lembaga administrasi negara.²⁵⁷ Setelah mengadakan observasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hukum, Komisi Empat menarik kesimpulan sebab-sebab yang ditimbulkan atas korupsi. Komisi Empat menyebutkan ada tiga

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ Masyarakat Transparansi Indonesia, *Beberapa Tim Anti Korupsi Yang Pernah Dibentuk (1967-2000)*, dalam www.transparansi.com, 2000, hlm. 1-3.

faktor penyebab meluasnya korupsi, yaitu: *pertama*, karena seseorang terdorong untuk memenuhi keperluan hidup karena pendapatan yang tidak mencukupi; *kedua*, karena penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri; *ketiga*, karena penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.²⁵⁸

Mengenai masalah korupsi yang disebabkan oleh dorongan seseorang untuk memenuhi keperluan hidup karena pendapatan yang tidak mencukupi, Komisi Empat memberikan dua alternatif jalan keluar, yakni: *pertama*, melalui kenaikan gaji pegawai negeri, dan *kedua*, dengan melakukan rasionalisasi, yaitu penyaluran tenaga kerja ke bidang lain yang masih berkaitan dengan politik dan penempatan tenaga kerja. Mengenai ketenagakerjaan, Komisi Empat berpendapat bahwa Indonesia terdapat kelebihan tenaga kerja yang tidak diperlukan dan kekurangan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal ini, Komisi Empat menyarankan kepada pemerintah agar membuka sarana pendidikan dan pelatihan, sehingga tenaga kerja yang berlebihan tersebut dapat disalurkan pada bidang-bidang yang masih berkekurangan.²⁵⁹

Mengenai masalah korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kesempatan serta kekuasaan, Komisi Empat menyarankan kepada penegak hukum dengan tindakan secara tegas, antara lain dengan membuat peraturan yang tegas dan jelas serta mengadakan pengawasan yang ketat terhadap

²⁵⁸ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 96.

²⁵⁹ *Ibid.*

koruptor, sehingga kemungkinan penyelewengan itu dapat dicegah. Untuk merealisasikan penegakan hukum itu, Komisi Empat tidak hanya menyarankan kepada penegak hukum untuk membuat peraturan yang tegas saja, tetapi menuntut upaya nyata dari penegak hukum untuk bertindak tegas supaya TPK diperkuat dengan tenaga-tenaga pokok yang profesional, baik berpikir maupun bertindak obyektif berdasarkan keahlian dan pengalaman tanpa pandang bulu.²⁶⁰

Selain bidang hukum dan masalah korupsi, Komisi Empat juga menyoroti bidang ekonomi yang ada di Indonesia dengan melihat cara kerja lembaga-lembaga ekonomi negara seperti PN Pertamina, Bulog, dan Perhutani. Lembaga ekonomi negara tersebut menjadi perhatian dari Komisi Empat karena terdapat beberapa cara kerja yang menyimpang dari tujuan pembangunan sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi merosot. Tujuan pembangunan yang diarahkan oleh Presiden Soeharto ialah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan adanya beberapa penyimpangan dari lembaga-lembaga perekonomian di atas menyebabkan masyarakat tidak mengalami kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, Komisi Empat mengajukan pertimbangan dan saran kepada Presiden mengenai cara kerja PN Pertamina, Bulog, dan Perhutani.²⁶¹

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ *Ibid.*

Dalam laporan mengenai PN Pertamina, Komisi Empat mengemukakan bahwa lembaga itu tidak berpegang teguh pada pasal 33 UUD 1945. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam negara Indonesia di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Melihat cara kerja PN Pertamina selama lima bulan, Komisi Empat memandang bahwa segi pengolahan dan pengelolaan kekayaan alam berupa sumber minyak bumi terdapat adanya beberapa penyimpangan, antara lain: *pertama*, terjadi pemborosan; *kedua*, produksi yang terlalu besar karena menuntut pengolahan barang industri; *ketiga*, penjualan dengan harga yang setinggi-tingginya; *keempat*, tidak memperhatikan keringanan biaya; *kelima*, keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk dana pembangunan fisik saja; *keenam*, pengelolaanya tidak membuat pencadangan kekayaan alam untuk generasi mendatang.²⁶² Dengan demikian, Komisi Empat menilai bahwa PN Pertamina belum memenuhi pasal 33 UUD 1945. Untuk merevitalisasi PN Pertamina ini, Komisi Empat mengajukan saran supaya beberapa permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan pengelolaan/manajemen anggaran yang baik dan seimbang. Dalam menata anggaran, PN Pertamina perlu *control of budget*²⁶³ (pengaturan anggaran) supaya tidak terjadi penyelewengan anggaran. Dengan pengaturan ... ini produksi minyak dari PN Pertamina dapat dimanfaatkan secara efektif dan

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*

efisien. Dengan demikian kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sesuai pasal 33 UUD 1945.

Dalam laporan mengenai Bulog (Badan Urusan Logistik), Komisi Empat, mempertanyakan mengenai pengeluaran dana yang besar oleh pemerintah untuk dialokasikan kepada badan ini. Beberapa pertanyaan Komisi Empat itu ialah: 1) Apakah stabilisasi harga beras dapat dicapai ? Apakah stabilisasi harga dipengaruhi dari Bulog saja ? ; 2) Apakah pembiayaan yang dikeluarkan Bulog benar-benar memadai dan sesuai dengan tujuan yang dicapai ? Menurut pendapat Komisi Empat, tinggi rendahnya harga beras ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: jumlah produksi beras/pangan dalam negeri; kelancaran distribusi; situasi pasar beras internasional, persediaan devisa oleh pemerintah untuk impor beras dan sebagainya. Dengan demikian Bulog bukan satu-satunya instansi yang menentukan stabilisasi harga beras.²⁶⁴

Untuk mengantisipasi penyimpangan pemanfaatan dana yang besar oleh Bulog, pemerintah perlu membentuk instansi-instansi yang lebih spesifik yang ikut berperan membantu Bulog dalam mengurus lapangan usaha yang sangat luas. Dalam hal ini, bidang tugas Bulog dipersempit sehingga struktur organisasinya dapat disederhanakan.²⁶⁵ Bidang-bidang tugas Bulog yang perlu disederhanakan itu ialah bidang produksi, distribusi, dan ekspor-impor. Penyederhanaan administrasi ini dapat menghindarkan dari tindakan

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

overlapping bidang tugas bulog yang terlalu luas. Untuk mendukung cara kerja pada bidang-bidang yang spesifik pada Bulog perlu dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait,²⁶⁶ misalnya mengenai pengaturan produksi beras ekspor dan impor perlu dikoordinasikan dengan instansi atau kementerian perdagangan yang mengurus bidang ekspor-impor.

Dalam laporan mengenai pengelolaan kehutanan, Komisi Empat, menganggap perlu diadakannya perubahan syarat-syarat pemberian hak pengusaha-pengusaha kayu hutan. Menurut Komisi Empat, pengusaha kayu hutan harus sungguh-sungguh menjamin pencegahan penghancuran hutan, pembangunan industri kayu, pemasarar kayu-kayu secara ilegal dan standarisasi harga yang tinggi bagi kayu yang diekspor.²⁶⁷ Komisi Empat mensinyalir praktek-praktek negatif yang dilakukan pengusaha untuk mengeksploitasi hutan. Praktek negatif itu dapat dilihat dari upaya pengusaha nasional yang telah memperoleh hak penguasaan hutan dengan cara menjual hak tersebut kepada broker luar negeri dengan harga US \$ 5 per meter kubik. Broker-broker tersebut kemudian mengadakan kontrak dagang dengan kontraktor asing dengan mengambil keuntungan yang lebih besar.²⁶⁸

Melihat kondisi pengeksploitasian hutan di atas, Komisi Empat memberikan beberapa saran kepada pemerintah agar mengadakan pengawasan yang ketat

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Ibid.*

dan tindakan yang tegas terhadap kasus kontrak perusahaan kayu yang disalahgunakan. Untuk menjaga pengelolaan kehutanan di Indonesia perlu penegasan dari Perhutani untuk memperketat syarat-syarat kontrak antar pengusaha kayu. Usaha tersebut dilakukan untuk menjamin kelestarian hutan. Kelestarian hutan Indonesia dilakukan juga dengan usaha pengelolaan kayu yang baik dan penanaman kembali hutan.²⁶⁹

Selain badan atau lembaga ekonomi negara di atas, Komisi Empat juga memberikan kritik terhadap lembaga eksekutif dan administrasi negara. Komisi Empat menilai perlunya pemberantasan korupsi di bidang eksekutif dan administrasi. Untuk mengantisipasinya, Komisi Empat menyarankan bahwa setiap pejabat mengadakan koreksi terhadap bawahannya baik secara represif maupun preventif. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah ialah mengawasi semua peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya mencegah tindakan penyelewengan.²⁷⁰

Dalam bidang administrasi negara, Komisi Empat menyarankan agar menegakkan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kedisiplinan ini perlu ditegakkan dalam pengaturan anggaran negara. Anggaran negara perlu diatur secara disiplin supaya pendapatan dan pengeluaran dapat tersusun dengan baik dan terhindar dari tindakan korupsi.

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Ibid.*

Cara-cara pemberantasan korupsi yang disarankan oleh Komisi Empat kepada pemerintah di atas bersifat sementara. Meskipun demikian, Komisi Empat membuat rencana jangka panjang dengan membuat RUU Anti-Korupsi secepat mungkin. Tetapi kenyataan di lapangan Komisi Empat hanyalah sebagai penasihat kiasan semata. Komisi Empat tidak memiliki kekuatan politik untuk menindak korupsi dalam pemerintahan. Menurut I.J. Kasimo, bekerja dalam Komisi Empat ialah bekerja dalam kerahasiaan tanpa keterbukaan. Pertimbangan-pertimbangan yang diajukan kepada pemerintah dianggap sebagai masalah intern. Pemerintah tidak menghendaki bila hasil penelitian dan laporan Komisi Empat disiarkan.²⁷¹ Berdasarkan ungkapan I.J. Kasimo itu mengartikan bahwa keberadaan Komisi Empat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diartikan juga bahwa Komisi Empat tidak difungsikan dengan baik oleh pemerintah.

Tidak difungsikannya Komisi Empat dengan baik oleh pemerintah tersebut memperlihatkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Pola kekuasaan Presiden Soeharto yang otoriter itu tidak hanya terlihat dari tidak difungsikannya lembaga DPA dan Komisi Empat sebagai dewan penasihat, tetapi juga pola pembangunan yang terencana. Pola pembangunan terencana ini dilakukan untuk merangkai kekuasaan selama pemerintahan Orde Baru berlangsung.

²⁷¹ *Ibid.*

Secara hakiki, tujuan pembangunan nasional yang tersirat dalam UUD 1945 sangatlah mulia yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Tujuan hakiki pembangunan itu mendapat dukungan dari I.J. Kasimo dengan ikut serta mewujudkan pembangunan nasional. Dalam ikut serta mewujudkan pembangunan nasional, Partai Katolik bersama Majelis Wali Gereja Indonesia (MAWI), mendukung perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat dalam merealisasi cita-cita nasional. Dukungan Partai Katolik dan MAWI itu yang tersirat dalam surat yang dikeluarkan dalam Sidang MAWI tanggal 26 Oktober 1966 dengan judul: "Pernyataan Bersama Majelis Agung Waligereja Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi". Dalam Sidang MAWI tanggal 15-25 Oktober 1966, sebelumnya membahas topik mengenai: struktur, dialog karya, kerja keras, efisiensi, tugas kewajiban pemerintah, persoalan pegawai, karya produktif, sosialisme Indonesia, masalah tenaga ahli dan peranan swasta.²⁷² Pembahasan dalam sidang yang diadakan oleh Partai Katolik dan Dewan Harian MAWI itu menunjukkan bahwa umat Katolik suka bekerja secara universal, tidak untuk kepentingan umat Katolik sendiri, melainkan rela bekerjasama dengan siapapun dan golongan manapun, sehingga berbagai golongan secara bersama-sama memajukan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia atas dasar kegotong-royongan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²⁷³

²⁷² Y. Heri Siswanto, *loc.cit.*, hlm. 34-45.

²⁷³ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 454.

Surat ajakan dari MAWI bersama Partai Katolik tersebut, menumbuhkan animo umat Katolik untuk berpartisipasi dalam pembangunan di beberapa aspek/bidang kehidupan. Dalam bidang politik, Partai Katolik bersama dengan Golongan Karya dan ABRI menyetujui dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Mereka menolak usaha-usaha penyelewengan dan meniadakan Pancasila dan UUD 1945 khususnya di komisi II dan Komisi II yang terlalu dikonsentrasikan pada Piagam Jakarta.²⁷⁴ Komisi II bertugas merumuskan garis-garis besar politik pemerintahan, sedangkan Komisi III bertugas merumuskan dasar perlindungan hak-hak berpindah agama.²⁷⁵

Dukungan Partai Katolik dalam pembangunan dapat dilihat dengan disetujuinya ketetapan MPRS No. IX MPRS/1966, yang isinya mengikutsertakan Partai Katolik dalam pemilihan umum tahun 1971. Tap. MPRS No. IX MPRS/1966 menetapkan beberapa ketetapan di antaranya sebagai berikut: 1) Garis Besar Haluan Negara dengan bentuk Repelita; 2) pelaksanaan Repelita dilakukan dengan membentuk Kabinet Pembangunan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968; 3) Pemilu dilaksanakan dengan sifat luber (langsung, umum, bebas, rahasia) selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli

²⁷⁴ *Ibid.*

²⁷⁵ *Ibid.*

1971; 4) MPR mengadakan sidang untuk memilih presiden dan wapres; dan 5) presiden dan wapres menetapkan GBHN.²⁷⁶

*** Dukungan I.J. Kasimo terhadap ketetapan MPRS terlihat dalam ungkapan yang ditulisnya. Tulisan yang diungkapkan I.J. Kasimo itu dapat disebutkan sebagai berikut:

"Harus diakui bahwa tidak semua undang-undang yang disahkan oleh DPR-GR adalah tanpa cacat ataupun 100% dengan kehendak Fraksi Katolik, namun hal itu adalah hasil maksimum yang dapat diusahakan oleh Fraksi Katolik, justru karena Fraksi Katolik menghormati *the rule of the game*, sebagai manifestasi kegandrungan Fraksi katolik pada tegaknya *the rule of law*".

Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, Fraksi Katolik adalah fraksi yang gigih memperjuangkan agar rakyat benar-benar terwakili oleh mereka yang diinginkan oleh rakyat"

"Dalam usaha menyelamatkan kekayaan Negara agar dapat dimanfaatkan sejauh mungkin demi kepentingan umum, Fraksi Katolik telah banyak menyumbangkan pikiran bagi terciptanya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Sedangkan dalam rangka penegakan *the rule of law*, Rancangan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman oleh Fraksi Katolik mendapat amandemen berat sebelum diloloskan sebagai Undang-Undang."

"Kemacetan rancangan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Peraturan-Peraturan Pokok Pernikahan Umat Islam, Pokok-Pokok Pendidikan, Pokok-Pokok Kesejahteraan, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Perimbangan Keuangan dan sebagainya adalah justru karena Fraksi Katolik menghendaki agar setiap perundang-undangan yang ada benar-benar demi kepentingan seluruh rakyat tanpa diskriminasi, baik agama/kepercayaan, keturunan/ras, ataupun golongan, serta suku/daerah. Setiap produk perundang-undangan haruslah merupakan pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 45.²⁷⁷

Tulisan di atas mengungkapkan bahwa I.J. Kasimo menghendaki agar perundang-undangan yang ada benar-benar demi kepentingan seluruh rakyat

²⁷⁶ Ibid.

²⁷⁷ Ibid.



tanpa diskriminasi, baik agama/kepercayaan, keturunan/ras, maupun golongan, serta suku/daerah. Alasan I.J. Kasimo mendukung produk Ketetapan MPRS di atas karena ketetapan itu merupakan pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.

Ketetapan-ketetapan MPRS kian lama kian berkembang mengikuti pola pembentukan kabinet yang baru. Setelah pembentukan kabinet pertama pada 1966, membentuk Kabinet Pembangunan dan Repelita, kekuasaan Soeharto juga terlihat dengan melakukan usaha penyederhanaan partai politik. Usaha penyederhanaan partai politik ini direalisasikan dalam Tap MPRS No.XXII/1966, yang isinya menyatakan sebagai berikut: pemerintah bersama-sama dengan DPR segera membuat undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju penyederhanaan. Penyederhanaan partai ini bertujuan untuk mendukung proses pembangunan supaya lebih lancar dan pemerintah tidak disibukkan oleh urusan partai yang terlalu banyak.²⁷⁸

Pemberlakuan ketetapan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1973, di mana secara resmi Indonesia ditetapkan hanya ada dua partai politik dan satu golongan keormasan, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Lima partai politik sebelumnya yaitu PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba dan IPKI tergabung dalam Fraksi Demokrasi Pembangunan atau berfusi dalam PDI.²⁷⁹ Penyederhanaan sistem

²⁷⁸ Y. Heri Siswanto, *loc.cit.*, hlm. . 5.

²⁷⁹ Lihat pada lampiran 13, hlm. 230; dan Lampiran 14, hlm. 232.

kepartaian ini tidak di tingkat pusat saja, tetapi juga sampai cabang-cabang di daerah lima partai tersebut berfusi, sehingga nama lima partai ini hilang sama sekali.²⁸⁰

Ketidakberadaan Partai Katolik di kancah politik ini memberatkan hati bagi I.J. Kasimo sendiri. Ia sangat sedih akan penyederhanaan kepartaian itu berdasarkan pengelompokan berdasar ideologi agama tertentu. Menurut I.J. Kasimo, semestinya partai politik maupun Golongan Karya yang ada berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara yaitu Pancasila, bukan berdasar ideologi agama tertentu.²⁸¹

Perjuangan politik dan cita-cita I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan Partai Katolik ini tiada lagi. Namun demikian ia tetap berlapang dada dan sebagai seorang yang berjiwa besar ia tetap mendukung pembangunan, persatuan dan kesatuan. Bagi I.J. Kasimo kepentingan umum, persatuan dan kesatuan, pembangunan, kesejahteraan harus didahulukan di atas segala-galanya (*salus populi suprema lex*).²⁸²

Meski kuasa politik dalam naungan Partai Katolik tidak dimiliki lagi oleh I.J. Kasimo, namun dirinya masih tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. Wujud perhatian I.J. Kasimo dalam

²⁸⁰ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 464.

²⁸¹ Y. Heri Siswanto., *op.cit.*, hlm. 35.

²⁸² *Ibid.*

pembangunan masyarakat masih terlihat pada beberapa pemberian saran kepada Dr. Frans Seda. Frans Seda merupakan penerus golongan Katolik yang berkiprah dalam Kabinet Pembangunan RI. Kiprah Frans Seda dalam Kabinet Pembangunan dapat dilihat ketika dirinya menjabat sebagai menteri perkebunan (1964-1966), menteri pertanian (1966), menteri keuangan (1966-1968) dan menteri perhubungan (1968-1973).²⁸³

Dalam menjabat beberapa menteri di atas, Frans Seda sangat terbuka dengan pendapat-pendapat, saran-saran dan nasihat dari I.J. Kasimo. Bidang perkebunan dan pertanian yang diemban oleh Frans Seda dalam kabinet pembangunan tidak lepas dari pengaruh dan gagasan dari I.J. Kasimo. Salah satu gagasan dari I.J. Kasimo yang dilakukan oleh Frans Seda ialah sistem kontrak perkebunan yang dibangun I.J. Kasimo sejak masa perkebunan tebu di tahun 1930-an. Sistem kontrak perkebunan yang mengikat antara petani, pabrik, dan koperasi dijadikan sebagai contoh kebijakan Frans Seda pada masa pembangunan dengan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 1975 tentang TR. (Tabu Rakyat Intensifikasi).²⁸⁴

Gagasan dan saran dari I.J. Kasimo kepada Frans Seda mengartikan bahwa dirinya masih memperhatikan kesejahteraan rakyat meskipun secara langsung tidak ikut berperan. Menurut Frans Seda, I.J. Kasimo merupakan seorang teladan dan inspirator bagi dirinya dalam mewujudkan "*salus populi suprema*

²⁸³ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 483.

²⁸⁴ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 81-82.

lex". Moto dan cita-cita I.J. Kasimo yang berbunyi *salus populi suprema lex* itu direalisasikan oleh Frans Seda dalam usaha pembangunan masyarakat. Keberanian I.J. Kasimo untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan Demokrasi Pancasila memberikan keteladanan kepada Frans Seda²⁸⁵ dalam langkah dan kebijakan politik di era orde baru ini.



²⁸⁵ Frans Seda, *Kekuasan dan Moral Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Grasindo, 1996, hlm. 24.

BAB. IV

PERAN I.J. KASIMO DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 1921-1973

A. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Masa Kolonial 1921-1945

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda antara tahun 1900-1942, I.J. Kasimo berperan pada bidang sosial-kemasyarakatan baik dalam kehidupan bermasyarakat di Jawa maupun masyarakat-masyarakat di daerah lainnya. Hal itu ia upayakan demi mewujudkan kesejahteraan umum (*bonum commune*) atau demi kepentingan umum (*pro bono publico*).²⁸⁶ Di samping I.J. Kasimo berkarya sosial bagi lingkup masyarakat Jawa, ia juga melibatkan diri dalam komunitas keagamaannya yaitu dalam komunitas umat Katolik (Gereja) di Indonesia. Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan menggereja merupakan perwujudan dari motto hidupnya, yaitu *pro ecclesia et patria*“(demi gereja dan tanah air).²⁸⁷

Keterlibatan yang dilakukan oleh I.J. Kasimo dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di antaranya ialah diperhatikannya

²⁸⁶ Piet Go O.carm (ed), *Ajaran Sosial Gereja Dalam Konteks Indonesia*, Malang: Dioma, 1991, hlm. 15.;

²⁸⁷ Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: PT Gramedia, 1980, hlm. 174.

kesejahteraan kaum buruh di perkebunan karet di Merbuh, Kendal, Semarang tahun 1921. Ketika itu ia diangkat menjadi pegawai *aspirant landbouw consulent* (mandor yang bertugas mengawasi buruh-buruh perkebunan) oleh Pemerintah Hindia Belanda.²⁸⁸

Jabatan mandor yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda kepada I.J. Kasimo itu justru ia manfaatkan untuk melindungi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh perkebunan di tempat ia bekerja. Perhatian, perlindungan dan kepedulian I.J. Kasimo terhadap nasib buruh perkebunan di tempat ia bekerja ini terlihat pada usaha protes yang ia ajukan kepada pimpinan perkebunan mengenai pemecatan seorang buruh secara semena-mena pada tahun 1921. I.J. Kasimo memperotes pemecatan itu karena dirinya tidak mengetahui adanya instruksi yang melarang bagian tertentu menerima buruh yang telah dipecat oleh bagian lain. Seorang pegawai Belanda memperingatkan I.J. Kasimo, tetapi tidak secara langsung, melainkan melalui seorang mandor bangsa Indonesia. Dalam menghadapi peringatan dari pegawai Belanda itu, ia mengajukan protes dengan suatu pertanyaan, yaitu: "*Mengapa orang tersebut tidak datang sendiri memberitahukannya, atau paling sedikit menulis surat kepadanya? Ia tetap menpekerjakan buruh yang bersangkutan!*"²⁸⁹

Pengajuan protes yang dilakukan I.J. Kasimo kepada pegawai Belanda akhirnya menuai dampak negatif bagi dirinya. I.J. Kasimo dipanggil

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*

menghadap Pimpinan Tertinggi Perkebunan. Ia dituduh merusak ketertiban umum dan suasana kerja. Tindakan I.J. Kasimo yang dianggap menentang kepada kebijakan Belanda itu menyebabkan emosi bagi pihak Pimpinan Tertinggi Perkebunan. Sikap emosional Pimpinan Tertinggi Perkebunan itu diekspresikan dengan melontarkan suatu umpatan kepada I.J. Kasimo, bahwa dirinya dianggap sebagai "*apejongen*" (anak kera). Sebagai seorang terdidik yang mempunyai prinsip dan sikap, ia tidak dapat menerimanya. Sebagai reaksinya, I.J. Kasimo menanggapi ungkapan itu dengan membalikkan perkataan Pimpinan Tertinggi Perkebunan itu demikian: "*Anak kera? Berarti kau anggap ayahku kera?; "U bent zelf een aap"* atau berarti "*Tuan sendiri seekor kera!*"²⁹⁰

Keberanian sikap I.J. Kasimo di atas menunjukkan bahwa dirinya sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dengan usaha pembelaan dengan sikap protes. Meskipun perlakuan pejabat Pemerintah Hindia Belanda kepada I.J. Kasimo itu tidaklah menyenangkan bagi dirinya, namun hal itu justru membuka hatinya untuk terus memperjuangan masyarakatnya keluar dari kondisi ketidakadilan dan ketidaksejahteraan.

Usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat I.J. Kasimo lakukan terus dengan melibatkan diri pada lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan keterlibatan dalam pendidikan rakyat itu, ia mulai aktif mengajar. Keterlibatan

²⁹⁰ *Ibid.*

I.J. Kasimo sebagai pengajar dilakukan ketika dirinya menerima tawaran dari Soewardi untuk mengajar para siswa di Sekolah Menengah Pertanian di Tegalondo, Klaten pada tahun 1925.²⁹¹ Ketika mengajar di sekolah pertanian itu, I.J. Kasimo dan Soewardi mengupayakan kualitas SDM kepada para siswanya supaya terdidik untuk menjadi terampil dalam berswasembada tani, sehingga kelak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan mencukupi kesejahteraannya.

Setelah menetap di Tegalondo, I.J. Kasimo menikah dengan Mujirah pada tanggal 9 Juli 1925. Pada tahun 1931, mereka sekeluarga pindah dan menetap di Surakarta. Selain masih tetap mengajar di Tegalondo, I.J. Kasimo juga bekerja di Jawatan Pertanian Surakarta.²⁹² Sebagai pegawai Jawatan Pertanian Surakarta, I.J. Kasimo mengusahakan kesejahteraan masyarakat Surakarta dalam hal pertanian dan perkebunan. Salah satu usaha I.J. Kasimo dalam perkebunan ialah diperhatikannya nasib para pekerja perkebunan tebu di Surakarta mengenai sistem sewa tanah yang membebani rakyat. Usaha pembebasan rakyat dari sewa tanah itu ia lakukan dengan program bimbingan swasembada penanaman dan penghasilan tebu serta mengajukan bantuan kredit (*overbruggingskrediet*) kepada beberapa pabrik gula di Surakarta.²⁹³

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² *Ibid.*

²⁹³ *Ibid.*

Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat I.J. Kasimo juga menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga I.J. Kasimo menerapkan pemikiran modern kepada anak-anaknya. I.J. Kasimo mengajak anaknya untuk memikirkan keprihatinan masyarakat dan ikut terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil pendidikan keluarga ini nantinya menumbuhkan minat kemasyarakatan salah seorang putrinya yaitu Wartijah, yang menyatakan keinginannya untuk bekerja di Kantor PN Pertamina pada tahun 1937-an.²⁹⁴

Usaha memperhatikan kesejahteraan rakyat terus dilakukan oleh I.J. Kasimo dengan pengajuan saran-saran di dalam *Volksraad* antara tahun 1931-1943. Bidang kesejahteraan masyarakat yang menjadi perhatiannya ialah masalah pertanian dan pendidikan. Dalam bidang pertanian, I.J. Kasimo, berusaha melindungi kaum petani dari peraturan yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda, yang dianggap merugikan kepentingan petani. Sedangkan dalam bidang pendidikan perlu diupayakan karena dapat membantu perkembangan penduduk di bidang kebudayaan, sosial, dan ekonomi.²⁹⁵

Peranan I.J. Kasimo dalam bidang pertanian rakyat ialah perjuangan penolakan terhadap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda terhadap para petani. Dalam Sidang *Volksraad* tahun 1933, I.J. Kasimo menyarankan agar setiap peraturan baru yang dikeluarkan oleh

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*

pemerintah Hindia Belanda tidak merugikan kepentingan petani. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda disarankan supaya dapat mendorong petani dalam mengolah pertanian. Peraturan yang mendorong petani untuk berrswasembada ini dibuat supaya mereka dapat meningkatkan produksi hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, menambah penghasilan bagi petani, serta dapat meningkatkan gizi makanan rakyat. Salah satu hal yang diperjuangkan I.J. Kasimo dalam pertanian ini ialah ketika pemerintah bermaksud mengeluarkan peraturan baru di bidang impor beras (1933). Upaya yang dilakukan I.J. Kasimo dalam hal impor beras ini dilakukan dengan maksud agar Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah peraturan yang melindungi harga beras dalam negeri, sehingga penghasilan menjadi meningkat dan para petani tidak merasa dirugikan.²⁹⁶

Selain usulan dikeluarkannya peraturan impor beras, I.J. Kasimo juga mengupayakan swasembada pertanian dan perkebunan. I.J. Kasimo melihat bahwa para petani tidak diberikan usaha berswasembada, tetapi Pemerintah Hindia Belanda memaksa petani untuk membatasi beberapa jenis tanaman dalam mengolah tanahnya. Contoh upaya pembatasan jenis tanaman itu ialah petani diharuskan untuk mengolah lahan tembakau saja dan melarang menanam kacang tanah.²⁹⁷ Upaya Pemerintah Hindia Belanda ini menyebabkan petani kehilangan kebebasan untuk mengolah tanahnya sendiri.

²⁹⁶ *Ibid.*

²⁹⁷ *Ibid.*

Dalam menyikapi hal itu, I.J. Kasimo memberdayakan petani untuk berswasembada produksi hasil bumi rakyat.²⁹⁸ Dengan usaha swasembada hasil produksi ini, rakyat memperoleh penghasilan tambahan dan dapat meningkatkan gizi makanan rakyat. Dengan dimilikinya penghasilan tambahan dan peningkatan gizi makanan, rakyat dapat memperoleh kesejahteraannya.

Selain bidang pertanian, I.J. Kasimo juga memperhatikan bidang pendidikan rakyat. Wujud perhatian I.J. Kasimo dalam bidang pendidikan ini terlihat dalam usahanya memperjuangkan sistem, sarana dan kualitas pendidikan. Mengenai masalah sistem pendidikan yang berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, I.J. Kasimo menyadari bahwa pendidikan yang berlangsung bertujuan untuk mencetak tenaga/pegawai pribumi bagi Pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan asing saja. Melihat kondisi demikian, I.J. Kasimo mengkritik sistem pendidikan ini dengan mengajukan saran kepada pemerintah untuk membuka kesempatan pendidikan kepada para siswa pribumi dalam beberapa lapangan usaha, bukan hanya untuk mempersiapkan mereka dalam pekerjaan tertentu saja tetapi juga mempersiapkan generasi dalam rangka membantu perkembangan penduduk di bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi.²⁹⁹

Mengenai masalah sarana pendidikan, I.J. Kasimo menghimbau kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengusahakan perbaikan sarana

²⁹⁸ *Ibid.*

²⁹⁹ *Ibid.*

pendidikan/belajar yang tertata sehingga nantinya dapat mendukung pembelajaran. Salah satu masalah sarana belajar yang dikritik I.J. Kasimo ialah mengenai ketidakteraturan sarana belajar. Ketidakteraturan sarana belajar yang dimaksudkan di sini ialah tidak ter kategorisasinya buku-buku pelajaran di perpustakaan. Ketidakter kategorisasinya buku-buku pelajaran ini dapat dilihat dari pencampuradukan buku-buku bagi anak-anak dan orang dewasa dalam satu perpustakaan pada sekolah-sekolah kelas dua. Ketidakteraturan sarana belajar ini mempunyai akibat yang kurang baik bagi anak-anak,³⁰⁰ karena dapat mengakibatkan kesulitan belajar dalam memahami ilmu-ilmu yang dipelajari. Mengenai masalah kualitas pendidikan rakyat, I.J. Kasimo menyarankan kepada Pemerintah Hindia Belanda supaya meningkatkan mutu pendidikan dan jumlah guru. Kualitas pendidikan ini menjadi perhatian I.J. Kasimo karena terjadi kemerosotan pendidikan yang ditimbulkan dari kekurangan jumlah guru dan kualitas mengajarnya.³⁰¹

Selain dalam bidang pertanian dan pendidikan, I.J. Kasimo juga berperan dalam kegerejaan atau misi Katolik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai kaum awam Katolik, I.J. Kasimo juga memperhatikan keberadaan umat Katolik di tengah-tengah masyarakat. Usaha perlindungan golongan Katolik terlihat dalam perhatian I.J. Kasimo terhadap komunitas umat Katolik Indonesia yang

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ *Ibid.*

didorong oleh Frans van Lith, guru dan pendahulu perjuangannya, yaitu dorongan untuk mengembangkan misi sebagai umat Katolik Indonesia.

Sebagai orang Katolik, I.J. Kasimo mempunyai kewajiban untuk meneruskan perjuangan misi Van Lith di Indonesia. I.J. Kasimo mengemban misi Van Lith mengenai kekhawatiran hatinya terhadap Gereja Katolik yang terkaburkan citra agamanya karena dianggap sebagai agama kolonial yang dibawa oleh orang Kristen Belanda. Van Lith berusaha meluruskan pengertian misi Katolik kepada orang Jawa supaya mereka memahami secara benar mengenai maksud dari misi Katolik datang ke Indonesia. Uraian pelurusan misi Van Lith itu dapat dituliskan sebagai berikut:

“Apa yang sekarang praktis paling penting bagi kita, golongan Katolik, dalam soal pembaharuan tata-pemerintahan di Hindia itu? Kepentingan kita yang paling besar ialah agar kita golongan Katolik tidak dipersalahkan mengadakan sistem pemerintah, yang oleh golongan pribumi dipandang berat dan hina.

Umum di mana-mana tersiar pendapat bahwa tiap orang Belanda beragama Kristen. Pendapat umum itu sudah menimbulkan kerugian cukup banyak bagi Zending dan Misi, dan meskipun di Hindia hampir tidak ada orang Belanda yang beragama Katolik, namun segala kesalahan dan kekurangan golongan Belanda jatuh di pundak golongan Kristen. Tetapi pendapat tidak terlalu benar itu dapat diluruskan. Orang Jawa sekarang sudah mulai memandang Gereja Katolik sebagai suatu kekuatan yang berdiri di luar nasionalisme Belanda, dan yang mencari hubungan kasih dengan jiwa dan kepribadian Jawa. Orang harus terus bertambah yakin bahwa Gereja Katolik menghendaki dan menuju ke perkembangan dan kemajuan bangsa Jawa sepenuh-penuhnya; bahwa secara sembunyi-sembunyi tidak ada kepentingan pribadi bangsa Belanda, yang mengikat orang Katolik dengan kelompok penjajah dan pencari uang.”³⁰²

³⁰² M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 239.

Uraian misi Van Lith di atas menjelaskan misi Katolik yang ingin ikut mendukung perkembangan dan kemajuan bangsa Jawa sepenuhnya. Misi Van Lith tersebut dilanjutkan oleh I.J. Kasimo dengan membentuk organisasi pergerakan politik golongan Katolik Jawa (PPKD). PPKD ini merupakan wujud emansipasi golongan Katolik di Jawa di tengah-tengah masyarakat dalam rangka ikut serta memperjuangkan kemerdekaan.

Dalam mendirikan PPKD, I.J. Kasimo, menerangkan misi pembentukan suatu wadah perwakilan aspirasi golongan Katolik Jawa kepada perwakilan-perwakilan serikat atau persatuan badan bentukan Belanda. Salah satu penjelasan pelurusan visi pendirian PPKD itu dapat dilihat ketika I.J. Kasimo mendapat sanggahan dari pihak perwakilan Persatuan *Vakbonen* Pegawai Negeri atau PVPN (*Nederland Verbond van Vakvereenigingen* - Gabungan Serikat Sekerja Negeri Belanda), dalam Sidang *Volksraad* pada tanggal 3 Agustus 1933. Dalam Sidang *Volksraad* itu, Pandji Soeroso selaku wakil Persatuan *Vakbonen* Pegawai Negeri dan PVPN, menuduh bahwa I.J. Kasimo dan golongan Katolik Indonesia bukan orang-orang nasionalis sejati, karena arahnya ditentukan oleh Vikairs Apostulik. Menanggapi tuduhan itu, I.J. Kasimo menunjukkan emansipasi golongan Katolik Indonesia dalam ungkapannya yaitu bahwa tuduhan itu disebabkan karena kurang mengetahui kegiatan orang Katolik pribumi.³⁰³

³⁰³ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.* hlm. 38-39.

Dalam menanggapi ketidakjelasan Panji Soeroso, I.J. Kasimo menjelaskan bahwa golongan Katolik berdiri terlepas dari pengaruh hirarkis. Untuk mendukung penjelasan itu, I.J. Kasimo menguraikan mengenai orientasi serta bidang dalam berkarya yang terarah pada masyarakat Jawa dan bersifat permulaan lokal Jawa. Orientasi PPKD itu tertuang dalam pedoman pokok PPKD. Di dalam uraiannya, I.J. Kasimo menjelaskan juga mengenai keberadaan PPKD yang terlepas dari pengaruh hirarkis gereja KVP dan dari golongan Kristen.³⁰⁴ Penjelasan dan pelurusan keberadaan PPKD oleh I.J. Kasimo di atas bertujuan untuk melindungi golongan Katolik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, I.J. Kasimo sangat berperan dalam mengusahakan emansipasi Katolik. Dengan usaha emansipasi itu diharapkan orang Katolik Indonesia dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam upaya mengemansipasikan golongan Katolik di tengah-tengah masyarakat, I.J. Kasimo mengajukan pernyataan permohonan kepada Belanda supaya mengakiri penjajahan terhadap bangsa Indonesia dan golongan Katolik Indonesia. Pernyataan permohonan yang dilontarkan I.J. Kasimo menunjukkan jiwa solidaritasnya kepada golongan Katolik Indonesia dengan menuliskan penegasan bahwa dirinya sangat memperhatikan umat Katolik. Pernyataan permohonan I.J. Kasimo kepada orang-orang Belanda disebutkan demikian:

“.... Berlalulah sudah jaman penjajahan oleh bangsa kulit putih. Seorang kulit putih akan dapat beriahan untuk selama-lamanya menghadapi 100.000 orang Asia. Orang bermain api jika dengan tinggi hati ingin

³⁰⁴ *Ibid.*

menjajah orang Jawa, hanya dengan alasan karena ia orang Jawa. Akuilah hak-hak golongan pribumi jika kalian ingin hak-hakmu diakui. Di dalam gereja Kristus tidak ada orang Yahudi, orang Romawi atau orang Yunani. Jadi juga tidak ada orang Belanda atau orang Jawa. Dan apa yang di dalam gereja sejak semula sudah merupakan hukum, kini harus dijadikan hukum pula di luar gereja: orang Belanda, orang Indonesia dan orang Jawa mulai saat ini harus hidup rukun seperti saudara. Jika tidak, maka dalam waktu dekat pasti akan terjadi perpecahan.”³⁰⁵

Pernyataan yang ditulis oleh I.J. Kasimo kepada Pemerintah Hindia Belanda itu mengartikan bahwa di samping dirinya ingin menyadarkan orang Belanda yang menganut agama Kristen ataupun Katolik menjamin kebebasan beragama umat Katolik di Indonesia, juga mengajak bangsa Belanda untuk hidup saling toleransi dengan bangsa Indonesia sehingga kerukunan dapat terselenggara dalam kehidupan.³⁰⁶ Selain melindungi komunitas Katolik, pernyataan I.J. Kasimo itu juga mengharapkan supaya bangsa Belanda memberikan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya berperan dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan dengan usaha memperjuangkan kebebasan beragama dan kebebasan bermasyarakat di Indonesia.

Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat juga dilakukan pada waktu dikeluarkannya Petisi Sutarjo tanggal 15 Juli 1936. Ketika terlibat dalam perjuangan di GAPI dan ikut serta memperjuangkan Petisi Sutarjo tanggal 15 Juli 1936, I.J. Kasimo melakukan demonstrasi-demonstrasi yang berpihak pada

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ *Ibid.*

rakyat. Dalam aksi demonstrasi itu, I.J. Kasimo sangat gigih memperjuangkan jaminan-jaminan sosial bagi golongan buruh rendahan.³⁰⁷ Aksi yang diterjuni I.J. Kasimo itu dilakukan sebagai wujud jiwa solidaritas dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tanggal 8 Maret 1942 oleh Letnan Jendral Hitoysi Imamura merupakan masa yang tidak menguntungkan bagi golongan Katolik. Umat Katolik Indonesia juga mengalami penindasan yang berat oleh tentara Jepang, karena agama Katolik (agama yang berasal dari Barat) dianggap sebagai agama musuh bagi pihak Jepang. Penindasan dan ketidaktoleransian yang dilakukan oleh tentara Jepang seringkali dilakukan dengan cara menahan dan membunuh kaum rohaniwan dan biarawati Katolik. Korban jiwa yang dialami kaum biarawan dan biarawati karena penindasan oleh tentara Jepang antara tahun 1942-1945 berjumlah 74 jiwa para imam, 47 jiwa para bruder dan 160 jiwa para suster serta salah seorang uskup Maluku-Irian bernama Mgr. Aerts.³⁰⁸

Sebagai orang Katolik, I.J. Kasimo turut menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh perlakuan orang Jepang. Penderitaan yang ia alami ialah dirinya di masukan dalam penjara oleh polisi Jepang di Markas *Kenpetei* Timuran pada tahun 1942.³⁰⁹ Dengan kondisi demikian, maka I.J. Kasimo tidak

³⁰⁷ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 283.

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 46.

banyak berperan dalam kehidupan berniasyarakat. Namun setelah 53 hari dibebaskan dari penjara *Kenpei Timuran*, mulai terlihatlah peran I.J. Kasimo.

Setelah dibebaskan oleh *Kenpei Timuran* pada tahun 1942, I.J. Kasimo dipekerjakan oleh Jepang di Kantor Jawatan Pertanian Surakarta sebagai *adjun landbouw counsult* (sebagai mandor pertanian yang setingkat pegawai tinggi). Penempatan kerja oleh Jepang kepada I.J. Kasimo dengan posisi jabatan sebagai *adjun landbouw counsul*³¹⁰ menjadikan suatu kesempatan bagi dirinya untuk melakukan usaha dalam memajukan pertanian rakyat. I.J. Kasimo memanfaatkan kondisi masyarakat Surakarta yang feodalistik itu dengan mendekatkan diri kepada para mantri dan demang di bawahnya dalam upaya menggerakkan para petani berswasembada tani di wilayah itu. Para mantri dan demang tani di Surakarta itu sebagian besar ialah bekas muridnya sendiri ketika mengajar di Sekolah Pertanian Tegalondo, Klaten.³¹¹ Kondisi tersebut dijadikan peluang/kesempatan oleh I.J. Kasimo untuk mengupayakan kesejahteraan kehidupan masyarakat Surakarta di bidang pertanian. Hal itu dilakukan I.J. Kasimo dengan mengaktifkan demang dan para mantri setempat kepada para petani dalam hal produksi pertanian.

Meskipun pada masa pendudukan Jepang orang Katolik mengalami masa-masa yang kritis, I.J. Kasimo sebagai orang awam Katolik merasa terpanggil untuk menegakkan panji-panji semangat umat Katolik. I.J. Kasimo tidak mau

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ *Ibid.*

menjadi “*kate sing wanine neng omahe dhewe*” (menjadi ayam kerdil yang beraninya di kandangnya sendiri). Maka I.J. Kasimo mengupayakan perjuangan bagi umat Katolik pada dua bidang. Bidang perjuangan yang dilakukan I.J. Kasimo itu di antaranya: *pertama*, menyelamatkan Gereja dari kehancuran; dan *kedua*, memperjuangkan kedudukan yang sangat baik bagi umat Katolik di tengah konstelasi politik masyarakat dan negara setelah RI berdiri.³¹² Dalam hal ini, I.J. Kasimo memperjuangkan eksistensi gereja Katolik setelah pendudukan Jepang dan memperjuangkan emansipasi umat Katolik pada masa awal berdirinya RI.

Partisipasi I.J. Kasimo sebagai kaum awam Katolik dalam mewujudkan dua bidang perjuangan tersebut di atas merupakan upaya dalam rangka membantu Mgr. Soegijapranata di kalangan hirarki. Upaya untuk menjaga agar umat Katolik tetap eksis itu dilakukan dengan menggembleng dan memperteguh umat dalam cinta agama maupun seriositas religius, baik itu dari segi materiil yang minim (yang ditandai dengan adanya fasilitas, dana dan korban nyawa yang cukup memprihatinkan), maupun segi sprititual minim atau menipisnya iman Katolik.³¹³ Dalam hal ini, I.J. Kasimo juga memperlihatkan perannya dalam kehidupan menggereja.

³¹² A. Budi Susanto, S.J. (ed), *Harta dan Surga*, Yogyakarta: Kanis'us, 1990, hlm. 170.

³¹³ *Ibid.*

B. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Masa Demokrasi Liberal 1945-1955.

Mewakili golongan Katolik, I.J. Kasimo ikut serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat dengan membentuk partai yang lebih nasional dan lebih memasyarakat yaitu PKRI. PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) dibentuk pada kongres ke-dua Partai Katolik yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 8 Desember 1945.³¹⁴ Sedangkan kongres pertamanya dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 4 Agustus 1945. Pada kongres pertama diputuskan beberapa resolusi, antara lain mengenai hak kebebasan beragama, pendidikan dan pelayanan serta jaminan sosial. Dalam resolusi itu nampak jelas bahwa I.J. Kasimo sangat berperan dalam bidang pertanian. Salah satu wujud resolusi tentang jaminan sosial itu ialah, I.J. Kasimo menyarankan kepada pemerintah untuk berterus meningkatkan produksi bahan makanan bagi rakyat.³¹⁵

Pada kongres kedua tanggal 8 Desember 1945 di Yogyakarta, PKRI mulai menetapkan beberapa programnya, yaitu program yang tidak hanya memperhatikan masalah politik dan kenegaraan saja, tetapi juga masalah sosial kemasyarakatan, antara lain: pendidikan, kepemudaan, (dengan membentuk Angkatan Muda Katolik Kemerdekaan-AMKRI), kewanitaan (dengan

³¹⁴ Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian dan Parlemenaria Indonesia*, Jakarta: Deppen, 1954, hlm. 390.

³¹⁵ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 71-72.

membentuk Wanita Katolik RI), perburuhan (organisasi serikat buruh) dan keagamaan atau Gereja Indonesia.³¹⁶

Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMKRI) dibentuk sebagai sarana perjuangan unsur Katolik. Organisasi ini dibentuk sebagai organ pendukung partai untuk mewujudkan tujuan dan programnya, dengan upaya pengkaderan para pemuda Katolik Indonesia untuk bekerja semaksimal mungkin demi kemajuan masyarakat pada umumnya dan mempertahankan serta menegakkan berdirinya negara pada khususnya.³¹⁷ Dengan pengkaderan dalam pendidikan, kaum muda Katolik Indonesia diharapkan dapat melanjutkan program dan tujuan partai yaitu demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pembentukan AMKRI merupakan suatu program dari PKRI yang memperhatikan aspek pendidikan. Pentingnya program pendidikan didasarkan atas pertimbangan bahwa kemakmuran rakyat, keadilan sosial dan perbaikan hidup rohani rakyat yang berdasarkan Ketuhanan tidak bisa tercapai bila rakyat tidak mendapat pendidikan yang cukup. Menurut I.J. Kasimo, rakyat yang bodoh sukar diajak maju.³¹⁸ Pertimbangan mengenai pentingnya pendidikan itu tersirat dalam tulisan I.J. Kasimo mengenai dasar perjuangan PKRI-AMKRI

³¹⁶ I.J. Kasimo, *Peringatan Perjoangan, Politik Katholik Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 8-16.

³¹⁷ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 49.

³¹⁸ I.J. Kasimo, *op.cit.*, hlm. 8.

bahwa: "*pendidikan pemuda merupakan satu-satunya dasar*",³¹⁹ dengan diuraikan sebagai berikut:

"Dari sebab itu baiklah kalau kita menjediakan isi negeri jang sungguh bangsawan dan budiman menurut arti yang sudah kami uraikan, dengan mendidik anak-anak kita dengan berdasarkan nasional jang sehat dan selaras dengan permintaan djaman. Anak-anak kita, jang memang boleh disebut sebagai harta benda nusa dan bangsa yang termahal dan terindah, itulah jang harus disiap-sediakan supaja kelak hari menjadi penghibur, sokong dan sangga orang tuanya, mendjadi kekuatan dan kemegahan tanahnja."³²⁰

Berdasarkan pertimbangan dan alasan di atas, maka dikembangkanlah program-program pendidikan. Dengan program pendidikan yang dikembangkan dalam organisasi AMKRI dan bekerjasama dengan PKRI ini, diharapkan dapat mewujudkan suatu upaya pengkaderan pemuda Katolik Indonesia yang nantinya dapat memberikan sumbangsih bagi negara dan masyarakatnya.

Selain usaha pengkaderan dengan pendidikan, didirikannya AMKRI ini juga memiliki alasan lain yaitu sebagai sarana perjuangan³²¹ golongan muda Katolik Indonesia dalam rangka menjaga dan melestarikan sifat nasionalisme dengan tetap menjaga barisan tentara pelajar golongan Katolik. Barisan tentara pelajar Katolik ini terus dibina dalam AMKRI sehingga selama revolusi mereka dapat ikut andil dalam mempertahankan kedaulatan RI. Beberapa tokoh pemuda Katolik (AMKRI) yang ikut andil dengan rela gugur dalam membela dan

³¹⁹ I.J. Kasimo, *Dasar Perjuangan PKRI-AMKRI*, Jogjakarta: Canisius, 1948, hlm. 20.

³²⁰ *Ibid.*

³²¹ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 49-51.

mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya ialah Agustinus Adisucipto (Angkatan Udara) pada tanggal 29 Juli 1947 dan Slamet Riyadi (Angkatan Darat) pada tanggal 3 November 1950.³²²

Dalam hal pendidikan, I.J. Kasimo sebagai pemimpin PKRI mengupayakan pemajuan, perluasan persekolahan dan pendidikan dengan mendirikan sekolah bagi masyarakat di daerah-daerah. Pendirian sekolah Katolik di daerah-daerah itu di antaranya: SMT-K di Solo; SMT-AMKRI di Yogyakarta; dan SM di Kalasan.³²³ Upaya I.J. Kasimo dalam bidang pendidikan masyarakat ini tidak lepas dari visi perjuangannya dalam masyarakat, karena dengan pendidikan masyarakat Indonesia yang terdidik dapat memajukan kesejahteraan baik itu di tengah-tengah masyarakat, bangsa maupun negaranya. Alasan I.J. Kasimo memajukan pendidikan masyarakat ini didasarkan pada pemikiran/gagasan bahwa kemakmuran rakyat, keadilan sosial dan perbaikan hidup rohani rakyat yang berdasarkan Ketuhanan tidak bisa tercapai bila rakyat tidak mendapat pendidikan yang cukup.³²⁴

Selain membentuk organisasi AMKRI (Angkatan Muda Katolik Indonesia), I.J. Kasimo juga ikut berperan dalam pengembangan organisasi Wanita Katolik atau Pusara Wanita Katolik. Organisasi ini dibentuk untuk memperhatikan kepentingan sosial dan kewanitaan. Upaya pengkaderisasian pemuda Katolik

³²² M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 343-345.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ *Ibid.*

Indonesia tersebut diselenggarakan dalam program pendidikan yang diharapkan memupuk kepedulian terhadap masyarakat baik segi rohani maupun jasmani. Upaya itu dilakukan dengan jalan kongregasi, kepanduan, dan lain-lain. Melalui wadah tersebut, para pemuda Katolik Indonesia diharapkan menjadi generasi terdidik sehingga kelak menjadi wanita yang terbuka akan segala kewajibannya terhadap Tuhan, nusa dan bangsa, keluarga, dan masyarakat.³²⁵

Sebagai orang awam Katolik, I.J. Kasimo berperan dalam usaha mengemansipasikan agama Katolik di tengah-tengah masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, I.J. Kasimo menegaskan bahwa PKRI merupakan partai politik yang mengaspirasikan golongan Katolik Indonesia. Ia menegaskan bahwa Partai Katolik Indonesia merupakan bukan partai yang berbau kolonialis, tetapi berdasarkan sikap netral dengan mengemansipasikan golongan Katolik pada persamaan kepentingan nasional. Penegasan tersebut dijelaskan pada asas PKRI, bahwa organisasi ini berasaskan ajaran Katolik, namun bertujuan sama dengan perwakilan golongan rakyat lainnya yaitu demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.³²⁶

Dalam kehidupan menggereja, I.J. Kasimo memperhatikan dan menjunjung kebebasan beragama dan beribadat Katolik. Dalam upaya menjamin kebebasan beragama dan beribadat Katolik, I.J. Kasimo sebagai birokrat dan wakil golongan Katolik membuat surat tembusan kepada departemen/kementrian

³²⁵ *ibid.*

³²⁶ M.P.M. Muskens, Pr., *op.cit.*, hlm. 343.

agama dan jawatan-jawatan agama daerah.³²⁷ Salah satu usaha tembusan dari I.J. Kasimo kepada birokrasi keagamaan ialah dukungan dan tuntutan I.J. Kasimo terhadap Minimum Program yang dikeluarkan Gereja Room Katolik Jakarta pada tahun 1947. Isi Minimum Program yang didukung oleh I.J. Kasimo itu antara lain: (1) negara mengakui kemerdekaan agama masing-masing penduduk (tertuang pada Minimum Program pasal 1); dan (2) negara melindungi kebebasan beribadat umat Katolik. Perlindungan ini diatur dalam hukum pidana umum/*aglemeen strafrecht* (tertuang pada Minimum Program pasal 2).³²⁸

Selain mengatur masalah kebebasan beragama, Minimum Program itu juga memberikan kebebasan dalam hal sosial dan kesehatan rakyat. Kepada pihak *Gereja Room Katolik*, I.J. Kasimo, menuntut diberlakukannya ketetapan tentang peningkatan kesejahteraan sosial kepada pemerintah. Ketetapan tentang peningkatan kesejahteraan sosial itu tertuang pada Minimum Program pasal 1, yakni meliputi: pengurusan perkara sosial dalam hukum kesosialan; subsidi kepada usaha partikelir; pemeriksaan keselamatan umum tentang kebaikan dan pengembangan usaha.³²⁹

Sedangkan dalam hal kesehatan rakyat, I.J. Kasimo bersama pihak *Gereja Room Katolik* menuntut dikeluarkannya ketetapan mengenai penanganan

³²⁷ I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjoangan Politik Katholik Indonesia*, Djakarta: Dewan PKRI, 1949, hlm. 28.

³²⁸ *Ibid.* (Lihat lebih lanjut pada lampiran 9, hlm. 218.)

³²⁹ *ibid.* (Lihat lebih lanjut pada lampiran 9 hlm. 218.)



kesehatan rakyat. Ketetapan itu terlihat dalam Minimum Program, meliputi: (1) pemerintah wajib mengusahakan kesehatan rakyat (ditetapkan pada pasal 1); (2) pemerintah wajib memberi panduan aturan-aturan serta menambah kekurangan usaha partikelir, supaya kesehatan masyarakat terjamin baik dan beberapa hal yang dapat merugikan kesehatan masyarakat dapat dieliminir (pada pasal 2); (3) pemerintah wajib mengadakan penetapan syarat dan aturan, agar pemeliharaan kesehatan umum mencukupi kebutuhan yang pertama bagi keselamatan umum (pasal 3).³³⁰

Selain melakukan pengajuan saran tembusan terhadap birokrasi keagamaan, I.J. Kasimo juga ikut turun tangan dalam mengurus kesejahteraan masyarakat secara umum. *Kasimo Plan* merupakan program kesejahteraan yang dikeluarkan I.J. Kasimo tanggal 20 November 1947 dalam kebijakan kenegaraan. Namun secara lokal pada tiap-tiap daerah suatu masyarakat, I.J. Kasimo menyarankan pada pemerintah daerah tertentu untuk ber-swastambada produksi berdasarkan pada hasil tanaman tertentu. I.J. Kasimo menyarankan kepada pemerintah daerah Sumatera Timur untuk mengefektifkan lahan kosong sekitar 281.271 hektar dengan menanam bibit unggul aneka tanaman pertanian dan perkebunan.³³¹ Untuk daerah Pulau Jawa, I.J. Kasimo menyarankan kepada pemerintah daerah setempat mengadakan usaha intensifikasi pertanian dengan penanaman bibit padi unggul. Untuk setiap desa, I.J. Kasimo menyarankan

³³⁰ *Ibid.* (Lihat lebih lanjut pada Lampiran 9, hlm. 218.)

³³¹ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 58-59.

dibukanya perambahan lahan kebun-kebun dengan bibit-bibit yang baik. Perambahan lahan kebun ini dilakukan dengan usaha penanaman jagung dan ketela guna menanggulangi masalah kekurangan pangan yang sangat mendesak pada waktu itu.³³²

Selain program intensifikasi produksi pertanian dan perkebunan, I.J. Kasimo juga mengintensifkan bidang-bidang lain, yaitu dengan usaha pengembangan ternak, sandang dan tekstil. Dalam bidang pertekstilan, I.J. Kasimo mengintensifkan produksi penanaman kapas, penenunan, maupun membatik. Dalam bidang perindustrian, ia juga mendorong pengembangan usaha pada bidang perindustrian dengan diprioritaskan pada industri sandang, dan alat-alat pertanian.³³³ Dalam hal ini, I.J. Kasimo mengefektifkan potensi daerah masyarakat setempat untuk memproduksi secara intensif pada lahan atau bidang garapan berdasarkan jenis dan potensi hasil komoditinya, baik yang berpotensi pertanian, perkebunan, peternakan, pertekstilan maupun perindustrian.

Setelah Agresi Militer Belanda II meletus tanggal 19 Desember 1948, Indonesia kembali mendapat ancaman luar negeri. Ancaman luar negeri yang dialami Indonesia ini mendapat perhatian dari PBB dengan mendorong usaha penyelesaian damai dalam perundingan. Usaha perundingan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949 di Den Haag

³³² *Ibid.*

³³³ *Ibid.*

yang merupakan sebagai jalan penyelesaian kedaulatan antara Indonesia dan Belanda. Dalam konferensi itu terdapat kompromi yang menyatakan bahwa pihak Indonesia menyetujui penyerahan/pengakuan kedaulatan Belanda (yang tertulis dalam Piagam Penyerahan/Pengakuan) pada tanggal 30 Desember 1949 dengan syarat Indonesia membentuk negara Serikat (RIS).³³⁴

Pada masa pemerintahan RIS (1949-1950), selain dalam birokrasi pemerintahan pusat, I.J. Kasimo juga berperan dalam memimpin di sektor perkebunan di beberapa daerah dengan menjabat dalam sebagai Kepala Jawatan Perkebunan Pusat. Sebagai Kepala Jawatan Perkebunan Pusat, I.J. Kasimo selalu mengadakan peninjauan ke beberapa daerah sekaligus membantu mengupayakan pendirian dan pengefektifan lapangan usaha. Upaya itu ia lakukan pada tahun 1950, ketika Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo dan Menteri Pertanian Tandiono Manu meminta kepada I.J. Kasimo untuk menjabat sebagai pegawai di Jawatan Perkebunan Pusat dan direktur Kopra Fonds.³³⁵

Sebagai direktur Kopra Fonds, I.J. Kasimo terus melakukan peninjauan pada sentra produksi kopra di beberapa daerah. Daerah-daerah yang menjadi sasaran perhatian I.J. Kasimo ialah usaha peningkatan produksi kopra di Kalimantan Barat dan sekitar Teluk Tomini, Minahasa.³³⁶ Hal ini mengartikan

³³⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-21, Dari Perang Kemerdekaan Sampai Pelita III*, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1988. hlm. 57.

³³⁵ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 73.

³³⁶ *Ibid.*

bahwa secara makro, produksi kopra Indonesia ditangani oleh para menteri dalam rangka stabilisasi pengaturan impor; namun secara mikro, semuanya tidak lepas dari peran I.J. Kasimo dalam mengupayakan sumber komoditi kopra di daerah-daerah.

C. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1955-1965.

Peran dan usaha I.J. Kasimo dalam bidang perkebunan (dengan menjabat sebagai Kepala Jawatan Perkebunan) sejak tahun 1950 tetap ia lanjutkan pada masa demokrasi terpimpin ini. Wujud peran besar I.J. Kasimo dalam hal "perkebunan itu menjadikan dirinya dijuluki sebagai "Bapak Tebu Rakyat".³³⁷ Untuk melihat peran besar I.J. Kasimo dalam hal perkebunan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu potensi diri I.J. Kasimo dan usaha pada mulanya sehingga dirinya dapat disebut sebagai "Bapak Tebu Rakyat".

I.J. Kasimo merintis usaha perkebunan ketika dirinya menjabat sebagai *adjunct landbouw consulent* di Tegalondo, Klaten sejak tahun 1930-an.³³⁸ Usaha mula-mula yang ia lakukan ialah dengan mengamati dan mempelajari potensi sumberdaya bahan yang ada. Menurut pengamatan I.J. Kasimo, potensi daerah Tegalondo itu, merupakan daerah produksi perkebunan tebu dan industri gula yang pada waktu itu dijadikan lokasi produksi tebu/gula oleh

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ *Ibid.*

Pemerintah Hindia Belanda. Alasan I.J. Kasimo memilih tanaman tebu untuk percobaan praktek pengerjaan lahan perkebunan, yaitu: *pertama*, karena di daerah sekitar Tegalondo sebagian besar murid-muridnya akan bekerja pada perkebunan tebu dan pabrik gula; dan *kedua*, karena pada waktu itu tebu merupakan salah satu tanaman yang belum banyak ditanam oleh rakyat.³³⁹

Perhatian besar I.J. Kasimo terhadap buruh pekerja perkebunan tebu dapat terlihat dengan diperhatikannya masalah perkebunan tebu dari tahun 1930 sampai tahun 1950-an (dengan menjabat sebagai Kepala Jawatan Perkebunan Pusat). Sebagai Kepala Jawatan Perkebunan Pusat, I.J. Kasimo harus memberikan perhatian kepada semua jenis perkebunan yang ada. Namun berdasarkan pengalaman yang dilaluinya sejak tahun 1930-an, I.J. Kasimo tetap memberikan perhatian khusus pada perkebunan tebu.

Wujud perhatian dan sumbangan I.J. Kasimo dalam bidang perkebunan tebu dapat dilihat dari usaha mengeluarkan peraturan-peraturan baru di bidang perkebunan tebu serta produksi gula. Peraturan baru yang ia keluarkan pada tahun 1951 ialah suatu peraturan yang mengubah sistem sewa tanah menjadi sistem tebu rakyat.³⁴⁰ Sistem ini menganjurkan agar rakyat secara swasembada menanam tebu dan kemudian melalui koperasi, menjual tebunya kepada pabrik gula, berdasarkan suatu kontrak tahunan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Untuk mendorong pelaksanaan peraturan tersebut, I.J. Kasimo membentuk

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*

Jatra (Jajasan Tebu Rakyat), yaitu jaminan kredit pinjaman petani tebu kepada koperasi.³⁴¹

Ketika Indonesia mengalami arus nasionalisasi perusahaan pemerintah pada akhir tahun 1958, terdapat beberapa lapangan usaha perekonomian yang ditangani oleh pihak perusahaan nasional pemerintah pada berbagai sektor produksi. Kondisi demikian dialami juga pada sektor perkebunan tebu dengan adanya penetapan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) pada bulan Desember 1958 oleh seorang administrator perkebunan tebu dari daerah Cirebon bernama Barentz.³⁴² Usaha nasionalisasi perusahaan pada perkebunan tebu tersebut mendapat respon dari pihak rakyat. Rakyat menginginkan untuk mengambil hak kepemilikan lahan usaha sekitar 70 % dari tanaman tebu. Tetapi Barentz mengemukakan tuduhan bahwa 70% dari tanaman tebunya dibabat dan dirusak oleh rakyat.³⁴³

Mendengar tuduhan tersebut, I.J. Kasimo menyatakan pembelaan terhadap rakyat dengan menanggapi pernyataan Barentz sebagai berikut:

...bahwa ada banyak tanaman tebu yang dicuri, dibabat dan dirusak oleh rakyat, terutama disebabkan karena rakyat tidak mempunyai kepentingan. Mereka bekerja sebagai buruh kasar dengan upah yang rendah. Akan tetapi bagaimana keadaan tanaman tebu akan menghasilkan gula beberapa ribu ton, apakah perkebunan akan untung atau rugi, mereka sama sekali tidak ikut merasa berkepentingan. Inilah yang perlu diubah, yaitu agar rakyat juga ikut merasa mempunyai kepentingan di dalam perkebunan tebu itu.³⁴⁴

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ *Ibid.*

Pembelaan I.J. Kasimo di atas selain mengkritik pernyataan Barentz, juga meluruskan sistem yang dibangunnya, yaitu bahwa sistem sewa tanah perlu diganti dengan sistem kontrak. Menurut I.J. Kasimo, nasionalisasi perusahaan itu menyebabkan pabrik gula tidak menyewa tanahnya dari petani, dan pabrik mempekerjakan petani dengan upah sebagai bayaran atas penyewaan lahannya. Hal ini mengartikan bahwa petani merasa tidak berkepentingan atas tanahnya.³⁴⁵ Dengan sistem kontrak yang dibangun I.J. Kasimo, petani merasa berkepentingan dan memiliki atas lahan yang diolahnya. Hal itu akan membangkitkan produktivitasnya karena mereka akan menjaga tanaman tersebut dengan sebaik-baiknya. Produktivitas itu akan terus terjaga karena hidup mereka tergantung dari sektor itu.

Selain mengintensifkan tanaman tebu, I.J. Kasimo juga memberikan kebebasan berusaha dalam mengolah aneka jenis tanaman, seperti padi dan palawija. I.J. Kasimo berpendapat bahwa petani tetap harus memiliki kebebasan untuk menanam tebu, padi atau palawija. Liberalisme perkebunan yang I.J. Kasimo lakukan memberikan kebebasan kepada para petani untuk mengolah aneka tanaman lain dan tidak memaksa harus menanam tebu. Namun demikian, I.J. Kasimo sangat memperhatikan pada perkebunan tebu ini. Perhatian khusus I.J. Kasimo pada perkebunan tebu ini terlihat dengan diberikannya suatu bimbingan kepada petani mengenai pengolahannya serta

³⁴⁵ *Ibid.*

pengadaan fasilitas kredit (*overbruggingskrediet*) yang disalurkan lewat bank pemerintah kepada petani.³⁴⁶

Pengaruh usaha I.J. Kasimo dalam perkebunan tebu rakyat itu tidak hanya pada lingkup wilayah Surakarta saja tetapi meluas ke daerah-daerah lain. Salah satu contoh pemekaran wilayah perkebunan tebu itu di antaranya ialah daerah Malang Selatan. Pada perkebunan tebu di Malang Selatan, I.J. Kasimo menerapkan juga sistem kontrak. Sistem kontrak yang dibangun oleh I.J. Kasimo pada tahun 1954 terlihat dengan didirikannya Koperasi Petermas (Pertanian Tebu Rakyat Malang Selatan). Koperasi Petermas setiap tahunnya menyediakan kebutuhan tebu bagi Pabrik Gula Kribet Baru.³⁴⁷

Ikatan usaha antara Pabrik Gula Kribet Baru, Koperasi Petermas, dan petani perkebunan dalam sistem kontrak jual-beli tebu tidak lepas dari campur tangan I.J. Kasimo. Pada perkembangannya, ikatan usaha ini membuahkan kesejahteraan bagi petani Malang Selatan hingga tahun 1970-an. Di tahun itu ada tiga ribu orang petani yang berada di Kecamatan Gondanglegi dan Bululawang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Petermas. Para petani itu selalu mengadakan kontrak dengan pemilik Pabrik Kribet Baru (Kian Gwan Concern) yang pengaturannya meliputi: kesepakatan harga tebu dan penyerahan tebu tepat pada waktunya (secara berkala dan berkesinambungan).³⁴⁸ Dengan

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Ibid.*

pengaturan itu, pihak petani mendapatkan kesejahteraan karena rakyat mendapatkan keuntungan dari pihak pabrik dan pihak koperasi. Pihak pabrik pun juga mendapatkan keuntungan dari pihak petani yang selalu memproduksi tebu bagi kebutuhan pasar. Dengan kata lain sistem kontrak ini memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi beberapa pihak yang terjalin dalam ikatan kontrak tersebut.

Selain daerah Malang Selatan, perkebunan tebu juga diupayakan di daerah Pati dan Kudus, di mana tebu rakyat setempat digunakan untuk pembuatan gula mangkok. Selain berprestasi usaha dengan skala domestik pada daerah-daerah perkebunan di Indonesia, I.J. Kasimo juga berprestasi pada skala internasional. Sistem kontrak yang dibangun oleh I.J. Kasimo ini dianut oleh Kuba yang merupakan produsen gula terbesar di dunia, dan di Ethiopia, yang merupakan perusahaan gula raksasa milik Belanda.³⁴⁹

Usaha perkebunan yang telah dirintis oleh I.J. Kasimo sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda tidak pernah dilepaskan meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Jawatan Perkebunan Pusat pada tahun 1956. I.J. Kasimo tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan termasuk perkebunan tebu, meski dirinya telah menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus-25 Maret 1956).³⁵⁰ Meskipun telah melepaskan jabatan sebagai Kepala Jawatan Perkebunan pusat, I.J. Kasimo

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ Lihat pada lampiran 15, hlm. 233.

tetap memperhatikan perkebunan tebu rakyat sampai masa pemerintahan Orde Baru.

D. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pada Masa Orde Baru 1966-1973

Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat pada masa Demokrasi Terpimpin (1955-1965) nampak nyata dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha I.J. Kasimo dalam mensejahterakan rakyat itu terlihat dari hasil yang dicapai para petani perkebunan tebu di daerah Surakarta, Malang Selatan, Pati dan Kudus. Hasil yang dicapai I.J. Kasimo pada masa itu dilanjutkan terus hingga memasuki masa pemerintahan Orde Baru (1966-1973).

Pada era pembangunan (Orde Baru), I.J. Kasimo terus berperan dengan memberikan pengajuan atau sumbang saran kepada pemerintah dalam hal membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, mencakup sektor perkebunan dan pertanian. Sebagai tindak lanjut dalam upaya mensejahterakan petani, I.J. Kasimo menyarankan kepada pemerintah agar pabrik-pabrik gula milik PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) menganut sistem seperti pada pabrik Krebet Baru. Saran itu dikemukakan oleh I.J. Kasimo karena sampai tahun 1973, di Indonesia terdapat 50 buah pabrik milik negara yang masih menggunakan sistem berupa sewa tanah warisan jaman kolonial.³⁵¹ Sistem sewa tanah ini tidak mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Orde

³⁵¹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 81.

Baru, karena kesejahteraan rakyat belum tercapai bila pemerintah tidak mengubah sistem dari sistem sewa menjadi sistem kontrak

Untuk mewujudkan gagasannya, I.J. Kasimo melakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto pada tahun 1973 seraya mengajukan surat yang menuliskan tentang tebu rakyat.³⁵² Dalam surat itu berisikan prasaran dari I.J. Kasimo kepada Presiden Soeharto supaya sistem sewa tanah dihapuskan dan diganti dengan sistem tebu rakyat. Prasaran ini sengaja I.J. Kasimo ajukan kepada Presiden Soeharto supaya ia mau memperhatikan dan menindaklanjutinya. Setelah menerima saran dari I.J. Kasimo itu, Presiden Soeharto menindaklanjutinya dengan mengeluarkan kebijakan pengintensifasian tebu rakyat dengan mendelegasikan wewenang kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perindustrian. Untuk mendasari kebijakannya, Presiden Suharto mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 1975 tentang TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi).³⁵³

Masa peralihan dari Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) menuju Orde Baru dilatarbelakangi oleh kritisnya kondisi keamanan yang dipicu aksi pemberontakan G 30 S di tahun 1965. Gangguan keamanan ini menjadikan masyarakat sangat risau. I.J. Kasimo sebagai anggota masyarakat juga ikut merisaukannya. Dalam mengantisipasi kerisauan yang dihadapi masyarakat dan golongan Katolik, maka I.J. Kasimo menentang pengaruh komunisme.

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*

Menghadapi pengaruh ideologi komunisme ini, I.J. Kasimo mendasarkan perjuangan PKRI dengan prinsip ajaran sosial Gereja *Quadragessimo Anno 115* yang berisikan ajaran solidaritas dan keadilan sosial, supaya kebengisan *kapitalisme-liberal* dapat dimusnahkan dan pertentangan golongan-golongan/kelas-kelas sosial atau *klassenstrij* (dalam *sosialisme-komunisme*) dapat didamaikan dengan berusaha melindungi rakyat.³⁵⁴

Anti sosialisme dan komunisme ini sebenarnya merupakan suatu ajaran sosial gereja yang disusun dalam pedoman ajaran sosial Gereja oleh Paus Pius XI di Roma tanggal 15 Mei 1931 dan ditegaskan penerapannya oleh Paus Leo XIII dalam *Rerum Novarum* tahun 1891³⁵⁵ ketika di dunia mengalami Perang Dingin. Para paus tersebut sangat mengkhawatirkan akibat yang ditimbulkan dari komunisme dan sosialisme Marx berpengaruh besar dalam masyarakat. Kekhawatiran Gereja tersebut meliputi persoalan kaum buruh, baik itu meliputi ketidakadilan atas upah buruh hingga hak milik pribadi akibat kondisi keterasingan yang dilatarbelakangi oleh konsep penyeragaman (tidak ada perbedaan kelas) dan kepemilikan bersama dari ajaran Marx.³⁵⁶

Dengan berinspirasi ajaran sosial Gereja, I.J. Kasimo sebagai kaum awam Katolik turut serta melindungi nasib buruh dari ancaman liberalisme dan penguasaan hak milik pribadi dari ancaman komunisme. Bersama Uskup

³⁵⁴ I.J. Kasimo, "30 Tahun Gerakan Katolik di Indonesia: 1923-1953", dalam *Suara Katolik*, No. 4 Tahun 4, April 1953, Djakarta, hlm. 390-391

³⁵⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2003, hlm. xii.

³⁵⁶ Her Suharyanto dan Linda Tangdialla, *Kaum Buruh, Buah Hati Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 81-90.

Agung Djoyoseputro, Mgr Soegijapranata dan umat Katolik lainnya, I.J. Kasimo berperan aktif dalam menghadapi pengaruh komunisme dan aksi G 30 S demi keselamatan masyarakat, gereja dan negara. Dalam menghadapi pengaruh dan aksi itu, I.J. Kasimo mengajak anggota partainya untuk menentang komunisme dengan membuat rumusan asas perjuangan Partai Katolik di tahun 1967, dengan mencantumkan tri-asas perjuangan, yaitu keadilan, subsidiaritas dan pluralisme dalam kesatuan Pancasila.³⁵⁷ Asas itu mengartikan bahwa golongan Katolik ikut memperjuangkan keadilan sosial, tanggung jawab dan kemajemukan dalam menjaga kesatuan Pancasila.

Pengaruh persaingan antara liberalisme dan komunisme yang berkembang di Indonesia ini mendapat reaksi kontra dari golongan Katolik. I.J. Kasimo sebagai kaum awam Katolik bersatu dengan kaum agamawan Gereja berjuang melawan pengaruh liberalisme dan komunisme. I.J. Kasimo bersama Mgr. Soegijapranata berupaya untuk menolong dan mengangkat kaum miskin dari segala golongan, suku ataupun agama secara struktural.³⁵⁸ Untuk mewujudkan masyarakat keluar dari kondisi keterasingan dan pengaruh liberalisme itu, I.J. Kasimo dan Mgr. Soegijapranata mengupayakan pengentasan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka menolong puluhan juta rakyat Indonesia yang terbelenggu dan miskin dengan usaha *conditio sine qua non*, yang artinya

³⁵⁷ Tim Penulis, "10 Tahun Sidang Terakhir Dewan Partai Katolik", dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1983, hlm. 9.

³⁵⁸ A Budi Susanto S.J. (ed), *Harta dan Surga*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 171.

mengkondisikan masyarakat supaya terlepas dari belenggu liberalisme dan komunisme secara struktural.³⁵⁹ Usaha I.J. Kasimo dan Mgr. Soegijapranata untuk melepaskan pengaruh tersebut dilakukan dengan membatasi dominasi kaum elit Katolik yang menonjol dalam masyarakat, baik itu pegawai, guru, priyayi maupun pedagang.³⁶⁰

Peran I.J. Kasimo dalam melaksanakan karya kerasulan awam tersebut di atas tentunya mendapat perhatian dari Sri Paus nantinya. Perhatian dan penghormatan Sri Paus terhadap kontribusi I.J. Kasimo dalam kehidupan menggereja ini diwujudkan dengan memberikan gelar kehormatan yaitu sebagai *Komander Ordo Santa Silvester* dengan bintang perak besar pada tahun 1952.³⁶¹

Selain masalah sosial dalam masyarakat, I.J. Kasimo juga memperhatikan masalah perekonomian rakyat. Menurut I.J. Kasimo perekonomian yang mensejahterakan masyarakat ialah perekonomian yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁶² Menurut Frans Seda, I.J. Kasimo sangat mendukung tegaknya ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 karena di dalamnya menguraikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini sesuai dengan motto hidupnya yaitu *salus populi suprema lex*, yang mengartikan bahwa kesejahteraan rakyat adalah

³⁵⁹ *Ibid.*

³⁶⁰ *Ibid.*

³⁶¹ Lihat pada lampiran 1, hlm. 208.

³⁶² Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 107.

hukum yang tertinggi. Dengan adanya landasan konstitusional UUD 1945 yang menguraikan keadilan sosial adalah tugas utama dari negara, maka pemerintah hendaklah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁶³

Dukungan I.J. Kasimo dalam pemerintahan Orde Baru dapat terlihat ketika arah pemerintahan Orde Baru ini secara teoritis tercantum dalam GBHN 1973. Menurut I.J. Kasimo, GBHN 1973 yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual. Hakikat pembangunan nasional itu dirumuskan sebagai usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.³⁶⁴ Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur inilah yang didukung oleh I.J. Kasimo, karena pembangunan masyarakat yang dicita-citakan pemerintah tersebut sesuai dengan cita-cita perjuangannya sejak awal, yaitu kemakmuran adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex*). Pernyataan dukungan I.J. Kasimo kepada pemerintah itu terlihat dalam ungkapannya bahwa ia ikut mendukung tegaknya "*the rule of law*", karena produk perundang-undangnya merupakan pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.³⁶⁵

³⁶³ Frans Seda, *Kekuasaan dan Moral Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Grasindo, 1996, hlm. 7.

³⁶⁴ J.B. Banawiratma, S.J.(ed), *Gereja dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1986, 98-99.

³⁶⁵ M.P.M. Muskens, Pr., *loc.cit.*, hlm. 465.

Garis Besar Haluan Negara yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru tahun 1973 sangat relevan dengan prinsip ajaran sosial Gereja. Bila dilihat dari sudut pandang gereja dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, GBHN tahun 1973 mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan liberalis dan sosialis. GBHN 1973 yang mengarahkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sangat relevan dengan prinsip ajaran sosial Gereja tentang *Quadragesimo Anno* 115 yang menganjurkan solidaritas cinta sosial dan keadilan sosial,³⁶⁶ dan ajaran sosial tentang *bonum comune* (kesejahteraan umum) dalam *Rerum Novarum* 118.³⁶⁷ Dengan demikian I.J. Kasimo sangat mendukung pemerintahan Orde Baru karena keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dalam pemerintahannya.

Meskipun secara sosial ekonomi kemasyarakatan I.J. Kasimo sangat mendukung pemerintahan Orde Baru, tetapi secara politik ia sangat kecewa. Rasa kekecewaan I.J. Kasimo terhadap kehidupan politik di era Orde Baru ini karena secara politis kekuatan partainya sudah tidak berperanan lagi dalam politik dan pemerintahan, yaitu adanya ketetapan penyederhanaan sistem

³⁶⁶ I.J. Kasimo, "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia 1923-1953", dalam *Suara Katolik*, No.4. Tahun 4 April 1953, Jakarta: hlm. 390-391.

³⁶⁷ Piet Go, O' Carm (ed), *Ajaran Sosial Gereja Dalam Konteks Indonesia*, Malang: Dioma, 1991, hlm. 16.

kepartaian dalam Tap MPRS No XXII tahun 1966 tentang penyederhanaan dari multi partai menjadi 3 partai, yaitu PPP, Golkar dan PDI. Dengan ketetapan ini, maka PKRI berfusi ke dalam PDI.³⁶⁸

Meskipun kecewa terhadap ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966, namun I.J. Kasimo tetap mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat haruslah didahulukan di atas segala-galanya berdasar motto *salus populi suprema lex*.³⁶⁹ Tidak berperannya I.J. Kasimo dalam berpolitik itu, tidak menyebabkan pudarnya semangat solidaritas dan subsidiaritas untuk tetap mengaspirasikan golongan Katolik dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga agar golongan Katolik tetap eksis dalam kehidupan masyarakat, I.J. Kasimo membentuk suatu yayasan dengan nama Yayasan Kasimo.

Yayasan Kasimo didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1973, dalam rapat Dewan Partai Katolik. Pendirian Yayasan Kasimo ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: *pertama*, bahwa setelah difusikannya PKRI dalam tubuh PDI, Partai Katolik memutuskan untuk membentuk suatu yayasan yang nantinya diharapkan dapat menampung kegiatan-kegiatan di luar politik praktis;³⁷⁰ *kedua*, pertimbangan akan keinginan menampung inspirasi dan

³⁶⁸ Lihat pada lampiran 13, hlm. 230; dan lampiran 14, hlm. 232.

³⁶⁹ Y. Heri Siswanto, *loc.cit.*, hlm. 35.

³⁷⁰ Tim Penyusun, "Prakarta Dari Redaksi", dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1984, hlm. 2.

aspirasi Katolik,³⁷¹ *ketiga*, harapan untuk mewariskan nilai cinta kasih di dalam perjuangan dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat dan bernegara kepada generasi penerus Katolik;³⁷² dan *keempat*, pertimbangan dan kesadaran mengenai pentingnya arti komunikasi di antara umat Katolik Indonesia, terutama menyangkut kerasulan awam, sehingga muncul gagasan untuk membentuk wadah komunikatif itu dalam yayasan ini.³⁷³ Untuk mengupayakan komunikasi ini diterbitkanlah Majalah “Solidaritas”, yaitu suatu majalah yang disusun oleh Tim Penulis dari Yayasan Kasimo.³⁷⁴

Yayasan Kasimo ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, maupun keagamaan. Harapan dan cita-cita Yayasan Kasimo kepada masyarakat diarahkan pada tiga sasaran pokoknya, yaitu: *pertama*, kebebasan yang bertanggung jawab (subsidiaritas); *kedua*, keadilan: keadilan legal (hukum) dan keadilan sosial; dan *ketiga*, *sosio-pluralisme* yang bersatu dalam solidaritas Pancasila.³⁷⁵ Harapan dan cita-cita itu diwujudkan dengan mengadakan program pendidikan bagi generasi muda agar termotivasi untuk tugas dan kewajibannya di masa datang dan untuk berdarma bakti bagi masyarakat, bangsa dan negara.

³⁷¹ Tim Penyusun, “Yayasan Kasimo Diterima Presiden”, dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1984, hlm. 5.

³⁷² *Ibid.*

³⁷³ Tim Penyusun, “Pengantar dari Redaksi”, dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1985, hlm. 2.

³⁷⁴ Tim Penyusun, “Prakarta dari Redaksi”, dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1984, hlm. 2.

³⁷⁵ Tim Penyusun, “Yayasan Kasimo Diterima Presiden”, dalam Majalah *Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1984, hlm. 5.

Setelah Yayasan Kasimo berdiri di tahun 1973, I.J. Kasimo tidak berperanan lagi terlibat secara langsung di lapangan, tetapi hanya dengan sumbang pikiran kepada para anggota penerusnya untuk tetap meneruskan cita-cita perjuangannya di tengah-tengah masyarakat. Visi dan misi I.J. Kasimo dalam Yayasan Kasimo untuk mengajak orang Katolik berperanan dalam kehidupan bermasyarakat masih dilanjutkan dengan mengestafetkan misi itu kepada para penerusnya, yaitu: Drs. Ben Mang Reng Say, sebagai ketua yayasan dan F.S. Wignyosumarsono, sebagai sekretarisnya.³⁷⁶

Upaya I.J. Kasimo dalam penyelenggaraan pendidikan kepada generasi penerus Katolik pada masa-masa awal berdirinya Orde Baru ini sebenarnya sudah dilakukan dengan mendirikan Yayasan dan Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 1960, bersama para cendekiawan Katolik Indonesia. Dalam pendirian universitas itu, I.J. Kasimo diangkat sebagai pelindung Yayasan Atma Jaya.³⁷⁷ Selain Universitas Atma Jaya, I.J. Kasimo juga mendirikan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1967.³⁷⁸ Pendirian Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen ini memberikan kemajuan dan peningkatan dalam pembangunan yang disertai kemajuan yang seimbang dalam peningkatan keahlian dan keterampilan dalam bidang manajemen.³⁷⁹

³⁷⁶ *Ibid.*

³⁷⁷ Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, h m. 179.

³⁷⁸ Yunita Tjokjrodinata, *Perginya Pelopor Pendidikan Manajemen Indonesia*, dalam ideroscop. www.google.com, 2005.

³⁷⁹ Tim Wartawan Kompas, *op.cit.*, hlm. 156.

Setelah dibentuknya Yayasan Kasimo di tahun 1973, para anggota pengurus Yayasan Kasimo, mulai memperhatikan bidang pendidikan. Usaha pengurus Yayasan Kasimo dalam pendidikan itu mula-mula diwujudkan pada tahun 1967 dengan pembinaan kelompok kerja Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembinaan kerja kelompok Katolik itu diharapkan meningkat menjadi bidang pendidikan kader kerja sosial dalam segala bidang.³⁸⁰ Pada perkembangan selanjutnya, para pengurus yayasan terus melanjutkan usaha pengembangan pendidikan dengan membentuk pendidikan formal. Salah satu hasil pengembangan pendidikan formal yang dilakukan oleh penerus I.J. Kasimo dalam Yayasan Kasimo itu ialah dengan mengadakan pendirian universitas swasta di Jember dengan nama Universitas Katolik Kasimo pada tahun 1985.³⁸¹

Selain bidang pendidikan masyarakat, I.J. Kasimo berperan dalam bidang ekonomi swasta. Peran I.J. Kasimo dalam bidang ekonomi swasta itu dapat dilihat ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Perkembangan Ekonomi yang berkedudukan di Jakarta pada awal tahun 1966.³⁸² Pada tahun-tahun yang sama, I.J. Kasimo ikut menjadi pendiri dan presiden direktur komisaris PT. Asuransi Ramayana.³⁸³ Perhatian I.J. Kasimo pada bidang ekonomi swasta yang sedang digelutinya ini yang menjadikan suatu alasan

³⁸⁰ Tim Penyusun, "Tajuk", dalam *Majalah Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1976, hlm. 2.

³⁸¹ Tim Penyusun, "Renungan Yayasan Kasimo", dalam *Majalah Solidaritas*, Jakarta: Yayasan Kasimo, 1985, hlm. 21.

³⁸² Tim Wartawan Kompas, *loc.cit.*, hlm. 179.

³⁸³ *Ibid.*

dirinya untuk tidak terlibat secara langsung dalam kepengurusan Yayasan Kasimo. Hal itu dikarenakan bahwa minat dan perhatian I.J. Kasimo sendiri masih ingin memfokuskan pada ekonomi pembangunan masyarakat di sektor swasta. Keterlibatan I.J. Kasimo dalam bidang ekonomi swasta ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan usaha pengkaderan golongan Katolik dalam pendidikan telah diserahkan kepada Drs. Ben Mang Reng Say dan F.S. Wignyosumarsono.

Untuk mendukung pembangunan masyarakat di era pembangunan I.J. Kasimo berperan dalam pengembangan kebudayaan dan informasi. Peran I.J. Kasimo dalam upaya pengembangan informasi dan budaya terlihat dengan didirikannya majalah "Intisari" pada tahun 1963 dan surat kabar harian "Kompas" pada tahun 1965 bersama PK. Oyong dan Jacob Oetama.³⁸⁴ Dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, I.J. Kasimo juga turut mendirikan percetakan buku dengan nama PT. Gramedia. Dalam mendirikan percetakan itu, I.J. Kasimo diangkat sebagai komisaris PT Gramedia.³⁸⁵ Pendirian beberapa badan usaha swasta tersebut dilakukan I.J. Kasimo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wawasan informasi dan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh I.J. Kasimo tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi pengembangan masyarakat Indonesia yang modern, maju dan sejahtera.

³⁸⁴ *Ibid.*

³⁸⁵ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN

Perjalanan hidup I.J. Kasimo yang dimulai ketika lahir tanggal 10 April 1900 hingga meninggal tanggal 1 Agustus 1986 tidak lepas dari peran besarnya. Peran besar I.J. Kasimo itu dapat dilihat dari kontribusinya baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat di Indonesia 1921-1973. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Latar belakang kehidupan I.J. Kasimo sangat kompleks. Kompleksitas latar belakang kehidupannya itu, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan yang melingkupinya. Aspek pendidikan yang diperoleh I.J. Kasimo menjadikan dirinya memiliki jiwa nasionalis dan humanis untuk memajukan kondisi sosial ekonomi negara dan masyarakatnya yang tertindas dan terjajah ke arah yang lebih sejahtera. Melihat kondisi masyarakat dalam keadaan terjajah dan tidak sejahtera itu menumbuhkan motivasi dan cita-cita I.J. Kasimo untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengabdikan diri pada gereja dan tanah air. Maka ungkapan atau motto hidup I.J. Kasimo dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu berbunyi: "*salus populi suprema lex*" (kesejahteraan adalah hukum yang tertinggi), "*pro bono publico*" (demi kepentingan umum) dan "*pro ecclesia et patria*" (demi gereja dan tanah air).
2. Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973, dapat disebutkan dalam bidang politik dan pemerintahan. Peran I.J. Kasimo dalam

kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973, meliputi: *pertama*, membentuk Partai Katolik Jawa (PPKD) di Yogyakarta tanggal 5 Agustus 1923; *kedua*, menyalurkan aspirasi rakyat dengan prasaran kepada Pemerintah Hindia Belanda dalam Sidang *Volksraad* pada bidang politik dan ketatanegaraan, yaitu dengan mengadakan pengajuan perombakan di bidang ketatanegaraan; *ketiga*, terlibat pergerakan politik dalam GAPI (Gabungan Aksi Politik Indonesia) dengan demonstrasi dan konsolidasi dalam palemen untuk memperjuangkan Petisi Sutarjo pada tanggal 21 Mei 1939; *keempat*, menjabat sebagai *adjun landbouw consult* (pegawai tinggi konsultan dalam bidang pertanian) di bawah birokrasi pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono XI dengan mengusahakan kesejahteraan rakyat; *kelima*, perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan dengan ikut serta dalam perundingan-perundingan (Linggajati tanggal 10 November 1946 dan KMB tanggal 23 Agustus-2 November 1949); *keenam*, berkiprah dalam lembaga negara (KNIP, Kabinet/Menteri, DPR-RIS, dan DFA); *ketujuh*, membuat program *Kasimo Plan* pada tanggal 20 November 1947; *kedelapan*, penolakan Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957; *kesembilan*, ikut mendirikan Liga Demokrasi pada tanggal 24 Maret 1960; *kesepuluh*, pembangunan ekonomi dengan menjabat sebagai menteri Perekonomian Kabinet Burhanuddin Harahap dan pada pemerintahan Orde Baru.

3. Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973, dapat disebutkan dalam bidang sosial, ekonomi swasta, budaya, pendidikan, dan agama/kegerejaan. Peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973, meliputi: *pertama*, upaya perlindungan hak-hak

pekerja/buruh perkebunan pada tahun 1921; *kedua*, penyelenggaraan pendidikan dengan berprofesi sebagai guru di Sekolah Menengah Pertanian di Tegalondo, Klaten pada tahun 1925; *ketiga*, mengembangkan swasembada perkebunan khususnya tebu dengan sistem kontrak, sehingga I.J. Kasimo disebut sebagai “Bapak Tebu Rakyat”; *keempat*, mengembangkan iman umat Katolik di tengah kehaicuran atas pendudukan Jepang; *kelima*, pengkaderan generasi Katolik dengan pendidikan dalam AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia) dan Wanita Katolik; *keenam*, intensifikasi perkebunan kopra; *ketujuh*, perlindungan kaum buruh dari pengaruh komunisme; *kedelapan*, pembangunan ekonomi swasta dengan mendirikan Bank Perkembangan Ekonomi dan PT Asuransi Ramayana di tahun 1960; *kesembilan*, pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan informasi dengan mendirikan Majalah “Intisari” (1963), Surat Kabar “Kompas” (1965), dan penerbitan/percetakan PT. Gramedia (1970); *kesebelas*, pendirian Yayasan Kasimo di tahun 1973 untuk mewadahi aktivis Katolik dalam upaya mengaspirasikan gagasan di luar politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Adaby Darban, dkk. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwana IX*. Jakarta: Depdikbud Proyek ISDN.
- Ali Moertopo. 1981. *Strategi Pembangunan Nasional*. CSIS: Jakarta.
- Anhar Gonggong. 1993. *Mgr. Albertus Soegijapranata, S.Y. Antara Gereja dan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Arbi Sanit. 1981. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta kekuasaan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Banawiratama, J.B. (ed). 196. *Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budi Siswanto, A. (ed). 1990. *Harta dan Surga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Penerangan (Deppen). 1970. *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Pradja paramita.
- Dkakidae, Daniel. 1985. *Partai Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonsesia*. Jakarta: Litbang Kompas LP3ES.
- , 1981. *Pemilihan Umum di Indonesia Sakti Pasang Naik dan Surut Partai Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah* (terj.) Jakarta: UI. Press.
- Hamid Zulkifli (ed), *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Feire, Paulo. 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (terj). Jakarta: Gramedia.
- Feith, Herbert. 1957. *The Indonesian Elections of 1955*. Intern Report Series Modern Indonesian Projects, Southeast Asia Program, Cornell.



- Feith, Herbert. and Lance (eds.) 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Cornell University Press: Ithaca and London University: Ithaca and New York.
- Her Suharyanto dan Tangdialla, Linda. 2004. *Kaum Buruh, Buah Hati Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Imam Suhadi. 1981. *Pemilihan Umum 1955, 1971, 1977, Cita-Cita dan Kenyataan Demokrasi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII.
- Jacobs. T. 1979. *Dinamika Gereja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Jahja Muhaimin, dkk. 1971. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Seri Penerbit Skripsi Terbaik.
- , 1985. *Kamus Istilah Politik*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Kansil, C.S.T. 1990. *Sistem Pemerintahan Indoensia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasimo, I.J. 1948. *Dasar-Dasar Perdjongan Kami*, Jogjakarta: Canisius.
- , 1948. *Dasar-Dasar Perdjongan PKRI-AMKRI*. Jogjakarta: Canisius.
- , 1949. *Peringatan Perdjongan Politik Katholik Indonesia*. Djakarta: Dewan PKRI.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1980. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Vol II. Cetakan Ketiga. Jakarta: Tira Pustaka.
- Kementrian Kemakmuran Djogjakarta. 1947. *Dokumen Rencana Kemakmuran Istimewa Tahun 1946*. Jogjakarta: Kementrian Kemakmuran.
- Kementrian Penerangan RI. 1954. *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2003. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Yayasan Bentang Budaya.

- Litbang Kompas, 1999. *Partai-Partai di Indonesia Ideologi Strategi dan Program*. Jakarta: Gramedia.
- Ljphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensiil Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Maarif, Syafii. 1988. *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Yogyakarta: Pustaka Parama Abiwara.
- Magnis-Suseno, Franz, 2001. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mariam Budiardjo. 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT: Gramedia.
- Marwati Djoned Poesponegoro dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Balai Pustaka: Jakarta.
- , 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Moedjanto, G. 2003. *Dari Pembentukan Pax Nerlansicha Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- , 1988. *Indonesia Abad Ke-20. jilid 1 Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*. Kanisius: Yogyakarta.
- , 1988. *Indonesia Abad Ke-20. jilid 2 Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai Pelita III*. Kanisius: Yogyakarta.
- Mubyarto dan Revrisond Bawsir (ed). 1989. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muskens, M.P.M. 1973. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia. jilid 4. Pengintegrasian di Alam Indonesia*. Dokpen MAWI: Jakarta.
- O'Carm, Piet Go (ed). 1991. *Ajaran Sosial Gereja Dalam Konteks Indonesia*. Malang: Dioma.

- Paulus, B.P. 1979. *Garis Besar Hukum Tata Negara Hindia Belanda*, Bandung: Alumni.
- Provinsial Serikat Yesus Indonesia. 1987. *Ciri-Ciri Khas Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Yesuit*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1983. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Modern English Press.
- Seda, Frans. 1992. *Simfoni Tanpa Henti Ekonomi Politik Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- , 1996. *Kekuasaan dan Moral Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Selo Soemardjan. 1964. *Serangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: F.E. UI.
- Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit. 2005. *Membaca Indonesia*. Jakarta: PT. Meta Adi Citrakreasi.
- Sumarsono Moestoko. 1986. *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwarno, P.J. 1989. *Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang*. Yogyakarta: Andi Offset.
- , 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2004. *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ricklefs, M.C. 1998. *Sejarah Indonesia Modern* (terj). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Rusdi Kantaprawira. 1983. *Sistem Politik Indonesia. Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Ruslan Abdulgani. H. 1992. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Prapantja.
- Rusli Karim, 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- Tashadi. dkk. 1993. *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*. Depdikbud Proyek IDSN: Jakarta.
- Tjetjep Rohendi Rohidi, dkk. 1994. *Pendekatan Sistem Sosial Budaya Dalam Pendidikan*. Semarang: FKIP Semarang.
- Tim Wartawan Kompas. 1980. *I.J. Kasimo dan Perjuangannya*. Gramedia: Jakarta.
- Umaruddin Masdar, dkk., 1999. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKIS.
- Wilhelm, Donald. 1981. *Indonesia Bangkit* (Terj. Suli Suleiman). Jakarta: UI Press.
- Zulfikar Gazali, dkk. *Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta: Depdikbud Proyek IDSN.

Majalah, Buletin dan Surat Kabar

- Anhar Gonggong. 1998. "Ignatius Loyola, Siapa Dia ?". Buletin *Spiritualitas Ignatian*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Feith, Herbert. 1978. "Dialog". Majalah *Prisma*. Jakarta: LP3ES
- Heri Hendarto, Y. SJ. 1990. "Romo Van Lith, SJ., Pembaharu Karya Missi Gereja di Jawa Tengah". dalam Majalah *Rohani*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Heri Siswanto, Y. 1996, "I.J. Kasimo dan Partai Katolik". Majalah *Driyarkara*. Seksi Publikasi Mahasiswa STF Driyarkara: Jakarta.
- Moedjanto.G. 1998. "Partisipasi Umat Katolik dalam Revolusi Kemerdekaan dan Pembangunan". Majalah *Widy: Dharma*. Universitas Sanata Dhrama Yogyakarta.
- Kasimo, I.J. 1953. "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia: 1923-1953". Surat Kabar *Suara Katolik* No. 4 Tahun 4. Jakarta.
- , 1971. "Maka Lahirlah Dia: Partai Katolik". Majalah *Warta Partai Katolik*. Edisi Khusus Pemilu 1971. Jakarta.
- Kelompok Studi Credo. 1996. "Sarekat Yesus". Majalah *Credo, Visi dan Tradisi Katolik*. Jakarta: Kelompok Studi Credo.
- Tim Penulis. 1974. "50 Tahun Perjuangan Politik Katolik di Indonesia". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1983. "10 Tahun Sidang Terakhir Dewan Partai Katolik". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1984 & 1985. "Prakata dari Redaksi". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1984. "Yayasan Kasimo Diterima Persiden". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1976. "Tajuk". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.

Majalah, Buletin dan Surat Kabar

- Anhar Gonggong. 1998. "Ignatius Loyola, Siapa Dia ?". Buletin *Spiritualitas Ignatian*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Feith, Herbert. 1978. "Dialog". Majalah *Prisma*. Jakarta: LP3ES
- Heri Hendarto, Y. SJ. 1990. "Romo Van Lith, SJ., Pembaharu Kayta Missi Gereja di Jawa Tengah", dalam Majalah *Rohani*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Heri Siswanto, Y. 1996, "I.J. Kasimo dan Partai Katolik". Majalah *Driyarkara*. Seksi Publikasi Mahasiswa STF Driyarkara: Jakarta.
- Moedjanto.G. 1998. "Partisipasi Umat Katolik dalam Revolusi Kemerdekaan dan Pembangunan". Majalah *Widy: Dharma*. Universitas Sanata Dhrama Yogyakarta.
- Kasimo, I.J. 1953. "30 Tahun Gerakan Politik Katolik di Indonesia: 1923-1953". Surat Kabar *Suara Katolik* No. 4 Tahun 4. Jakarta.
- , 1971. "Maka Lahirlah Dia: Partai Katolik". Majalah *Warta Partai Katolik*. Edisi Khusus Pemilu 1971. Jakarta.
- Kelompok Studi Credo. 1996. "Sarekat Yesus". Majalah *Credo, Visi dan Tradisi Katolik*. Jakarta: Kelompok Studi Credo.
- Tim Penulis. 1974. "50 Tahun Perjuangan Politik Katolik di Indonesia". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1983. "10 Tahun Sidang Terakhir Dewan Partai Katolik". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1984 & 1985. "Prakata dari Redaksi". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1984. "Yayasan Kasimo Diterima Persiden". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.
- , 1976. "Tajuk". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.

-----, 1985. "Renungan Yayasan Kasirno". Majalah *Solidaritas*. Jakarta: Yayasan Kasimo.

Suwarno, P.J. 1981. "Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia", Majalah *Driyarkara*. Seksi Publikasi Mahasiswa STF Driyarkara: Jakarta.



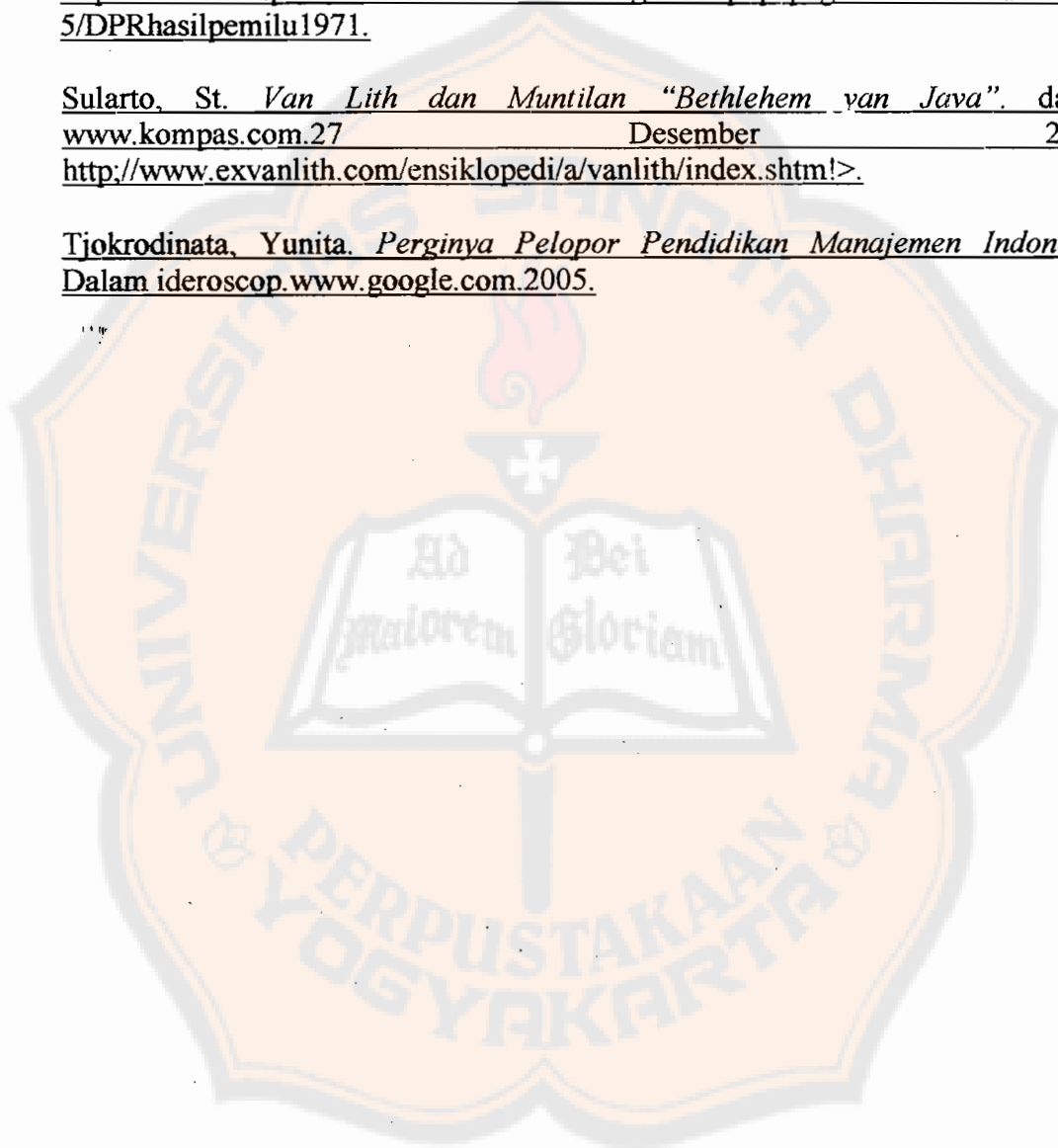
Internet:

Masyarakat Transparansi Indonesia, *Beberapa Tim Anti Korupsi Yang Pernah Dibentuk (1967-2000)*, dalam www.transparansi.com., 2000, Kompas: 27-12-2000.

<http://www.kompas.com/freedominstitute.org/index.php?page+artikel&individu=15/DPRhasilpemilu1971>.

Sularto, St. Van Lith dan Muntlan "*Bethlehem van Java*". dalam www.kompas.com.27 Desember 2003.
<http://www.exvanlith.com/ensiklopedi/a/vanlith/index.shtm!>>.

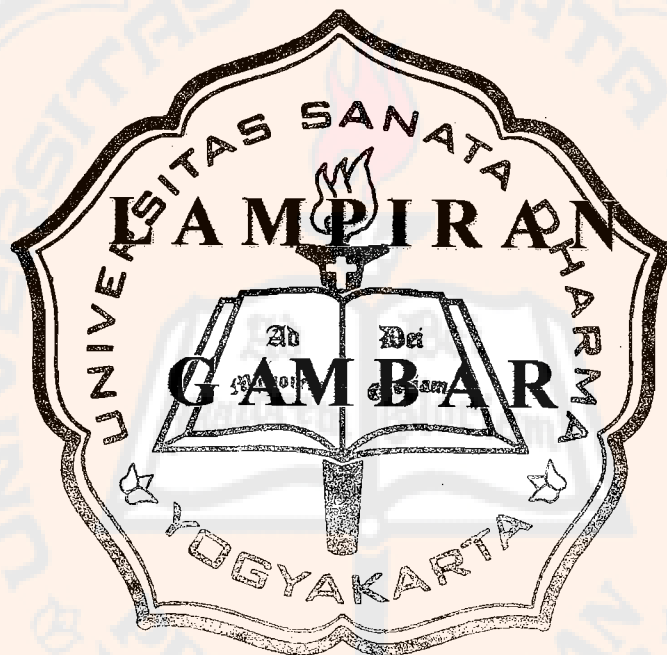
Tjokrodinata, Yunita. *Perginya Pelopor Pendidikan Manajemen Indonesia*. Dalam ideroscop.google.com.2005.



LAMPIRAN

LAMPIRAN





Lampiran: 1

FOTO DIRI I.J. KASIMO



Ignasius Joseph Kasimo

1. Ignasius Joseph Kasimo, S.J.D., dan Ignasius Joseph Kasimo, S.J.D., (1924-1994); Ketua Panitia Katolik Republik Indonesia (1945-1949); Ketua umum Partai Katolik (1949-1960); Anggota DPR (1951-1954); Anggota Komite Nasional Indonesia (1945-1949); anggota DPR (1950-1954); Menteri Muda I Kemakmuran (1947-1948); Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan Menteri Kemakmuran (1948-1950); Menteri Perencanaan (1950-1954); Anggota Dewan Pertimbangan Agung (sejak 1959 dan berakhir pada 1960); dan Sri Pangeran; Komandur Ordo Santa Kiliesta dengan bintang perak besar.

Sumber : M.P.M. Muskens, Pr. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Pengintegrasian di Alam Indonesia*, jilid 4, Jakarta, Dokpen. MAWI, 1973, hlm. 409.

Lampiran: 2

I.J. Kasimo Pada Masa Pendidikan



Masa Belajar di Middelbare Landbouwschool di Bogor 1918-1921

Di Bogor Kasimo mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah pertanian, ekonomi dan sosial. Di waktu senggang ia mengikuti kursus *Volkscredietwezen*, perkreditan rakyat. Ia juga banyak belajar sendiri dengan pengetahuan dari buku-buku, majalah dan surat kabar. Di mengilhami Kasimo sejak belajar di Bogor sampai sekarang adalah *Harmonisch*, oleh de Bruijn dan *De Katholieke Maatschappijleer*, o Dari kanan, I.J. Kasimo P. Soedjadi, R. Soenardi dan C.I. Soepardjo 1920.

Sumber : Tim Wartawan Kompas. *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: PT. Gramedia, 1980. hlm. 181.

Lampiran: 3

I.J. Kasimo Ketika Menjadi Anggota Volksraad 1931-1942



Foto ketika istirahat dalam kesibukan sidang *Volksraad*. I.J. kasimo (tanda X) bersama sebagian dari anggota *Volksraad* Bangsa Indonesia. Nampak dalam gambar ini Soetardjo Kartohadikusumo (nomor 1).

Sumber: Tim Wartawan Kompas. *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: PT.Gramedia.1980. hlm.182-183.

Lampiran: 4

**I.J. KASIMO SEBAGAI MENTERI KEMAKMURAN
DALAM KABINET AMIR SYARIFUDDIN 1947**



Suasana sidang pertama Kabinet Amir Syarifuddin (3 Juli 1947). Dalam Kabinet ini, Kasimo mengajukan “Kasimo Plan” yang dicetuskan dicetuskan pada tanggal 20 November 1947.

Sumber : Tim Wartawan Kompas. *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*.
Jakarta: PT. Gramedia. 1980. hlm. 182-183.

Lampiran: 5

**I.J. Kasimo dalam KUKSI
(Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia)**



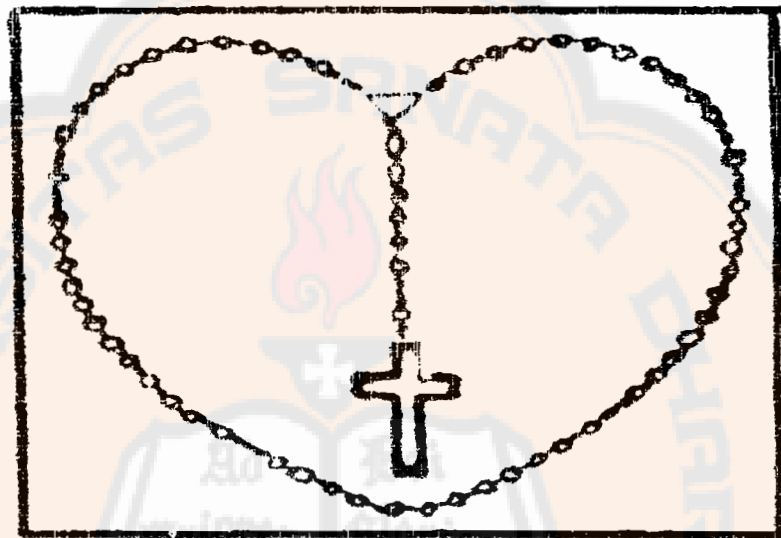
Dalam sejarah golongan Katolik di Indonesia, peristiwa ini adalah untuk pertama kalinya dalam umat katolik dari seluruh Indonesia berkumpul untuk berkumpul. Tujuannya untuk menciptakan persatuan di antara golongan Katolik. Kasimo masih merasa sangat senang dan bersyukur semangat untuk bertemu dan umat katolik dalam KUKSI pertama ini. Hadir pada upacara pembukaan KUKSI, presiden Soekarno dan wakil presiden Moh. Hatta serta Adipati A. Soegijopranoto S.J.

Sumber : Tim Wartawan Kompas, *I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980. hlm. 187.

Lampiran: 6

LAMBANG PARTAI KATOLIK

PARTAI KATOLIK.



Gambar Partai Katolik
dalam pemilu th. 1955

Sumber : M.P.M. Muskens, Pr. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Pengintegrasian di Alam Indonesia*, jilid. 4. Jakarta: Dokpen. MAWI. 1973. hlm. 410.

The logo is a large, light-orange, eight-pointed star shape. Inside the star, there is a smaller shield-like emblem. This emblem features a central torch with a flame, positioned above an open book. The book has some text on its pages, which appears to be in Sanskrit or a similar script. The words "UNIVERSITAS SANATA DHARMA" are written in a semi-circle along the top inner edge of the star, and "PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA" is written along the bottom inner edge.

**LAMPIRAN
DOKUMEN**



Lampiran: 7

ANGGARAN DASAR DAN KETERANGAN AZAS

PARTAI KATOLIK INDONESIA

(PKRI)

Disahkan dalam Konggres Partai tanggal 10 dan 11 Djuli 1948 di Djogjakarta

ANGGARAN DASAR PKRI

Pasal I

Nama dan tempat kedudukan

Perserikatan ini bersama "Partai Katolik Republik Indonesia" atau disingkat PKRI. Berkedudukan di tempat Dewan Pimpinan Partai; didirikan pada tanggal 8 Desember 1945. Tahun perserikatan ini sama dengan tahun almanak.

Pasal II

Azas dan tudjuan

1. Partai ini berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan bertindak menurut azas-azas Katholik
2. Tudjuan partai ialah bekerdja sekuat-kuatnja untuk kemadjuan Negara Republik Indonesia pada umunja dan mempertahankan serta menegakkan berdirinja pada chususnja.

Pasal III

Keanggautaan

Tiap-tiap warganegara Indonesia laki-laki atau perempuan, jang beragama Katholik, jang setudju dengan azas dan tudjuan perserikatan ini, dan jang menurut undang-undang Negara Indonesia berhak memilih perwakilan rakjat, dapat diterima menjdadi anggauta.

Pasal IV

Daerah

Daerah Perserikatan ialah Negara Republik Indonesia.

Pasal V

Organiasi Partai

1. Pada tempat atau bagian daerah di mana jumlah anggota perserikatanmentjukupi boleh diadakan tjabang dengan izin Dewan Pimpinan Partai.
2. Dalam suatu tjabang dibentuk ranting-ranting.
3. Jang memegang putjuk pimpinan partai ialah Dewan Pimpinan Partai (DPP), jang anggautanja terdiri atas sekurang-kurangnya lima (5) orang, dipilih oleh Konggres Partai dengan suara jang terbanyak untuk dua (2) tahun.
4. Di dalam pekerdjaannja DDP itu dibantu oleh sebuah sekretariat.

Pasal VI

Konggres Partai

Di dalam rapat tahunan perwakilan-perwakilan tjabang merupakan suatu Konggres Partai, ialah badan jang memegang kekuasaan jang tertinggi di dalam perserikatan.

Pasal VII

Madjelis Pertimbangan Partai

Oleh tiap-tiap DPP baru dibentuk suatu badan penasehat, disebut Madjelis Pertimbangan Partai (MPP) jang anggautanja terdiri atas perkumpulan-perkumpulan Katholik di Negara Republik Indonesia, jang mempunjai Pimpinan Pusat.

Pasal VIII

Keuangan

Keuangan perserikatan terdapat:

- a) dari uang iuran dari anggauta.
- b) dari usaha lain-lain jang sah.

Pasal IX

Anggaran Rumah angga

Uraian lebih landjut tentang Anggaran Dasar terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal X

Perubahan Anggaran Dasar

Hanja Konggres Partai berhak merubah Anggaran Dasar ini.

Pasal XI

Sesuatu yang tersebut atau tidak ditentukan dalam anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, dapat diputuskan untuk sementara oleh DPP yang berkewajiban mempertanggung jawabkannya dalam Kongres Partai yang mengikutinya.

Keterangan Azas PKRI

Pasal I

Partai Katholik Republik Indonesia bekerja sekuat-kuatnya untuk kemajuan Negara Republik Indonesia pada lapangan rohani, sosial dan ekonomi.

Pasal II

Dalam segala hal PKRI berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan berlaku menurut azas-azas Katholik dalam ilmu mengatur Negara dan masyarakat, terutama menurut azas-azas di bawah ini:

1. Mengakui bahwa di dunia ini dijadikan untuk kebahagiaan semua manusia (Enc. Q A 22 II 2); bahwa semua manusia itu ber-Bapa satu, ialah Tuhan, yaitu terakhirnya segala tujuan. Enc. Rerum Novarum par 18; Enc. Diuturnum 28 Juni 1881; (Enc Q A. III 2b).
2. Mengikuti aliran Solidarisme dengan mengandjurkan tinja sosial dan keadilan sosial agar supaya kebengisan kapitalisme-liberal dapat dimusnahkan dan pertentangan golongan-golongan (*klassenstrijd*) dapat didamaikan (Enc. Q A. 115).

Pasal III

PKRI suka bekerja bersama-sama dengan perserikatan-perserikatan lain menurut program yang ditentukan dalam perundingan lebih dahulu.

Sumber : I.J. Kasimo. *Peringatan Perjuangan Politik Katholik Indonesia*.
Jakarta: Dewan PKRI. 1949. hlm.38-39.

Lampiran: 8

KEMENTERIAN KEMAKMURAN DJOGJAKARTA

KATA PENGANTAR

RENTJANA KEMAKMURAN ISTIMEWA TAHUN 1947

Dalam keadaan sekarang, keadaan kita menderita rintangan blokade Belanda, jang demikian berarti bahwa produksi di tanah ini sendiri pada semua lapangan harus diusahakan tambah banjaknja, sehingga dari produksi itu:

- a) Kebutuhan rakyat tentang bahan makanan jang perlu bagi kesehatan seluruhnya dapat terpenuhi .
- b) Lain² kebutuhan kebutuhan rakjat jang penting seperti pakaian, perkakas rumah tangga dan alat² bekerdj¹ guna mentjari penghidupan sedjauh mungkin djuga,
- c) Usaha di luar negeri, jang berguna bagi perdjuaan nasional kita dapat dibiakai.

Tetapi di samping dan sedang berdjuaan kita harus membangun; membangun ke arah:

- 1) Tertjapainja tjita² jang termuat dalam fasal 33 dari Undang² Dasar Negara kita, ialah: sebesar-besar kemakmuran rakjat.
- 2) Terlaksanaja kewadjiban kita setagai bangsa merdeka di bagian dunia begitu banjak kekajaan alam, ialah kewadjiban mengusahakan kekajaan itu tidak hanja untuk keperluan kita sendiri, tetapi djuga kepentingan dunia umumnja, jang mudah didapat atau dihasilkan hingga berkelebih-lebihan tanah ini tetapi sukar terdapat di lain tanah; kita sebagai bangsa merdeka harus sanggup dan tjakap memberikan sumbangan berupa bahan² itu.

Djogjakarta. 20 November 1947

Kementrian Kemakmuran Djogjakarta

Ttd.

I.J. Kasimo

Sumber: Dokumen "Rentjana Kemakmuran Istimewa Tahun 1946, Oleh Kementerian Kemakmuran Djogjakarta", Yogyakarta 1947. Dokumen ini tidak diterbitkan, tetapi masih terimpan dalam arsip di Sekretariat Yayasan Kasimo, Jln. Kramat V/18 A. Jakarta.

Lampiran: 9

MINIMUM PROGRAM

Hal: - AGAMA
- PENGADJARAN
SOSIAL, serta
- KESEJAHTERAAN RAKJAT

Dari pihak Geredja Room Katolik
Ditambah dengan beberapa keterangan
Diterbitkan oleh:
Kantor Pusat Missie (Centraal Misie Bureau) – Djakarta pada tahun 1947.

Sejak Djepang takluk dan kemerdekaan manusia jang terpenting dan jang mendjadi dasar di Indonesia ini, kerap kali diperbintjangkan baikpun di Indonesia maupun di Negeri Belanda.

Dalam segala rentjana Undang-Undang Dasar jang diadakan di Indonesia – jaitu di Undang-Undang Dasar Republik serta di Negara Indoensia Timur pula, apalagi di Negara dan Daerah jang lain – adalah bab-bab dan pasal-pasal jang semata-mata mengenai hak dasar tentang kemerdekaan, kesehatan dan kemakmuran (*liefdadigheid*).

Kemengangan dalam perang dunia jang kedua ini berarti djuga kembalinja kemerdekaan-kemerdekaan jang dahulu dilenjapkan oleh dictator-dictator jang sekarang sudah salah itu.

Daripada itu teranglah sudah, apa sebabnja maka Perserikaan Bangsa-Bangsa menganggap sebagai salah satu tudjuan jang terpenting; supaja segala bangsa bekerdja sama, agar dimadju-madjukan serta dihormati segala hak dan kemerdekaan dasar tenang segala hal, tidak membedakan bangsa, bahasa dan agama.

Hak-hak ini sudah diakui dalam:

1. Undang-Undang Status-Uni
2. Undang-Undang Dasar Sementara RIS.

Missie menanggap penting sekali, bahsa semua jang bersangkutan atau jang berpengaruh dalam penyelenggaraan undang-undang ini, mengerti tentang kehendak-kehendak jang njata (*concreet*), keinginan minimum jang harus dimadjukan.

Maka berdaja upajalah Missie untuk membentuk Minimum Program, jaitu keterangan-keterangan tentang kemerdekaan-kemerdekaan dasar tersebut. Jang dipilih ialah bentuk undang-undang supaja pertama: dengan pendek dan seterang-terangnja buah pikiran ini dapat diterangkan dan kedua; moga-moga bentuk ini berguna hendaknja pada pembentukan undang-undang jang akan datang.

Berturut-turut akan diperbintjangkan hal:

- I. Kemerdekaan Agama
- II. Kemerdekaan Pengadjaran
- III. Kemerdekaan untuk menjukupi kebutuhan sosial, perawatan orang sakit, orang gila dan berdjanggal.

1. Dari Hal Kemerdekaan Agama

- Pasal 1 : Negara mengakui kemerdekaan agama masing-masing penduduk.
- Pasal 2 : Dengan mengingat adanya aturan-aturan hukum pidana umum (*aglemeen strafrecht*):
 - a. semua laku ibadat dalam dan di tempat jang bukan untuk lalu lintas umum merdeka.
 - b. semua laku ibadat umum dalam dan di tempat umum untuk lalu lintas umum merdeka, menurut aturan-aturan polisi jang sudah umum berlaku.
 - c. semua matjam penjiaran agama merdeka, begitu djuga memeluk agama lain dan menerima orang dari lain agama.
- Pasal 3: Penganut agama masing-masing lagipula pemimpin masing-masing agama mempunyai hak kewarganegaaan jang sama serta masing-masing berhak djuga memangku pangkat djabatn, pekerdjaan apapun djuga.
- Pasal 4 :
 - 1) Agama-agama dan badan-hukum jang menurut sifat dan keadaannja termasuk suatu agama mempunyai hak sebagai *Rechtspersoon* sesuai dengan undang-undang negeri (*landrecht*)
 - 2) Supaja mendapat nama agama atau badan hukum agama, haruslah diberi keterangan oleh Pembesar Negeri.
 - 3) Keterangan ini hanya dapat diberikan karena hal-keagamaan tak terdapat disitu.
- Pasal 5: Sokongan pemerintah apapun djuga jang diberikan kepada pegawai agama atau badan-badan agama tersebut di pasal 4, berdasarkan hak jang sama.

Keterangan:

- **Tentang pasal 1.** Negara djaman sekarang, jang tiada memperbolehkan kemerdekaan agama, tak mungkin. Keadaan bermatjam-matjam agama jang terdapat di mana-mana, lagipula pergaulan anar banga jang makin lama makin besar pula adanya kemedekaan tersebut.

Di atas sudah tersebut salah satu tudjuan Serikat Bangs-Bangsa. Di samping itu dapat disebutkan di sini semua Undang-Undang Dasar Sementara RIS.

Akan tetapi perlu djuga ada pembatasan, karena di beberapa agama ada djuga jang melanggar peri kemanusiaan dan kesopanan jang terutama. Misalnja, suttee, yaitu pembakaran-djanda di tanah Hindu dilarang pada ahun 1929, kemudian di Hindia Belanda djuga. Mengingat hal ini maka pada permulaan pasal 2 jang menerangkan kemerdekaan kemerdekaan agama diadakan pembatasan dengan perkataan "Dengan mengingat adanya hukum pidana umum."

Kemerdekaan agama tak memperbolehkan adanya aturan pentjegah (*preventieve beperkende maatregel*), misalnja seperti kalimat-kalimat di undang-undang: “dengan mengingat pembatasan-pembatasan untuk keamanan. “Agama, Missie dan Zending tentu tak akan menumbuhkan bahaya bagi kemanan. Kalau ada suatu hak kemerdekaan agama. Maka hak jang kudus ini djanganlah diubah oleh undang-undang buatan manusia.

Adapun pengawasan tentang kejadian (*repressief toezicht*) seperti jang termuat dipermaklumkan pasal ini, tak menjadi halangan.

- **Tentang Pasal 2.** Mungkinkan kiranya kalau Pemerintah tak mau menghilangkan pengukuhan (*sanctie*) tentang keamanan dan ketertiban. Daripada itu diadakan pembatasan di permulaan pasal. Keterangan landjut sudah diberikan pada keterangan tentang pasal 1. adapun jang dinamai “hukum pidana umum” ialah hukum jang sudah ada serta mengenai segala penduduk. Pasal ini mengandung juga akibat-akibat jang termuat di pasal 1.

Pasal 2.a. sudah erang, begitu juga pasal 2.b. Adapun tentang hal jang terachir ini, Pemerintah harus berhak menjaga Kemanan dan ketertiban, karena pada hal ini djalan umum. Hal jang terpenting ialah: hak kemerdekaan mengadakan perarakan haroes diakoei.

Kemerdekaan penjiaran agama jang tersebut di pasal 2. haruslah tertera dengan terang. Adalah Negara jang mendjamin kemerdekaan kemerdekaan agama, akan tetapi hanya berarti memperbolehkan semata-mata melakukan kewadajiban agama, penjiaran agama apapun juga tidak diperkenankan.

Lain dari pada itu, lebih-lebih ditemaot jang ada Missie dan Zending, hendaklah disebutkan dengan sedjelas-djelasnja kemerdekaan memeluk agama lain dan menerima orang dar agama lain. Kemerdekaan tentang penjiaran agama saja tak tjukup.

- **Tentang pasal 3.** perkataan “pegawai dengan sengadja ditambahkan di sini, supaja kalau pegawai dari satu agama, misalnja agama Islam, seterusnya, selayaknja diberi djabatan untuk menikahkan, maka djabatan ini, kalau diminta, selayaknja diberikan djuga kepada pegawai agama lain, umpama agama Kristen.

Di sini boleh dikemukakan, bahwa hal sematjam ini telah berlaku di Indonesia dengan adanya “*Huwelijkordonnantie Christen-inlanders Java, Minahassa en Ambonia*” *Staatsblad* 1933 no. 74 juncto no. 75, untuk orang Kristen Indonesia. Hal ini dapatlah diperlas untuk semua kaum Kristen menurut aturan-aturan jang sama dengan aturan-aturan untuk orang Kristen Bumiputera.

Untuk agama Islam djabatan “pegawai pernikahan” diatur dengan *Huwelijksordonnantie* ddo. 12 Sept. 1929 S. 29-348; tentang Djawa dan Madura, dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten*, dd. 8 September 1932 S. 32-1984. Adapun pada pasal 1 berbunyi demikian: hal nikah menurut agama Islam, harus dilakukan di bawah pengawasan pegawai nikah jang ditundjukkan oleh pembesar untuk itu; kalau tidak maka dihukum denda sebagaimana tersebut dalam ordonasi

ini. Begitu juga hal menjatuhkan talak dan merujuk menurut agama Islam harus diberi tehukan kepada pegawai nikah yang tersebut dalam kalimat yang dia atas; kalau tidak, maka dihukum dendalah sebagaimana tersebut dalam ordonasi ini."

N.B. 1. Berhubung dengan yang tersebut di atas adalah baiknja, kalau sekiranya juga dijadikan keinginan (*desideratum*), agar supaya pada umumnja semua pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama diakui oleh undang-undang serta disamakan hak-haknja dengan pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Geredja tentang perhubungannja daloam kewarganegaraan (*burgerlijke betrekkingen*).

Desideratum ini sudah sepadn sekali dengan keadaan di Indonesia. Ini nsudah diakui dengan hukum yang termuat di Koran dan diakui pada beberapa tempat.

Seperti telah diketahui hal ini berlainan sekali dengan di Negeri Belanda. Pernikahan di sana selalu tergantung urusan Pemerintah.

Hal ini hendaknja dimajukan di Minimum Program, lebih-lebih supaya Indonesia menjadi telaah untuk Negara Belanda.

N.B. 2. Akchirnja hendaknjalah ditimbang-timbang juga, supaya di Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, kepada siapa harus diberikan kebebasan dari kewajiban militer dan kewadajiban warganegara (*burgerdienstplicht*), karena mengingat jabatan agama atau pekerdjaan yang mengenai ketjintaan umum serta didikan yang diperlukan. (Untuk Negeri Belanda; lihat Dr. C.A. Damen "*De Vrijdom der Geestelijken van den Krijgdienst*", 1916, dan "*De Dienstplichtwet en de Vrijstelling der Geestelijken*", oleh F.J.M. Evers, tidak dijual).

- **Tentang pasal 4.** Dalam pasal ini disebut "agama" dengan mengingat agama Islam, dan dipakai perkataan yang lazim dipakai di Indoensia. Sebab agama Islam itu bukanlah Geredja menurut arti yang umum di Negeri Belanda.

Negeri wadajib mengamat-amati, supaya djanganlah ada perkumpulan yang berbahaja untuk negeri atau keamanan umum memakai kedok agama timbul atau masuk di negeri. Mengingat hal ini perlulah ada pengakuan bagi agama badan hukum agama.

Meskipun hanja mengingat keperluan yang praktis sadja perlu sekali minta pengakuan ini, umpama untuk mentjatat hak-hak d.l.l., tetapi lebih-lebih supaya Negeri adalah sjarat melawan badan perkumpulan, yang bernama "agama" hanja karena hendak turut mendapat hak-hak keuangan atau hak keuangan atau hak hukum negeri (*staatsrechterlijk*), yang diberikan kepada agama; melawan badan-badan yang bertudjuan politik atau badan yang hendak turut mempunyai hak-hak atau kebebasan untuk kepunjaan prive, pada hal hak dan kebebasan ini hanja diberikan kepada agama sadja.

Pengakuan ini perlu pula untuk teraturnya keadaan Negeri dan hidup rohani bagi rakjat. Yang dipakai ukuran untuk menentukan mana yang agama mana yang tidak, ialah yang disebut: *communis aestimatio hominum* (yang lazim menjadi pendapat orang). Tanda yang tentu dan njata (positief) tidak dapat diberikan.

Oleh karena perkumpulan-perkumpulan Geredja dan bahagianja jang berdiri sendiri merupakan badan hukum - bagi Islam ialah agama dan jang bersangkutan-maka semuanya itu hendakja mendjadi djuga subject hukum dari segala hak-hak (*rechtssubject van alle rechten*), jang dapat dilakukan oleh semua badan hukum, baikpun phisiek, maupun moreel. Djikalau humum suatu Negara mengakui badan hukum bumiputera, walaupun umpamanja hanya supaja dapat hak jang dinamai "*Inlands bezitrecht*". Djika ada suatu Negara jang mengakui kedua-duanja bada hukum (bumi-poetra dan Eropah) maka Geredja dan agama kendaknja memakai kedua-duanja.

Berhubungan dengan kemungkinan mendapat "*inlands bezitrecht*" ini djuga, maka perlu lah ada keterangan djelas sesuai dengan undang-undang negeri.

- **Tentang pasal 5.** Pasal ini beralasan dasar umum, bahwa negara wadajib memberi sokongan jang perlu akan menjempurnakan hidup rakjat karena agama.

II. Dari Hal Kemerdekaan Pengadjaran

- Pasal 1 : Pengadjaran ikut mendjadi hal jang harus selalu diusahakan oleh Pemerintah.
- Pasal 2 : Memberi pengadjaran merdeka. Tiap-tiap orang merdeka menuntut pengadjaran jang dikehendakinnja, artinja: orang tualah jang memilih pengadjaran bagi anaknja jang belum dewasa, tentu sadja dengan mengingat adanja aturan-aturan tentang kebaikan pengadjaran, kepandaian dan kesopanan guru-guru. Aturan-aturan ini haruslah mendjamin kemerdekaan djurusan pengadjaran.
- Pasal 3 : Kalau usaha-usaha partikulir tidak mentjukupi keperluan pengadjaran, maka diadakan djuga pengadjaran umum (*openbaar*). Pengadjaran umum atau negeri diatur dengan undang-undang dengan menghormati kepertjajaan agama masing-masing penduduk. Di sekolah negeri diadakan kesempatan menuntut pengadjaran agama pada waktu sekolah biasa menurut kepertjajaan masing-masing.
- Pasal 4 : Kalau undang-undang negeri memberikan hak-hak kepada jang menuntut sematjam pengadjaran atau jang tammat suatu didikan sekolah, maka hak-hak ini berlaku djuga baikpun untuk sekolah negeri maupun untuk sekolah partikulir.
- Pasal 5 : Pengadjaran partikulir jang mentjukupi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh undang-undang, biajanja ditanggung oleh kas negeri, kalau ini mungkin bagi keuangan umum. Sjarat-sjarat ini tidak boleh mengenai djurusan pengadjaran. Pemberian sokongan uang kepada bermatjam-matjam perkumpulan *pengadjaran berdasarkan hak jang sama (basis van gelijkgerechtigdheid)*.

Keterangan:

Pasal-pasal inidibentuk demikian, dengan mengingathal-hal jang menurut azas-azas kami dan dasar demokrasi dapat dipertahankan, lagipula dengan mengingat keadaan-keadaan jang sudah ada di Indonesia ini.

Tetapi masih ada djuga jang patut diingat. Jang diselenggarakan, oleh Misisie dan Zending pada lapangan pengadjaran sainpai waktu sekarang ini terlalu besarlah artinya bagi masjarakat Indonesia, hingga tak patutlah kalau keadaan ini hanja dipandang sebagai hal jang tidak boleh dibiarkan atau diizinkan sadj. Sebaliknya hendaklah dipandang perlu sekali bagi kesedjahteraan dan kemadjuan bangsa Indonesia.

Daripada itu haruslah pekerdjaan itu diakui dan dihargai, begitu djuga disokong dengan uang oleh Pemerintah.

Adapun tentang pengadjaran hendaknjalah dipegang teguh tiga buah perkara:

- (1) Pengadjaran merdeka;
- (2) Kepada segala pengadjaran jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan oleh undang-undang tentang kebaikannya, harus diberikan *effectus civiles* (penghargaan di masjarakat) jang sama;
- (3) Segala pengadjaran dipikul biajanja oleh Pemerintah menurut ukuran jang sama.

Pengadjaran negeri hendaknja diatur dengan undang-undang menghormati kepertjajaan masing-masing. Pada rentjana pengadjaran hendaknja dimuat pengadjaran agama jang dapat dituntut murid-murid, jang orang tuanja menghendakinja.

Undang-undang harus mengadakan sjarat-sjarat dan aturan – dengan mengingat kemerdekaan djurusan – jang harus dipenuhi oleh pengadjaran partikulir supaja menurut ukuran jang sama dengan pengadjaran negeri mendapat biaja dari Negeri.

Di sekolah partikulir anak-anak jang orang tuanja tak memperbolehkan, harus dibebaskan dari pengadjaran agama.

Haruslah djuga ditetapkan: Kalau sekiranya ada pengadjaran jang meskipun tak memenuhi sjarat-sjarat dan aturan ini haruslah diberikan berdasarkan hak jang sama.

Lebih-lebih tentang pasal 5 haruslah diingat bahasan pasal ini dibentuk demikian hanja berhubung dengan keadaan hukum (*rechtstoestand*) di Indonesia ini.

III. Kemerdekaan untuk mentjukupi kebutuhan sosial, pewartaan orang sakit, orang gila dan berdjanggal

A. Dari hal sosial

- Pasal 1 : Kemadjuan sosial masjarakat turut mendjadi suatu hal jang harus diusahakan oleh Pemerintah.

- (1) Pengurusan perkara-perkara jang bersangkutan dengan hukum kesosialan serta urusanakan memberantas kekurangan sosial.

- (2) Dari hal kesehatan rakyat Pembantuan, tambahan dan di mana perlu dan mungkin – sokongan uang kepada usaha partikulir pada hal ini, dan
- (3) Pemeiksaan untuk keselamatan umum tentang kebaikan dan terkembangnja usaha itu, tentu sadja dengan mendjamin masing-masing matjam dan keadaan partikulir jang istimewa itu.
- Pasal 2 : Usaha Partikulir terikat oleh hukum pidana umum dalam melakukan hak-hak tersebut di atas.
- Pasal 3 : Badan serta perkumpulan partikulir untuk memberantas kesuukaran sosial badan jang memenuhi sjarat-sjarat teratur oleh badan Pemerintah untuk badan dan perkumpulan umum jang sama atau bermatjam sama ditanggung biajanja menurut ukuran dan aturan badan hukum dan perkumpulan umum tersebut.

B. Dari hal kesehatan rakyat.

- Pasal 1 : Kesehatan rakyat turu mendjadi hal jang harus diusahakan oleh Pemerintah
- Pasal 2 : Wadjib Pemerintah pada hal ini ialah memberi pimpinan dan aturan-aturan serta menambah kekuarangan usaha partikulir, supaja kesehatan masjarakat terdjamin baik-baik dan supaja jang merugikan sedapat-dapatnja didahulukan dan dihilangkan.
- Pasal 3 : Pemerintah Haruslah berusaha mengadakan sjarat dan aturan, agar pemeliharaan kesehatan umum. Di samping itu, hendaklah Pemerintah berdaja upaja akan memadjukan, menjokong dan memimpin usaha partikulir dalam hal ini, supaja rakyat hidup dengan memelihara kesehatannja.
- Pasal 4 : Untuk memelihara orang sakit, gila dan berdjanggal usaha partikulir diberi kemerdekaan seluas-luasnja, mengingat aturan-aturan hukum pidana umum tentang dokter-dokter.
- Pasal 5 : Sokongan Pemerintah apapun djuga jang diberikan kepada badan serta perkumpulan partikulir untuk memelihara orang sakit, gila dan berdjanggal, berdasarkan hak jang sama, djika perkumpulan-perkumpulan ini memenuhi sjarat-sjarat teratur oleh badan Pemerintah untuk badan dan perkumpulan umum jang sama atau bermatjam-matjam.

Keterangan:

Pemberantasan kesukaran sosial ialah pekerdjaan tolong-menolong, tjinta kepada sesama manusia dan kebadjikan Kristen. Daripada itu pemberantasan kesukatan manusia terletak djuga pertama di tenaga partikulir.

Pemerintah wadjiblah memadjukan tenaga ini, menjokong dan menghimpun serta memberi tundjangan uang untuk menolong akan adanja dan supaja dapat terus bekerdja. Pemberantasan kesukaran anak negeri tidak hanja berguna sadja

untuk Pemerintah, akan tetapi oleh karena orang-orang itu menjadi anak-anak Negeri yang lebih baik.

Dalam sejarah nyata juga bahwa pekerjaan ketjintaan dan pemerlihaan sosial timbul dari tenaga partikulir, teruama dikerdjakan oleh perkumpulan partikulir, diserahkan kepada pekerdja partikulir, dan daripada itu berbuah yang sebaik-baiknya. Boleh ditambahkan lagi bahwa sifat pertama yang terdapat di tenaga partikulir untuk hal ini selaras dengan keterangan-keterangan *bureaux* Pemerintah Hindia Belanda yang resmi; lagipula boleh dikatakan bahwa Negeri di sini hampir tak mempunyai rumah piatu, dll.

Tentang pemeliharaan orang sakit, di undang-undang dasar serikat kita tidak dapat berkehendak lebih daripada sokongan yang berdasarkan hak yang sama. Padahal ini, negeri mempunyai badan-badan sendiri. Lagipula boleh dichawatirkan, bahwa persamaan tak akan diberikan, meskipun haruslah kami berdaja upaya mentjapai hal itu.



Sumber : I.J. Kasimo, *Peringatan Perjuangan Politik Katholik Indonesia*.
Djakarta: Dewan PKRI. 1949. hlm. 41-47.

Lampiran: 10

MAKLUMAT PEMERINTAH

Partai Politik Anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik berhubung dengan usul Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaja diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan rakyat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945

Wakil Presiden

ttd

Mohammad Hatta

Sumber : Ginanjar Kartasasmita, *30 Tahun Indonesia Merdeka*,
Cetakan Ketiga, I, Jakarta: PT. Tira Pustaka. 1980.

Lampiran 11:

KONGGRES UMAT KATHOLIK SELURUH INDONESIA

Dengan hormat,

Berhubung dengan surat kami yang kami tudjukan kepada segenap Organisasi Katholik Indonesia, dengan adjakan supaya turut serta mengambil bagian dalam Konperensi Katholik di Jogjakarta, maka perlu kami sampaikan Pengumuman Panitia Pusat, yang baru² sadja kami terima, dengan minta perhatian saudara² akan adanya beberapa *perubahan*;

1. Perobahan sifat

Permusjawaratan yang semula disebut "Konperensi Katholik Seluruh Indonesia" bertempat di Jogjakarta pada tanggal 7 s/d 12 Desember 1949.

Dengan demikian, maka yang diadjak bukan organisasi² Katholik Indonesia sadja, melainkan djuga organisasi² Katholik bukan Indonesia, di seluruh Nusantara. Pun bila sesuatu tempat belum mempunyai organisasi Katholik yang tertentu, umat Katholik di tempat itu bisa dan diharap mengirimkan wakilnja. Pengumuman ini dan lain²-nya, yang datang dari Panitia Pusat harap dianggap sebagai undangan djuga.

2. Soal-soal yang akan diperbintjangkan

(lihat pada atjara yang akan diperbintjangkan)

3. Susunan Panitia Konggres Umat Katholik Seluruh Indonesia.

Pelindung : J.M. Mgr. A. Soegijapranata, S.J.

Penasehat : P. T. Pater A. Djojosepoetro, S.J.

Ketua Kehormatan : J.M. Menteri I.J. Kasimo.

Ketua : Ir. Soepardi

Wakil Ketua : Mr. Sochardi

Sekretariat : P.J. Poesposoetjipto, H.J. Soemarto, Karnodewono

Keuangan : C.S. Tjokrosoedirdjo, Soekotjo, Donowinoto

Anggauta² : Dr. H.H. Sentral, Ir. Wakidi, Nj. Brotowardojo, Nj. Kwari,
R.R. Soerjoprawoto, J.S. Partohardjono.

Penasehat² untuk urusan:

1) Ketatanegaraan : RP.R. Soekarto, S.J., Prof. di Seminarium Agung

2) Kewanitaan : RP.C. Martowardojo, S.J., di Kotabaru

3) Pendidikan dan kebudayaan: RP.B. Schouten, S.J., Pimpinan Jajasan Canisius

4) Missie : RP. A. Poedjohandojo, Pr. Pimpinan di Kemetiran

5) Pemuda : RP.C. Jeuken, S.J., Pastur di Setjodiningratan

6) Perburuhan : RP. Brotowiratomo, Pr. Guru Seminarium

7) Sosial Ekonomi : RP. J. Djikstra, S.J., Pastur di Bintaran

ACARA KONGGRES

Tanggal 7 Desember 1949, djam 19.00 – 21.00 : Receptie
Tanggal 8 Desember 1949, djam 7.30 : Missa Besar di Geredja Kotabaru
10.00 – 13.00 : Rapat Pleno
Pimpinan Rapat: F.S. Harjadi
19.00 – 21.00 : serupa
Tanggal 9 – 10 Desember 1949 : Rapat Seksi
Tanggal 11 – 12 Desember 1949 : Rapat Pleno
Pimpinan Rapat: Mr. R. Soehardi
Tanggal 12 Desember 1949 : djam 17.00: Lof. Besar di Geredja Kotabaru
djam 19.00 – 21.00 : Malam Kesenian.

JANG AKAN BITJARA PADA RAPAT PLENO

1. Tentang Ketatanegaraan:
 - a. J.M. I.J. Kasimo, Menteri Kemakmuran, Ketua Dewan PKRI
 - b. Mr. Teng Tsin Leng, Anggauta Parlemen NIT, penasehat Delegasi BFO pada KMB.
 - c. A.J. Djupri Nitihardjo, Anggauta KNIP.
2. Sosial-Ekonomi-Perburuhan:
 - a. Ir. Soewarto, Penasehat Delegasi Republik Indonesia pada KMB.
 - b. Drs. Tan Swam Bing dari Kian Gwan Concern
 - c. F.S. Harjadi, dulu Perrimpin Sobsi Malang.
3. Pemuda: J.M. Mgr. A. Soegijapranata, S.J.
4. Missie: R.P. van Thiel, S.J., Direktur SMA Katholik
5. Kebudajaan: Mgr. Dr. P. Geise OFM-Ap. Prefect Sukabumi
6. Kewanitaan: Njonja Kwari.

Sekian dulu.

Djakarta. 5 November 1949

Penghubung D.P. PKRI Djakarta

Sumber : I.J. Kasimo, *Peringatan Perdjjoangan Politik Katholik Indonesia*.
Jakarta: Dewan PKRI. 1949. hlm. 52-53.

Lampiran: 12

**PERNYATAAN BERSAMA PARTAI-PARTAI KATOLIK
UNTUK MEMBENTUK SUATU WADAH BERSAMA
PARTAI KATOLIK**

KAMI UMAT KATHOLIK SELURUH INDONESIA, sedjak dua puluh lima tahun jang lalu, senantiasa berusaha untuk mengadakan suatu partai Katholik sadja, jang meliputi seluruh daerah tanah Air kita, hal mana ternyata dari riwayat perkembangan beberapa perkumpulan Katholik, jang bergerak di lapangan politik, pada tanggal 12 Desember 1949, berkumpul dalam "Konggres Umat Katholik Seluruh Indonesia di Djjakarta, dengan berkat dan hikmat Tuhan Jang Maha Esa menjatakan dengan persetudjuan bulat, bahwa saat untuk mendirikan satu Partai Katolik sadja buat seluruh Indonesia telah tiba:

Memutuskan, menjelmakan:

1. Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), jang didirikan pada tanggal 8 Desember 1945, di Surakarta;
2. Partai Katholik Rakjat Indonesia (PKRI), jang didirikan di Makassar;
3. Partai Katholik Rakyat Indonesia (PKRI), jang didirikan di Flores;
4. Partai Katolik Indonesia Timor (Parkit), jang didirikan di Timor;
5. Persatuan Politik Katholik Flores (Perpokel), jang didirikan di Flores;
6. Permusjawaratan Madjelis Katholik (Pemakat), jang didirikan di Menado;
7. Partai Katholik Indonesia Kalimantan (Parkiba), jang didirikan di Kalimantan mendjadi satu partai dengan nama "Partai Katolik"

Sumber : I.J. Kasimo. "30 Tahun Gerakan Katolik di Indonesia": 1923-1953). dalam Surat Kabar *Suara Katolik*, No.4. Tahun 4/1953. Jakarta.

Lampiran : 13**PERNYATAAN BERSAMA**

Kami Parta-Partai Politik:

1. Partai Kristen Indonesia
2. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
3. Partai Murba
4. Partai Katolik
5. Partai Katolik Nasional Indonesia

Menyadari akan tugas fundamientil perdjungan rakjat Indonesia, ialah mengamankan dan mengamalkan Pancasila sebagaimana yang mendjadi jiwa dan tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Menyadari tingkat perdjungan rakjat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan sebagaimana dimanifestasikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, memerlukan peningkatan usaha bersama antara semua kekuatan sosial politik untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan program bersama melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan bangsa dan negara.

Meyakini fungsi partai-partai politik sebagai lembaga demokrasi dan sarana vital dalam perjuangan mengisi kemerdekaan seperti ditegaskan di dalam sikap dan pernyataan Presiden Soeharto.

Menghargai dan menyambut baik gagasan Presiden Soeharto untuk mengusahakan kerjasama dan pengelompokan partai-partai menuju ke arah penyederhanaan kehidupan politik sesuai dengan Ketetapan MPRS NO. XXII/MPRS/1966.

Maka,

Kami atas nama pimpinan partai-partai masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini setelah mengadakan diskusi serta konultasi secara terbuka, dengan ini menyatakan:

1. Kesediaan untuk mengadakan kerjasama untuk kepentingan nasional;
2. Hal-hal yang menyangkut dasar, sifat, pengorganisasian, program kerja, prosedur, dan nama kelompok kerjasama akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 9 Maret 1970

1. Ketua Umum Parkindo

ttd.

(Melanethen Siregar)

2. Ketua Umum IP-KI

ttd.

(Achmad Sukarmadidjaja)

3. Ketua Umum Partai Murba

ttd

(Sukarni)

4. Ketua Umum Partai Katolik

ttd

(V.B. da Cesta. S.H.)

5. Ketua I PNI

Ttd

(Hardi, S.H.)

Lampiran : 14

**DEKLARASI PEMBENTUKAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA**

Dalam rangka pembaharuan struktur dan kehidupan politik menuju ke arah system kepartaian yang terbuka untuk semua warganegara tanpa perbedaan suku keturunan dan atau agama, sesuai dengan pasal 2 Ketentuan Pokok Kelompok Demokrasi Pembangunan sesuai pula dengan Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966, maka sebagai langkah strategis, kelima Partai:

1. Partai IP-KI
2. Partai Katolik
3. Partai Kristen Indonesia
4. Partai Murba
5. Partai Nasional Indonesia

Dengan ini menyatakan:

1. Memfusikan diri dalam satu kesatuan wadah kegiatan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Merubah nama Kelompok Demokrasi Pembangunan menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
3. Membentuk team untuk menyusun rencana Anggaran Dasar, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan dalam hubungan dengan pelaksanaan fusi tersebut.
4. Penyelesaian hal-hal kerumahtanggaan masing-masing partai dalam rangka fusi ini akan diatur sebaik-baiknya oleh setiap Partai yang bersangkutan sesuai dengan norma organisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 10 Januari 1973, jam 24.00 WIB

A.n Partai IP-KI		A.n Partai Katolik	
Ketua Umum	Wk.Sek.Jen.	Ketua Umum	Sek.Jen.
ttd.	ttd.	ttd.	ttd.
(Asukarmadidjaja)	(Mh. Sadri)	(Ben Mang R.S)	(F.S. Wignyosumarsono)
A.n Partai Kristen Indoensia		A.n Partai Murba	
Ketua Umum	Sek.jen.	Ketua Umum	Wk.Sek.Jen.
ttd.	ttd.	ttd.	ttd.
(A. Wenas)	(Sabam Sirait)	(I. Murbantoko)	(John Pakan)
A.n. Partai Nasional Indonesia			
Ketua I		Sek. Jen. I	
ttd.		ttd.	
(Mh. Isnaeni)		(A. Madjid)	

Sumber : Tim Penyusun, "Deklarasi Pembentukan PDI", dalam Majalah *Solidaritas* No. 6 Th. II, Desember 1974, Jakarta: Yayasan Kasimo, hlm 10-11.

Lampiran: 15

**DAFTAR NAMA ORANG KATOLIK DALAM
LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DAN
LEMBAGA TINGGI NEGARA
(1945-1973)**

Kabinet

<i>Kabinet Amir Sjarifuddin ke-1,</i>	3 Juli 1947 - 11 Nopember 1947.
I.J. Kasimo	Menteri Muda I Kemakmuran
<i>Kabinet Amir Sjarifuddin ke-2,</i>	11 Nopember 1947 - 29 Januari 1948.
I.J. Kasimo	Menteri Muda I Kemakmuran
<i>Kabinet Hatta ke-1,</i>	29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949.
I.J. Kasimo	Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan Menteri Kemakmuran.
<i>Kabinet Susanto Tirtoprodjo,</i>	20 Desember 1949 - 21 Januari 1950
I.J. Kasimo	Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan Menteri Kemakmuran.
<i>Kabinet Natsir,</i>	6 September 1950 - 27 April 1951.
F.S. Harjadi	Menteri Sosial
<i>Kabinet Sukiman,</i>	27 April 1951 - 3 April 1952.
Ir. Suwanto	Menteri Pertanian
<i>Kabinet Wilopo,</i>	3 April 1952 - 1 Agustus 1953.
Ir. Suwanto	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
<i>Kabinet Burhanudin Harahap,</i>	12 Agustus 1953 - 25 Maret 1956.
I.J. Kasimo	Menteri Perekonomian
<i>Kabinet Alisastroamidjojo ke-2,</i>	14 Maret 1956 - 9 April 1957.
A.B. de Rozari	Menteri Muda Perhubungan
Prof. Mr. A.A. Suhardi	Menteri Agraria
<i>Kabinet Dwikora,</i>	27 Agustus 1964 - 25 Juli 1966.
Drs. Frans Seda	Menteri Perkebunan 1964-1966, (sudah diangkat tgl. 3 Juni 1964 dalam Ka- binet Kerja) Menteri Pertanian sejak 27 Maret 1966.
St. Munadjat Danusaputro S.H.	Sekretaris Pribadi Presiden untuk hal- hal khusus dengan kedudukan men- teri. 27 Maret 1966 - 25 Juli 1966.
<i>Kabinet Ampera,</i>	25 Juli 1966 - 6 Juni 1968.
Drs. Frans Seda	Menteri Keuangan
<i>Kabinet Pembangunan I,</i>	6 Juni 1968 - 27 Maret 1973.
Drs. Frans Seda	Menteri Perhubungan
<i>Kabinet Pembangunan II,</i>	sejak 28 Maret 1973.
Dr. Y.B. Sumarlin	Menteri Negara Penertiban dan Pen- dayagunaan Aparatur Negara.

KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT, KNIP, 11 Nopember
1945 - Desember 1949.

KNIP berfungsi sebagai parlemen. Anggota-anggota diangkat oleh Presiden.
Jumlah anggota, keadaan pada Pleno ke-VI di Yogyakarta: 539.

Partai Katolik Republik Indonesia

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Y. Dargo | Yogyakarta |
| 2. Djaman Hasibuan | Kotaraja |
| 3. A.Y. Djupri | Malang |
| 4. F.S. Harjadi | Malang |
| 5. Ny.A.M. Kindangan | Makassar (Ujung Pandang) |
| 6. A. Pandiangan | Pematang Siantar |
| 7. Sandjojo Sosroningrat | Lampung |
| 8. Y.M. Siregar | Sibolga |
| 9. Mr.A.A. Suhardi | Yogyakarta |
| 10. Ir. Suwanto | Surakarta |
| 11. Ir. Supardi | Yogyakarta |
| 12. Dr. Suradi | Jakarta |

SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 15 Pebruari 1950 - 16
Agustus 1950.

Jumlah anggota: 32

utusan dari:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Dr.R.V. Sudjito | Negara Republik Indonesia |
| 2. Mr. Tjung Tin Jan | Daerah Bangka |
| 3. A. Djelani | Negara Kalimantan Barat |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SE-
RIKAT, 15 Pebruari 1950 - 16 Agustus 1950.

Jumlah anggota: 151

utusan dari:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. I.J. Kasimo | Negara Republik Indonesia |
| 2. R. Jamco Pr. | Negara Indonesia Timur |
| 3. L.E. Manteiro | Negara Indonesia Timur |
| 4. Mr. Teng Tjin Leng | Negara Indonesia Timur |
| 5. R.S. Pranoto | Negara Jawa Timur |
| 6. Th.v.d. Lee | Daerah Jawa Tengah |
| 7. F.C. Palaunsuka | Kalimantan Barat |
| 8. Tjoeng Lin Sen | Kalimantan Barat |
| 9. G.R. Schmitz | Golongan minoritas |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMENTARA, 16 Agustus
1950 - 26 Maret 1956.

Disusun dari bekas anggota-anggota: Dewan Pertimbangan Agung (13), Senat RIS
(29), Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (46), DPR-RIS (148). Jumlah anggota 236.

Partai Katolik

1. I.J. Kasimo (Karena menjadi menteri diganti tgl. 7-10-1955 oleh Ir. Suwanto).
2. A. Suhardi S.H. (yang diganti tgl. 1-4-1955 oleh M. Oentoc).
3. R. Sutarto Hadisudibyo
4. L.E. Manteiro (Non-aktif sejak tgl. 1-1-1952 karena menjadi Kepala Daerah Flores).
5. G.R. Schmitz
6. Dr. R.V. Sudjito
7. Tjung Tin Jan S.H.

Persatuan De ya

8. A. Djelani
9. F.C. Palaunsuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 26 Maret 1956 - 22 Juni 1959.
Hasil pemilihan umum tgl. 29 September 1955; jumlah anggotanya: 272.

Partai Katolik mewakili daerah:

1. L. Kape Nusa Tenggara Timur
2. Drs. D. Matakupan Nusa Tenggara Timur
3. A.B. de Rozari Nusa Tenggara Timur (Karena menjadi menteri muda diganti tgl. 14-6-1956 oleh R. Duriat).
4. R. Sutarto Hadisudibyo Nusa Tenggara Timur
5. H. Sumarto Jawa Tengah
6. I.J. Kasimo Jawa Timur

Persatuan Daya

7. F.C. Palaunsuka Kalimantan Barat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 23 Juli 1959 - 24 Juni 1960
Dalam rangka UUD 1945; jumlah anggotanya: 259/262.

Partai Katolik:

1. I.J. Kasimo
2. L. Kape
3. R. Duriat
4. Drs. D. Matakupan
5. V. Saka
6. R. Sutarto Hadisudibyo
7. Tjung Tin Jan S.H.
8. F.C. Palaunsuka (Sampai akhir th. 1959 sebagai wakil *Persatuan Daya*)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG, 25
Juni 1960 - 31 Desember 1966.

Semua diangkat oleh presiden tgl. 24-6-1960; jumlah anggotanya: 281, ditambah antar waktu sampai 304. Tgl. 30 Maret 1966 62 wakil PKI dan ormas-ormasnya dianggap berhenti, tiga saja diganti; Tgl. 4 April 1966 3 anggotanya *Partai Murba* dianggap berhenti.

Partai Katolik

1. V. Saka
2. R. Sutarto Hadisudibyo
3. Drs. D. Matakupan
4. F.C. Palaunsuka
5. Drs. F. Seda (Karena menjadi menteri perkebunan diganti tgl. 31-12-1964 oleh Drs. B. Mang Reng Say).

Wakil-Wakil Ulama

6. A. Conterius SVD (Karena dibebaskan dengan hormat diganti tgl. 28-3-1964 oleh Th. Hardjawasita Pr.)
7. C. Widjajasuparto Pr. (Karena meninggal dunia diganti tgl. 28-5-1964 oleh V.B. Da Costa S.H.)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,
1 Februari 1967 - 13 Februari 1968.

Tgl. 1 Februari 1967 dilantik 108 anggota baru; jumlah anggota: 350.

Partai Katolik

1. V. Saka
2. R. Sutarto Hadisudibyo
3. Drs. D. Matakupan
4. F.C. Palaunsuka
5. Drs. B. Mang Reng Say
6. H. Soripada Sihombing
7. Drs. C. Salombe
8. R. Lahur
9. F. Sudijono
10. H. Tjan S.H.
11. Ny. F. Duriat

Golongan-Golongan Karya

- | | |
|--------------------------|---|
| 12. Th. Hardjawasita Pr. | Wakil Ulama |
| 13. V.B. Da Costa S.H. | Wakil Ulama |
| 14. Y.B. Utoro | Wakil Ulama (Sejak 8-6-1967. Karena mengganti Frans Kalangi, yang tidak mengangkat sumpah dan diberhentikan dengan hormat). |
| 15. C. Batubara | Karya Mahasiswa |
| 16. A. Lim Dian Khoen | Karya Mahasiswa |
| 17. I. Grey Graitto | Karya Pemuda |
| 18. Drs. Yakob Oetama | Karya Wartawan |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG, 13
Februari 1968 - 3 Juli 1971.

Tgl. 13 Februari 1968 dilantik 58 anggota baru. Tgl. 17 Februari 1968 dilantik 5 anggota baru dan 28 Februari satu, 8 Mei satu dan 24 Agustus satu; Jumlah anggota: 414.

Partai Katolik

1. Drs. B. Mang Reng Say
2. F.C. Palaunsuka
3. H. Tjan S.H.
4. R. Duriat
5. V. Saka
6. Drs. C. Salombe
7. I. Gray Graitto (Yang diganti tgl. 17-10-1970 oleh Drs. F. Odjan).
8. M. Datubara
9. L. Manteciro
10. Y. Socparimo
11. Drs. R. Lahur
12. F. Sudijana

14. V.B. Da Costa S.H.	Wakil Ulama
15. Y.B. Utoro	Wakil Ulama
16. C. Batubara	Karya Mahasiswa
17. A. Lim Bian Khoen	Karya Mahasiswa
18. Drs. Yakob Oetomo	Karya Wartawan
19. G.A. Sugiharto	Sekber / Non Affiliasi
20. Drs.G. Sugiharso	Kesatuan Aksi
21. Drs. Y.B. Moerdopo	Kesatuan Aksi
22. Wartono	Sekber / Non Affiliasi
23. A.M.D. Jusuff	Sekber / Non Affiliasi
24. I.Y. Suharno	Sekber / Non Affiliasi
25. I. Sujono	Kesatuan Aksi
26. Wiratmo Sukito	3 - Non
27. Dr.Ny. Isjwari	3 - Non
28. A. Sabiki Surohardjono	ABRI - AK
29. Dr. Ben Mboi	ABRI - AD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT sejak tgl. 28 Oktober 1971.

Hasil pemilihan umum tgl. 3 Juli 1971; jumlah anggota: 460.

Partai Katolik, sejak bulan Januari 1973 Partai Demokrasi Indonesia

mewakili:

1. Gr. Sani Fenat Kab. Timor Tengah Utara,
2. V.B. Da Costa S.H. Nusa Tenggara Timur
3. F.C. Palaunsuka Sika-Flores, Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

Golongan Karya

4. Ny.Y. Mailoa Kodya Medan
5. Djoko Sadyatmiko Kabupaten Cirebon
6. Ir. A. Suraddiman Kab. Jawa Tengah
7. Drs. Surjanto Kodya Tegal
8. N. Soesilo Semarang
9. Ny. Sumarni B.A. Kedal / Jawa Tengah
10. Soebadi Hardjoloekito Batang / Jawa Tengah
11. Drs. I. Umar Suparno Kab. Wonogiri
12. H. Mariarsa Kodya Salatiga
13. Ir.P.I. Soeradji Batang / Jawa Tengah
14. U. Kartidjo Wiropramudjo D.I. Yogyakarta
15. Ny. Sulandra Maria Theresa Sax Adenan Kab. Lamongan / Jawa Timur
16. Drs. A. Aloy Kodya Pontianak
17. Tjilik Riwut Kalimantan Tengah
17. Drs. Sihong Doelien Kalimantan Selatan
19. Y. Wowor S.H. Sangihe Talaud
20. A.M.D. Jusuff Gowa / Sulawesi Selatan
21. A. Beretallo Alor / Nusa Tenggara Timur
22. C. Hamboer Manggarai-Flores / Nusa Tenggara Timur
23. W.P. Doy Ende-Flores / Nusa Tenggara Timur
24. Dr.I. Fernandes Flores Timur / Nusa Tenggara Timur
25. G.E. Gero Ngada-Flores / Nusa Tenggara Timur
26. Da Lopes Mansuetus Centis Irian Jaya

27. Y. Sudarko Prawirojudo Irian Jaya
28. M. Migeraya Sorong / Irian Jaya
29. Drs. I. Barotodi Kab. Jajawijaya / Irian Jaya
30. N. Renwarin Kab. Jayapura / Irian Jaya
31. V. Sukijanto Yapen Waropen / Irian Jaya

yang diangkat oleh presiden:

32. Drs. Warsito (Kol. TNI-AD)
33. Drs. Sitompul Hotma Tiniopan (Kol. TNI-AD)
34. G. Suparmin (Kol. TNI-AD)
35. R.L. Superto (Kol. TNI-AU)
36. Drs. Y.B. Moerdopo
37. C. Batubara
38. Drs. Yakob Octama
39. I.Y. Soeharno
40. Drs. G. Sugiharso
41. G.A. Sugiharto
42. Wartono

Konstituante, 10 Nopember 1956 - 5 Juli 1959

Jumlah anggota: 520 sebagai hasil pemilihan umum tgl. 15 Desember 1955, ditambah dengan 14 anggota yang diangkat. Jumlahnya: 534.

Partai Katolik

1. Drs. Andello
2. R. Sutarto Hadisudibyo
3. Drs. B. Mang Reng Say
4. B. Manek
5. V.B. Da Costa
6. I.J. Kasimo
7. P. Da Cunha
8. Prof. Suhardi
9. Dr. R.V. Sudjito
10. Ir. Siwanto
11. Drs. Lo Siang Hien (Lo Ginting, yang diangkat sebagai wakil golongan minoritas)
12. G.R. Schmitz, (yang diangkat sebagai wakil golongan minoritas).

Persatuan Daya

13. A. Djelani
14. Y. Oevang Oeray
15. W. Hittam

Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA, 15

Agustus 1960 - 30 September 1972.

Semua diangkat oleh presiden tgl. 25 Agustus 1960; jumlah anggota: 616. Setelah G-30-S/PKI anggota-anggota PKI dan ormas-ormasnya dianggap berhenti dan diganti.

Partai Katolik

1. V. Saka
2. R. Sutarto Hadisudibyo
3. Drs. D. Matakupan
4. F.C. Palaunsuka
5. Drs. B. Mang Reng Say

Golongan-Golongan Karya

6. A. Conterius SVD (yang diganti tgl. 28-3-1964 oleh V.B. Da Costa SH)
7. C. Widjajasparto Pr. (yang diganti tgl. 28-3-1964 oleh Th. Har-djawasito Pr., diganti tgl. 13-2-1968 oleh Drs. Lo Ginting.)
8. Prof.Dr. N. Drijarkara SJ (Yang meninggal th. 1967)
9. Dr. Th. Lumanauw Pr.
10. Mgr. Y. Padmosetputro Pr.
(6 s/d 10 semua wakil ulama Katolik)
11. Laurens Say wakil daerah Nusa Tenggara Timur
12. Yosef Himawan Djaja Pemuda Katolik
Endra

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, sejak 1 Oktober 1972.

Hasil pemilihan umum tgl. 3 Juli 1971. Jumlah anggota: 920.

Partai Katolik, sejak Januari 1973 Partai Demokrasi Indonesia

1. Gr. Sani Fenat
2. V.B. DaCosta SH
3. F.C. Palaunsuka
4. R.G. Duriat

Golongan Karya

5. Djoko Sudjatmiko
6. Ny. Y. Mailoa
7. Ir.A. Suradiman
8. Drs. P.C. Surjanto
9. N. Soesilo
10. Ny. Sumarni BA
11. Soebadi Hardjoloekito
12. Ir.P.I. Soeradji
14. U.Y. Katidjo Wiropramudjo
15. Tjilik Riwut
16. Drs. A. Aloy
17. Ny. Sulandra Maria Theresia Sax Adenan

18. Drs. Siliong Dulien
19. Y.G. Wowor SH
20. A.A. Bercallo
21. W.P. Doy
22. Dr. H. Fernandes
23. M. Migetaya
24. Y. Soedarko Prawirojudo
25. G.E. Gero
26. Drs. I. Barotodi
27. N. Renwarin
28. Drs. Warsito
29. H.T. Sitompul Hotma Tiniopan
30. G.M. Suparmin
31. R.L. Suparto
32. C. Batubara
33. I. Yogi Supardi
34. R.F. Soedirdjo Hadiwinoto
35. A.Y. Witono
36. Y. Henuhili
37. R.F.G. Loing
38. Krisno Djumar
39. Dr.Y.B. Sumarlin
40. Drs. Berens Gintings
41. H. Mote
42. Soejono
43. Drs. Y. Imam Soedarwo
44. Ir. Suhartoyo
45. Y. Kiapoli
46. F.D. Burhan SH
47. F. Wera Wangge
48. Drs. S. Suhardi SH
49. B.P. Messakh
50. Drs. Bartho Beke Djoke
51. Drs. Y.A. Bere Mau
52. M. Njawathi SH
53. Y.A. Husin
54. Drs. Y. Moerdopo
55. Ir. Sihono Jusuf
56. Sofjan Wanandi SH
57. Drs. I. Umar Suparno
58. H. Mariarsa
59. C. Hambocr
60. Da Lopes Mansuetus Centris
61. Drs. Yakob Oetama
62. I.Y. Soeharno
63. Drs. G. Sugiharso
64. G.A. Sugiharto
65. Wartono
66. Y.B. Utoro
67. Roeskamdi
68. V. Sukijanto
69. A.M.D. Jusuff
70. R. Subono
71. Drs. Sunardi Djiwandono
72. Jusuf Wanandi
73. Sudjati B.A.

Semua diangkat oleh presiden; jumlah anggota: pada th. 1959: 47. th. 1973: 18.

- Daftar, yang kami terima dari Sekretariat M.P.R.

Sumber: M.P.M. Muskens, Pr., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, Pengintegrasian di Alam Indonesia*, jilid 4, Jakarta: Dokpen MAWI, 1973, hlm. 497-507.

Lampiran : 16

Komposisi Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No.	PARTAI GOLONGAN, FRAKSI PERWAKILAN DLL	K.N.I.P.		DPR. RIS.	DPR. S.		DPR. PEMILU		DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG					DPR PE- MILU 1971
		1946	1949		1954	1956	1959	1965	A	B	C	D	E	
1.	MASYUMI	60	50		43	60	53		44	44	44	47	78	20
2.	P.N.I.	45	45		42	58	58		36	36	36	46	75	58
3.	N.U.				17	32	33		20	20	20			
4.	P.K.I.	35	32		5	9	8		6	6	6	11	17	7
5.	PARKINDO	8	12		4	8	8		5	5	5	22	20	10
6.	PS.II		12		9	8	8		5	5	5	11	15	3
7.	KATHOLIK (P.K.R.I.)	4	12		15	5	5		1	1	1	4	4	2
8.	PS.I	35	36		4	4	4		2	2	2	6	9	
9.	MURBA		8		1	4	4		1	1	1	4	4	
10.	PERTI				6	4	4		2	2	2	6	9	
11.	LP.K.I.				19	1	1							
12.	P.B.I. (Partai Buruh Indonesia)	35	34		13	1	1							
13.	P.I.R. Haurin				10	1	1							
14.	P.I.R. Wongsu				9	1	1							
15.	P.R.N.				7	1	1							
16.	PERSATUAN PROGRESIF				4	1	1							
17.	DEMOKRAT				2	1	1							
18.	PARINDRA				2	1	1							
19.	S.K.I.				2	1	1							
20.	SOESI				2	1	1							
21.	B.T.I				1	1	1							
22.	G.T.I				1	1	1							
23.	NASIONAL PROGRESIF				11	11	12							
24.	PENDUKUNG PROKLAMASI				7	7	6							
25.	PEMBANGUNAN				2	2	2							
26.	Gerakan Pembela Pancasila				2	2	2							
27.	P.R.I.				1	1	1							
28.	Perorangan A.K.U.I.				1	1	1							
29.	Perorangan P.P.T.I.				1	1	1							
30.	Golongan/Perwakilan/Tak berpartai dan lain-lain	134	285		11	5	7		1	2	2	2	2	
31.	PARTINDO								118	133	102	160	18	24
32.	PARMUSI								35	38	38	42	92	261
33.	GOLKAR												75	75
34.	A.B.R.I.													
		536	1461	235	272	262	283	304	242	350	414	460		

Sumber: Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
Jakarta: PT. Gramedia. 1980. hlm. 194-195.



Suplemen:

SILABUS DAN SISTEM PENGUJIAN

Nama Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Semester : XII / 1
 Alokasi Waktu : 4 x 45 menit
 Standar Kompetensi : Kemampuan memahami perkembangan paham baru/nasionalisme dan pergerakan Nasional Indonesia.

Kompetensi Dasar	Kemampuan memahami Peran I.J. Kasimo dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973.
Indikator	1. Siswa mampu mendiskripsikan latar belakang kehidupan I.J. Kasimo 2. Siswa mampu mendiskripsikan peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia 1921-1973. 3. Siswa mampu mendiskripsikan peran I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia 1921-1973.
Materi Pokok	Peran I.J. Kasimo dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973.
Uraian Materi	1. Latar Belakang Kehidupan I.J. Kasimo a. Latar belakang sosial-budaya Kebudayaan Jawa/Yogya, → membentuk etos, tata laku, sikap hidup yang solider, sederhana, suka bekerja keras dan berkepribadian luhur pada I.J. Kasimo b. Latar belakang sosial-politik Indonesia Kondisi bangsa Indonesia tengah mengalami kolonialisme liberal

dengan Politik Etis. Pada prakteknya, Politik Etis masih menerapkan upaya diskriminatif, pengadapan secara unifikasi, asosiasi dan asimilasi, yang menyebabkan masyarakat masih mengalami ketidakadilan dan ketidaksejahteraan.

c. Latar belakang ekonomi

Diskriminasi dan pengadapan secara unifikasi, asosiasi dan asimilasi disertai juga upaya eksploitasi tenaga kerja rakyat untuk dipekerjakan bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda sendiri.

d. Latar belakang pendidikan

> Sistem pendidikan kolonial yang sangat diskriminatif, terkotak-kotak berdasarkan kelas-kelas sosial dan rasialitas, dengan tujuan mencetak tenaga-tenaga bagi kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

> Pendidikan yang dienyam I.J. Kasimo membentuk rasionalitas, dan spiritualitas sehingga menumbuhkan jiwa humanitas, dan nasionalisme.

e. Motivasi dan cita-cita I.J. Kasimo

> Motivasi I.J. Kasimo dengan moto "*salus populi suprema lex*" (kesejahteraan adalah hukum tertinggi), "*pro bono publico*" (demi kepentingan umum) dan "*pro ecclesia et patria*" (demi gereja dan tanah air).

> Cita-cita I.J. Kasimo ialah kehidupan masyarakat yang sejahtera; karena kesejahteraan ialah hukum tertinggi.

2. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia 1921-1973.

a. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1900-1942)

> I.J. Kasimo mendirikan PPKD (Partai Katolik Jawa) 5-8-1923.

	> I.J. Kasimo mengajukan aspirasi dalam <i>Volksraad</i> mengenai bidang pendidikan, pertanian dan ketatanegaraan. > Usaha integrasi bangsa dengan membentuk PPKI (Persatuan Politik Katolik Indonesia) dan bergabung dalam GAPI (Gabungan Aksi Politik Indonesia). b. Pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945) I.J. Kasimo menjadi pejabat birokrasi di bawah Siri Susuhunan Pakubuwono XI di Surakarta sebagai <i>adjun landbouw consult.</i> c. Pada masa Demokrasi Liberal (1945-1955) > I.J. Kasimo membentuk PKRI (8 Desember 1945) > I.J. Kasimo menjabat sebagai legeslatif / anggota KNIP (1946) > I.J. Kasimo menjabat Menteri Kemakmuran dan Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Amir I, Amir II, dan Hatta > I.J. Kasimo menetapkan program "Kasimo Plan" (20-11-1947) > I.J. Kasimo menjabat sebagai anggota DPR-RIS (1949-1950). > I.J. Kasimo terlibat usaha diplomasi dalam perundingan Linggajati (10-11-1946) dan KMB (23 Agustus-12 November 1949) serta pengakuan kedaulatan Irian Barat. d. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1956-1965) > I.J. Kasimo ikut menegakkan konstitusi negara (UUD'45) > I.J. Kasimo mendukung dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli'59 > I.J. Kasimo menolak Konsepsi Presiden 21 Februari 1959 > I.J. Kasimo ikut mendirikan Liga Demokrasi > I.J. Kasimo menjabat sebagai anggota DPAS di tahun 1960-an e. Pada masa Orde Baru (1966-1973) > I.J. Kasimo ikut menegakkan Tritura dengan membendung pengaruh komunisme dan ikut memobilisasi dalam ekonomi. > I.J. Kasimo menjabat sebagai DPA, membentuk Tim
--	--

	Pemberantasan Korupsi (TPK) dan Komisi Empat. 3. Peran I.J. Kasimo Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia 1921-1973. a. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda (1900-1942) > Upaya perlindungan I.J. Kasimo terhadap kesejahteraan kaum buruh pekerja perkebunan di Merbuh tahun 1921. > I.J. Kasimo mengajar di sekolah pertanian di Tegalgondo (1925). > Upaya perlindungan I.J. Kasimo terhadap pelaksanaan sistem sewa tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda (1925). > Usaha I.J. Kasimo dalam mengemanispaikan golongan Katolik dalam masyarakat b. Pada masa Pendudukan Jepang (1942-1945) > I.J. Kasimo menjabat sebagai adjun landbouw consult di Surakarta 1942 dengan usaha menmajukan pertanian setempat. > I.J. Kasimo ikut membangun spiritualitas umat Katolik yang telah hancur oleh kekejaman Jepang. c. Pada masa Demokrasi Liberal (1945-1955) > I.J. Kasimo memajukan AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia), Wanita Katolik, dan Serikat Buruh Indonesia. > I.J. Kasimo ikut membuat Minimum Program dari Gereja Room Katolik tahun 1949, yang memperhatikan kebebasan agama, perlindungan sosial dan kesehatan rakyat. > I.J. Kasimo meningkatkan produksi kopra dengan menjabat sebagai Direktur Kopra Fonds (1949-1950). d. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1956-1965) > I.J. Kasimo meningkatkan kesejahteraan pekerja perkebunan tebu dengan membangun sistem sewa tanah menjadi sistem kontrak e. Pada masa Orde Baru (1966-1973)
--	---

	> I.J. Kasimo menyarankan Presiden Suharto untuk mengeluarkan Inpres No. 9 tahun 1975 tentang TRI (Tebu rakyat Intensifikasi) > I.J. Kasimo melindungi kaum buruh dari pengaruh komunisme > I.J. Kasimo mendirikan Yayasan Kasimo > I.J. Kasimo memajukan perekonomian swasta dengan menjabat sebagai Direktur Perkembangan Ekonomi (1960) dan mendirikan PT Asuransi Ramayana (1960) > I.J. Kasimo mengembangkan kebudayaan dan informasi dengan mendirikan Majalah "Intisari" (1963), Surat Kabar "Kompas" (1965) dan Percetakan PT. Gramedia.(1970)
Pengalaman Belajar	1. Pendahuluan > Apersepsi: Guru memotivasi siswa dengan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan materi. > Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 2. Kegiatan Inti a. Orientasi Siswa membaca hand-out yang diberikan oleh guru, dilanjutkan penjelasan dari guru, kemudian guru membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa. b. Latihan Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara berkelompok c. Umpan Balik Perwakilan dari kelompok mempresentasikan jawaban mereka, kemudian guru dan siswa lain menanggapi. 3. Penutup Guru memberikan kesimpulan dan penegasan tentang materi yang telah dibahas, kemudian guru memberikan PR.

Sumber Belajar	- Tim Wartawan Kompas. 1980. <i>I.J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya</i>. Jakarta: PT Gramedia. - Tashadi, dkk., 1993. <i>Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan</i>, Jakarta: Depdikbud Proyek IDSN. - Muskens, Dr. M.P.M., Pr. 1973. <i>Sejarah Gereja Katolik Indonesia. Pengintegrasian di Alam Indonesia</i>, Jilid 4., Jakarta: Dokpen MAWI. - Marwati Djoned Poespcnegoro,dkk., 1984. <i>Sejarah Nasional Indonesia V dan VI</i>, Jakarta: Balai Pustaka. - Moedjanto, G. 1988. <i>Indonesia Abad ke-20, Jilid 1, Dari Kebangkitan Sampai Linggajati</i>. Yogyakarta: Kanisius.
Media	- Transparansi dan OHP - Papan tulis - Foto-foto profil
Penilaian	1. Penilaian Hasil Jenis tagihan : tes tertulis Bentuk tagihan : tes uraian Contoh tagihan : Butir-butir soal 1) Bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi dan pendidikan Indonesia ketika I.J. Kasimo masih kanak-kanak? 2) Apa saja motivasi dan cita-cita I.J. Kasimo dalam kehidupannya? 3) Apa saja peran dan sumbangan I.J. Kasimo dalam kehidupan bernegara di Indonesia? 4) Apa saja peran dan sumbangan I.J. Kasimo dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia? 2. Penilaian Proses

Jenis tagihar : lembar observasi Bentuk tagihan : skala nilai Contoh tagihan :					
Kegiatan	Mengajukan pertanyaan	Menjawab pertanyaan	Memberikan tanggapan	keikutsertaan	ket

3. Penilaian tugas

Jenis tagihan : tugas

Bentuk tagihan : portofolio

Contoh tagihan : resume

Yogyakarta, 1 September 2006

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Abraham Bondan Aji Wahyono

